



**RPKD  
2025-2029**



# **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
2025-2029**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 532 – Sago Telp (0756) 7464131 Fax. (0756) 7464085

email : [bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id](mailto:bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025–2029.

Kemiskinan adalah tantangan besar yang dihadapi oleh negara kita, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun kita telah berupaya keras dalam berbagai program pengentasan kemiskinan, tantangan ini masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih sistemik dan terintegrasi. Sehingga penerbitan dokumen RPKD ini merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih efektif dan terarah.

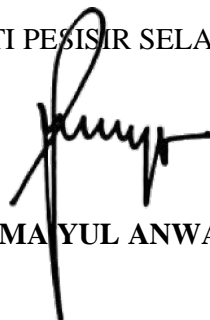
Dokumen perencanaan RPKD diharapkan dapat menjadi alasan yang kuat untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Komitmen meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, memperkuat akses terhadap pelayanan dasar, dan memberdayakan masyarakat miskin. Kami juga berharap agar semua pihak dapat berperan aktif dalam implementasi program ini, demi tercapainya tujuan bersama dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik dari semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha kita.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Pesisir Selatan, Desember 2024*

BUPATI PESISIR SELATAN



**RUSMAYUL ANWAR**

## ***Sepatah Kata***

### ***Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah***

**D**okumen ini merupakan langkah strategis untuk penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Penting untuk menggunakan data kemiskinan yang akurat dan terkini, dengan memperkuat sistem pengumpulan data melalui teknologi, seperti aplikasi online data by name by address. Kolaborasi antar sektor, terutama antara Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Perumahan, perlu ditingkatkan. Pembentukan forum rutin untuk koordinasi antar OPD diusulkan agar program lebih terintegrasi.

Peningkatan kapasitas SDM juga krusial, melalui pelatihan dan workshop berkala tentang kemiskinan ekstrem. Monitoring dan evaluasi berkesinambungan sangat penting; pengembangan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program akan membantu menilai efektivitasnya. Mengajak masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk menyajikan data kemiskinan dalam bentuk peta interaktif sangat disarankan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. *(Wakil Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)*



**Saya** mengapresiasi fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata harus diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, dan proyek harus menjangkau daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi.



Mengingat kerentanan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap bencana, implementasi program mitigasi yang komprehensif sangat diperlukan, dengan kerjasama BPBD dan masyarakat lokal. Pendidikan harus menjadi prioritas, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat menengah dan vokasi, serta memperluas program beasiswa untuk keluarga miskin.

Penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif penting untuk melindungi masyarakat dari fluktuasi ekonomi. Semua kebijakan harus didasarkan pada data akurat agar alokasi sumber daya efisien dan tepat sasaran. Saya mendorong kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan, memastikan dampak positif bagi masyarakat Pesisir Selatan. *( Sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)*



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Sepatah Kata Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ..	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Acuan dan Kebijakan .....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.4. Kedudukan dan Ruang Lingkup .....	I-4
1.5. Sistematika Penyusunan .....	I-6
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH</b>	II-1
2.1. Administrasi Wilayah .....	II-1
2.2. Aspek Geografi dan Demografi .....	
2.3. Analisis Determinan Kemiskinan .....	II-36
<b>2.3. Kondisi Fiskal</b> .....	II-79
<b>BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH</b>	III-1
3.1. Konsep Kemiskinan .....	III-1
3.2. Profil Kemiskinan Konsumsi .....	III-6
3.3. Kemiskinan Konsumsi dan Non Konsumsi .....	III-16

<b>BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH</b>	IV-1
4.1 Arah Kebijakan .....	IV-1
4.2 Strategi Pembangunan .....	IV-3
4.3 Prioritas Program Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	IV-4
<b>BAB V LOKASI PRIORITAS</b> .....	V-1
5.1. Lokasi Prioritas Bidang Kemiskinan Konsumsi/Ekonomi ....	V-1
5.2. Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan .....	V-4
5.3. Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan .....	V-7
5.4. Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .....	V-12
<b>BAB VI P E N U T U P</b> .....	VI-1
6.1. Mitigasi Resiko .....	VI-1
6.2. Kesimpulan .....	VI-3
6.3. Rekomendasi .....	VI-4

*Pesisir Selatan Negeri Sejuta Persona*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita terutama Indonesia yang merupakan negara yang masih dalam kategori negara berkembang. Kemiskinan dianggap sebagai permasalahan, yang jawabannya belum terumuskan secara absolut. Potret kemiskinan hingga saat ini masih mudah kita jumpai, baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, tetapi belum juga masalah terselesaikan. Oleh karena itu Pemerintah menjadikan penanggulangan kemiskinan ini sebagai program prioritas dalam pembangunan pusat sampai ke daerah kota dan perdesaan. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Ia merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dan harus dicari cara penyelesaiannya serta ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,23 persen dari 7,11 persen tahun 2022 menjadi 7,34 persen tahun 2023. Hal ini merupakan akibat adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 4,9 persen dari Rp. 526.564,- perkapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp. 554.057 perkapita per bulan tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan, kebijakan operasional berupa Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan bahwa untuk mencapai target nasional dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan, maka strategi yang dilakukan untuk

percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; (4) pembangunan inklusif yang dilaksanakan sesuai kondisi daerah.

Tujuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas supaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Efektifitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan didaerah adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dilegitimasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan didaerah sebagaimana direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan SDG's. Kinerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen RPKD adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Keberlakuan dokumen RPKD mengikuti proses demokratisasi di tingkat lokal yaitu 1 (satu) periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Agar lebih efektif dan tepat sasaran upaya penanggulangan kemiskinan maka TKPKD dalam merumuskan rancangan kebijakan memperhatikan sasaran, program dan monitoring terhadap pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan.

## **1.2. Acuan dan Kebijakan**

Penyusunan RPKD didasarkan pada dasar hukum dan acuan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Kebijakan Operasional sebagai basis legitimasi penyusunan RPKD adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

- tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 – 2029 ini dimaksudkan sebagai landasan kebijakan daerah dan strateginya serta wujud dari konsensus politik para *stakeholders* pembangunan di daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029 ini adalah:

1. RPKD ini merupakan penjabaran arah kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045 khususnya pada tahapan I (2025-2029).
2. RPKD ini disusun sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029.
3. Penegasan dan pemantapan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, beserta para stakeholder lainnya serta masyarakat miskin itu sendiri dan pihak lain yang peduli untuk bersama-sama berusaha menanggulangi masalah kemiskinan.
4. Wujud konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan

melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui pendekatan partisipatif.

5. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, para *Stakeholders* lainnya (LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi) serta pihak lainnya yang peduli.
6. Landasan strategi kebijakan daerah Kabupten Pesisir Selatan untuk pengentasan kemiskinan.
7. Strategi, kebijakan dan program/kegiatan beserta target indikator yang menyertainya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan dalam perencanaan pembangunan daerah lainnya.

#### **1.4. Kedudukan dan Ruang Lingkup**

##### **1.4.1. Kedudukan**

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 yang memuat kebijakan Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama lima tahun. Dengan demikian, dokumen RPKD selanjutnya dapat menjadi arah dan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Diharapkan secara strategis, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan menjadi satu bagian yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen RPKD ini merupakan dokumen kebijakan untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Sebagai strategi kebijakan dan rencana aksi dari Pemerintah Daerah, maka dasar hukum dari dokumen RPKD ini akan dilandaskan kepada Peraturan Bupati (Perbup).

Dokumen RPKD diharapkan menjadi pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan. Kebijakan, strategis dan sasaran RPKD tidak akan hanya menjadi rencana kerja pemerintah tetapi juga menjadi “gerakan bersama” semua pelaku pembangunan.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dokumen RPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 ini mencakup:

- 1.4.2.1. Mengkaji faktor penyebab kemiskinan melalui identifikasi masalah
- 1.4.2.2. Menganalisis prioritas intervensi dengan pendekatan inklusif
- 1.4.2.3. Menganalisis lokasi prioritas dan anggaran
- 1.4.2.4. Merumuskan prioritas program

#### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini terdiri dari 6 (enam) Bab yang meliputi:

- Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, acuan dan kebijakan, maksud dan tujuan penyusunan RPKD, kedudukan dan ruang lingkup dan sistematika penyusunan;
- Bab II Menyajikan tentang kondisi umum daerah berupa Administrasi Wilayah, Aspek geografi dan demografi, dan Struktur Ekonomi;
- Bab III **Membahas Profil Kemiskinan Daerah;**
- Bab IV Menyajikan Prioritas Program berupa Analisis Determinan Kemiskinan (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Dasar, Bidang Ketenagakerjaan), Kondisi Fiskal yang membahas tentang Kapasitas Keuangan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pusat, Struktur APBD, Analisis Pendapatan, Analisis Belanja, dan Analisis Pembiayaan

Bab V **Berisikan Identifikasi Prioritas wilayah**

Bab VI Penutup berisi Mitigasi Resiko, Kesimpulan dan Rekomendasi

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **2.1. Administrasi Wilayah**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah darat 6.049,33 Km<sup>2</sup> dan Luas Wilayah Laut 84,312 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan dengan 182 Nagari dan 480 kampung. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lengayang dengan luas wilayah 632,96 Km<sup>2</sup> yang memiliki 9 Nagari dan 45 kampung dengan ibukota Kecamatannya adalah Kambang. Sedangkan Kecamatan yang terkecil adalah Bayang dengan luas wilayah 80,92 Km<sup>2</sup> yang memiliki 17 Nagari dan 45 kampung dengan ibukota Kecamatannya adalah Pasar Baru.

#### **2.2. Aspek Geografi dan Demografi**

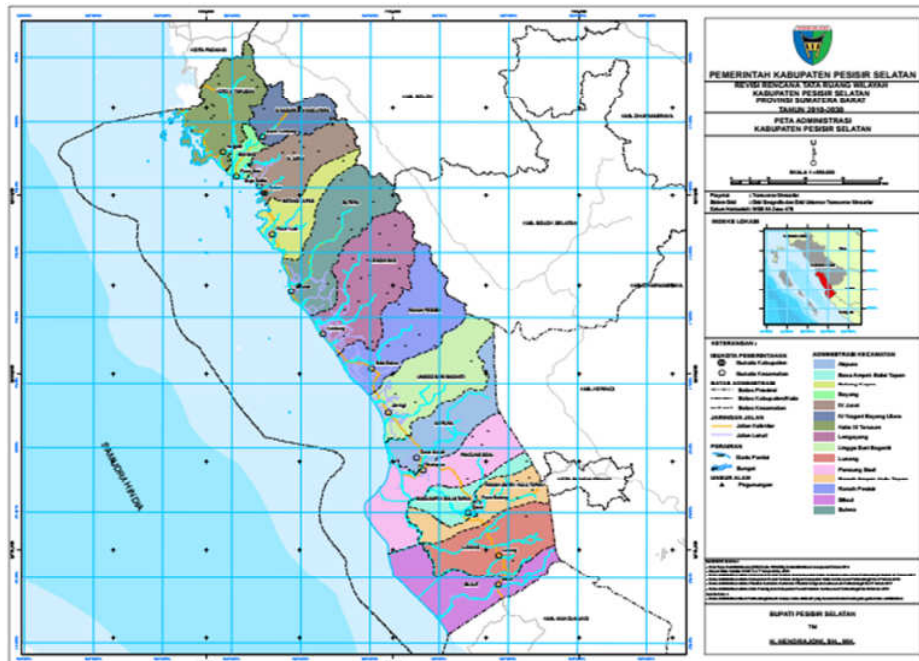
Aspek geografi mendiskripsikan kaitannya kondisi lokasi, kondisi fisik, dan hubungan ruang antara berbagai fenomena di Kabupaten Pesisir Selatan. Topografi, atau bentuk permukaan tanah, seperti pegunungan, lembah, dan dataran. Iklim mendiskripsikan pola cuaca yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia. Mendiskripsikan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan, seperti mineral, hutan, dan hasil laut. Penggunaan Lahan mendiskripsikan lahan/tanah digunakan, seperti untuk pertanian, pemukiman, atau industri.

Sedangkan Demografi menarasikan hal hal yang berkaitan dengan populasi, termasuk struktur kependudukan, distribusi, dan perubahan populasi dari waktu ke waktu. Aspek ini mencakup, jumlah dan kepadatan penduduk, ukuran total penduduk dan seberapa padat jumlah penduduk di suatu area. Komposisi Etnis dan Usia, Variasi etnis, kelompok umur, serta perbandingan antara pria dan wanita. Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat pendidikan masyarakat dan akses

terhadap layanan kesehatan. Mobilitas Penduduk, Pergerakan penduduk, baik migrasi dalam dan antar daerah.

Aspek demografi penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, serta merencanakan kebijakan publik yang sesuai.

**Gambar 2.7.**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan**



Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

### 2.2.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur. Lokasi administrasi berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota dan provinsi. Kabupaten Pesisir Selatan pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Pada sisi Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat berada di sebelah timur Kabupaten Pesisir Selatan, dimana ada Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memisahkannya. Sedangkan Kabupaten

Solok Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi timur laut, dan disebelah utara merupakan daerah administrasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pesisir Selatan juga berbatasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terpisahkan oleh lautan dengan Selat Mentawai di sebelah Kabupaten Pesisir Selatan

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**dan Jumlah Nagari dan Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2023**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
1.	Silaut	Silaut	466,45	10	27
2.	Lunang	Lunang	456,73	<b>10</b>	28
3.	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	281,96	10	20
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	187,46	10	20
5.	Pancung Soal	Inderapura	547,41	10	24
6.	Airpura	Tamuan	380,10	10	20
7.	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66	16	43
8.	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44	10	27
9.	Lengayang	Kambang	632,96	9	45
10.	Sutera	Surantih	569,81	12	32
11.	Batang Kapas	Pasar Kuok	277,54	9	29
12.	IV Jurai	Salido	368,19	20	52
13.	Bayang	Pasar Baru	80,92	17	45
14.	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242,33	6	17
15.	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37	23	51
<b>Total</b>			<b>6.049,33</b>	<b>182</b>	<b>480</b>

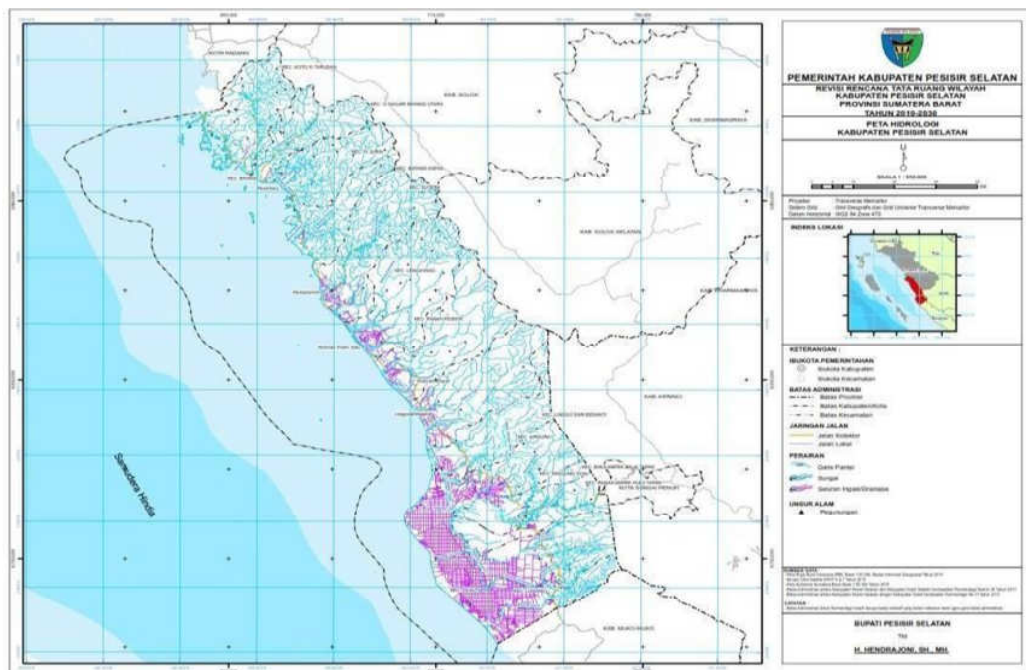
Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

### 2.2.2. Kondisi Hidrologi

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut. Karakteristik sungai-sungai yang

bermuara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil. Hulu sungai di Kabupaten Pesisir Selatan, jika dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi bagi pengembangan pembangunan ke depan, terutama bagi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Berikut potensi sumberdaya air di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Peta Hidrologi Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan

**Gambar 2.2.**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan**



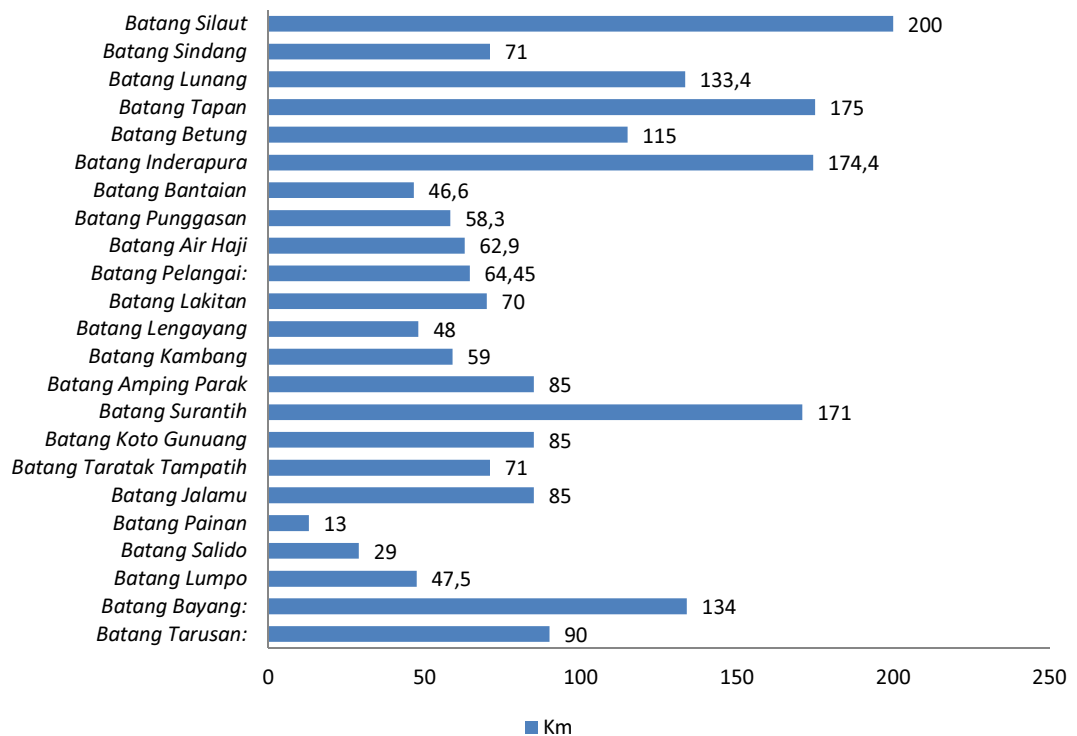
Sumber: Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura merupakan sungai terpanjang dengan panjang aliran sungai 200 Km (Batang Silaut), 175 Km (Batang Tapan) dan 174,4

(Batang Inderapura). Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Painan dengan panjang aliran sungai 13 Km yang melalui Kecamatan IV Jurai. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat.

Sumberdaya air ini agar tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik. Berikut ini nama sungai, lokasi beserta panjang alirannya.

**Gambar 2.3.**  
**Nama-Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

### 2.2.3. Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan

Berdasarkan data hasil pengolahan citra Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, Tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh hutan primer yakni seluas 302.124,78 hektar atau sekitar 49,94 % dari luas wilayah, perkebunan seluas 100,119,64

hektar (16,54 %), perkebunan kelapa sawit seluas 62.982,04 (10,40 %) dan lainnya dengan proporsi dibawah 10 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Porsi (%)
1.	Hutan Bakau/Mangrove	245,43	0,04
2.	Hutan Primer	302.124,78	49,94
3.	Hutan Sekunder	23.474,71	3,87
4.	Hutan Rawa Primer	928,05	0,15
5.	Hutan Tanaman Rakyat	17.749,44	2,93
6.	Ladang	29.249,41	4,85
7.	Pasir/Bukit Pasir Darat	637,41	0,10
8.	Perkebunan	100.119,64	16,54
9.	Perkebunan Kelapa Sawit	62.982,04	10,40
10.	Permukiman	6.270,97	1,03
11.	Sawah	25.764,73	4,25
12.	Semak Belukar	32.157,18	5,31
13.	Sungai	3.230,18	0,53
<b>JUMLAH</b>		<b>604.933,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Peta Tutupan Lahan Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

#### 2.2.4. Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi Geografis, Geologis dan Hidrometeorologis, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana. aktif euroasia dan indo-australia. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali. Selain terletak diantara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera yaitu Patahan Semangka. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gempa bumi yang menimbulkan efek masif kerusakan terjadi pada tahun 2007 dan 2009.

**Tabel 2.3.**  
**Jenis dan Penyebaran Resiko Bencana**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Lokasi Bencana	Gempa	Tsunami	Abrasi Pantai	Banjir	Longsor	Gunung Api	Kebakaran
1.	Koto XI Tarusan	√	√	√	√	√		√
2.	Bayang	√	√	√	√			√
3.	IV Nagari Bayang Utara	√				√		√
4.	IV Jurai	√	√	√		√		√
5.	Batang Kapas	√	√	√	√			√
6.	Sutera	√	√	√	√			√
7.	Lengayang	√	√	√	√			√
8.	Ranah Pesisir	√	√	√	√			√
9.	Linggo Sari Baganti	√	√	√	√	√		√
10.	Pancung Soal	√	√	√	√	√		√
11.	Airpura	√	√	√	√			√
12.	Basa Ampek Balai Tapan	√			√		√	√
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	√			√		√	√
14.	Lunang	√			√			√
15.	Silaut	√	√	√	√			√

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024<sup>a</sup>

#### **a. Gempa Bumi dan Tsunami**

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik Berdasarkan riset terakhir para ahli terhadap kondisi zona subduksi Mentawai diketahui bahwa tumbukan lempeng euroasia dan indo-australia telah terkunci (tidak bergerak lagi), sehingga potensi gempa berskala besar yang berimbas pada daerah di sekitarnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selain kerusakan akibat gempa, hal lain yang menjadi ancaman adalah terjadinya tsunami yang diprediksi akan menyapu kawasan pantai hingga radius 5 (lima) kilometer dari bibir pantai.

**Tabel 2.4.**  
**Tingkat Resiko Bencana**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Resiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1.	Banjir	0,782	Tinggi	0,686	Tinggi	0,249	Rendah	0,734	Tinggi
2.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,756	Tinggi	0,549	Sedang	0,255	Rendah	0,683	Tinggi
3.	Gempa Bumi	0,531	Sedang	0,748	Tinggi	0,262	Rendah	0,664	Sedang
4.	Kekeringan	0,659	Sedang	0,903	Tinggi	0,225	Rendah	0,772	Tinggi
5.	Cuaca Ekstrim	0,817	Tinggi	0,746	Tinggi	0,229	Rendah	0,776	Tinggi
6.	Tanah Longsor	0,561	Sedang	0,617	Sedang	0,237	Rendah	0,638	Sedang
7.	Kebakaran Hutan	0,615	Sedang	0,770	Tinggi	0,225	Rendah	0,715	Tinggi
8.	Tsunami	0,893	Tinggi	0,683	Tinggi	0,284	Rendah	0,752	Tinggi
9.	Epidemi Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,726	Tinggi	0,210	Rendah	0,576	Sedang
10.	Gagal Teknologi	0,333	Rendah	0,761	Tinggi	0,210	Rendah	0,585	Sedang

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018

### **b. Banjir**

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

### **c. Tanah Longsor**

Kabupaten Pesisir Selatan berada pada daerah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam  $\pm 50\%$  dari luas wilayah, dengan struktur tanah yang sangat rawan terhadap longsor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah longsor antara lain :

- a. Tingginya curah hujan
- b. Penebangan pohon yang sembarangan
- c. Peladangan yang sembarangan dan berpindah – pindah
- d. Pembabatan hutan yang tidak semestinya
- e. Tidak ditanaminya kembali hutan yang telah gundul (reboisasi)

#### **d. Abrasi Pantai dan Sungai**

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada di sepanjang pantai Sumatera ± 234 km dan kemiringan pinggir pantai sangat curam dengan gelombang pasang yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap abrasi pantai. Akibat dari terjadinya abrasi pantai tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap pemukiman masyarakat yang berada disepanjang pantai, dengan perbedaan ketinggian antara permukaan laut dengan pemukiman masyarakat sangat kecil yaitu ± 3 m. Abrasi pantai adalah bencana alam yang terjadi di wilayah sekitar pantai yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya perubahan musim
- b. Tingginya gelombang pasang
- c. Berkurangnya kawasan hijau disepanjang garis pantai (hutan bakau)
- d. Permukiman penduduk yang semakin dekat dengan pinggir pantai

#### **e. Kebakaran**

Pemukiman penduduk dan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya kebakaran. Faktor utama tingginya tingkat kebakaran antara lain:

- a. Padatnya rumah penduduk dengan akses jalan yang tidak memadai dalam melakukan pemadaman api pada beberapa titik-titik lokasi dikecamatan.
- b. Rata-rata rumah dan pertokoan tidak melakukan pemeriksaan ulang atau penggantian instalasi listrik baru rumah atau pertokoan yang pemakaiannya lebih dari 15 tahun.
- c. Kebakaran hutan disebabkan masih tradisionalnya masyarakat kita dalam pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran dan

beberapa wilayah yang mempunyai lahan - lahan gambut.

#### **f. Angin Badai dan Puting Beliung**

Kerentanan bencana lain yang mengancam adalah potensi terjadinya angin badai dan puting beliung. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini masyarakat sering terjadinya bencana angin badai dan puting beliung pada masa lalu.

#### **2.2.5. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Pesisir Selatan sangat kaya dengan berbagai kekayaan alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi alam tersebut memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan wilayah. Beberapa potensi utama yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan wilayah dan pembangunan adalah pertanian, kehutanan, pulau-pulau kecil, pariwisata, dan pertambangan.

##### **a. Lahan Pertanian**

Luas lahan sawah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 23.885,09 Ha. Sebagian besar dari luas lahan ini didominasi oleh lahan sawah irigasi yaitu sebesar 17.301,92 Ha. Kecamatan yang memiliki lahan sawah irigasi adalah Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 2.597,58 Ha. Selain sawah, Kabupaten Pesisir Selatan juga menghasilkan beberapa produk perkebunan.

Jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Luas lahan dan produksi jagung di Pesisir Selatan menunjukkan kondisi fluktuatif dari 2019-2023. Salah satu jenis kacang yang terkenal dari Pesisir Selatan adalah kacang goreng Dilan.

Produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami dinamika selama periode 2019-2023, dengan tren yang bervariasi untuk setiap jenis tanaman.

**Tabel. 2.5.**  
**Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha)**  
**Di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Jenis Sawah dan Luas (Ha)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Irigasi	22.137	22.137	17.464,19	17.721,17	17.301,92
2.	Tadah Hujan	7.999	7.999	6.290,90	6.072,92	6.492,17
3.	Pasang Surut	70	70	32,00	39,00	39,00
4.	Lebak	111	111	98,00	52,00	52,00
Total		30.317	30,317	23.885,09	23.885,09	23.885,09

Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2019 - 2024"

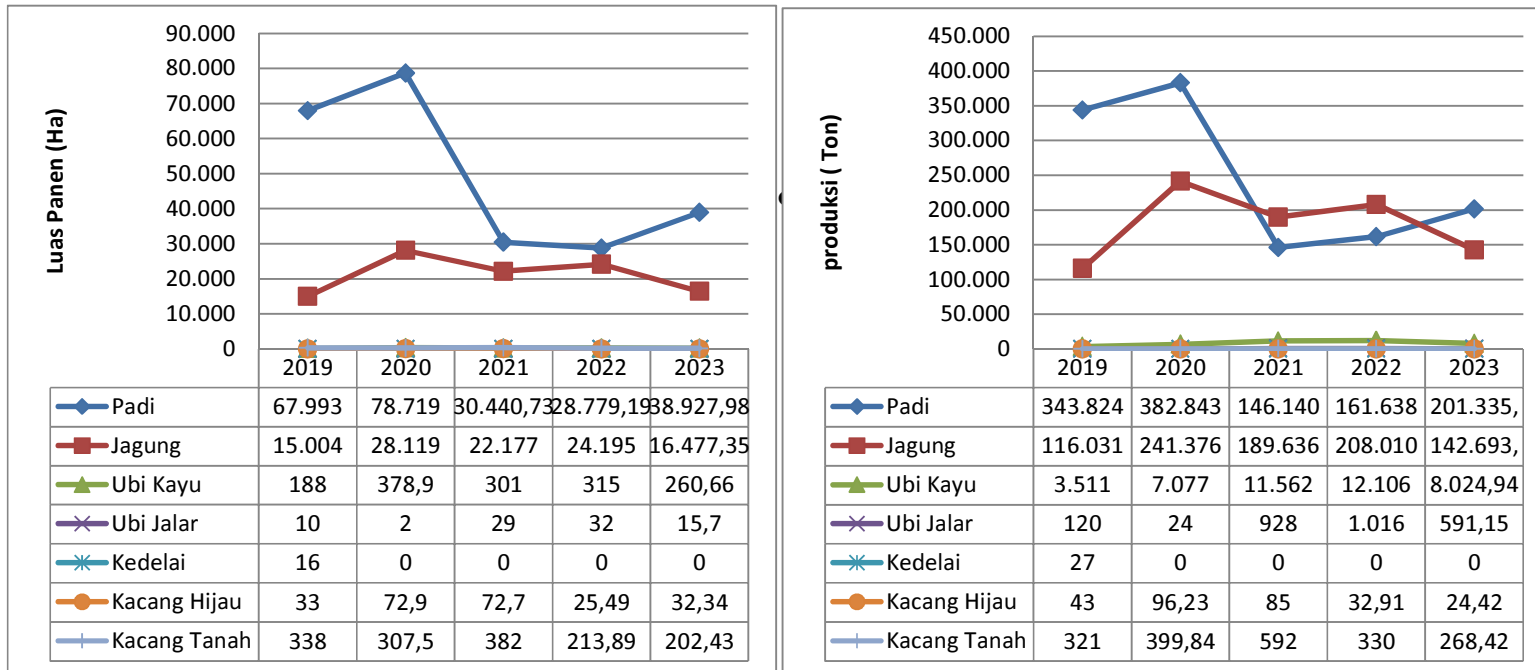
Pada Kategori Sayuran, Cabe merah merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan pada kategori buah-buahan, Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dengan produksi rata-rata 26,55 ton/Ha. Produksi padi mengalami penurunan dari 343.824 ton pada tahun 2019 menjadi 161.638 ton pada tahun 2022, namun kemudian meningkat kembali menjadi 201.335,63 ton pada tahun 2023. Produktivitas rata-rata padi juga mengalami penurunan dari 5,05 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 5,05 ton/ha pada tahun 2023. Produksi jagung mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 116.031 ton pada tahun 2019 menjadi 142.693,85 ton pada tahun 2023. Namun, produktivitas rata-rata jagung mengalami peningkatan dari 8,47 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 8,47 ton/ha pada tahun 2023. Produksi ubi kayu mengalami peningkatan dari 3.511 ton pada tahun 2019 menjadi 12.106 ton pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun menjadi 8.024,94 ton pada tahun 2023. Produktivitas rata-rata ubi kayu meningkat dari 29,28 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 29,28 ton/ha pada tahun 2023. Produksi ubi jalar mengalami peningkatan dari 120 ton pada tahun 2019 menjadi 1.016 ton pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun menjadi 591,15 ton pada tahun 2023. Produktivitas rata-rata ubi jalar meningkat dari 30,15 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 30,15 ton/ha pada tahun 2023. Produksi kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023.

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi dan Palawija**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (ton)					Produktifitas Rata-rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Padi	67.993	78.719	30.440,73	28.779,19	38.927,98	343.824	382.843	146.140	161.638	201.335,63	5,05
2.	Jagung	15.004	28.119	22.177	24.195	16.477,35	116.031	241.376	189.636	208.010	142.693,85	8,47
3.	Ubi Kayu	188	378,90	301	315	260,66	3.511	7.077	11.562	12.106	8.024,94	29,28
4.	Ubi Jalar	10	2	29	32	15,70	120	24	928	1.016	591,15	30,15
5.	Kedelai	16	-	-	-	-	27	-	-	-	-	1,69
6.	Kacang Hijau	33	72,9	72,7	25,49	32,34	43	96,23	85	32,91	24,42	1,20
7.	Kacang Tanah	338	307,5	382	213,89	202,43	321	399,84	592	330	268,42	1,32

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

**Gambar 2.4.**  
**Pertumbuhan Produksi Padi dan Palawija (Ton) dan Luas Panen (Ha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023**

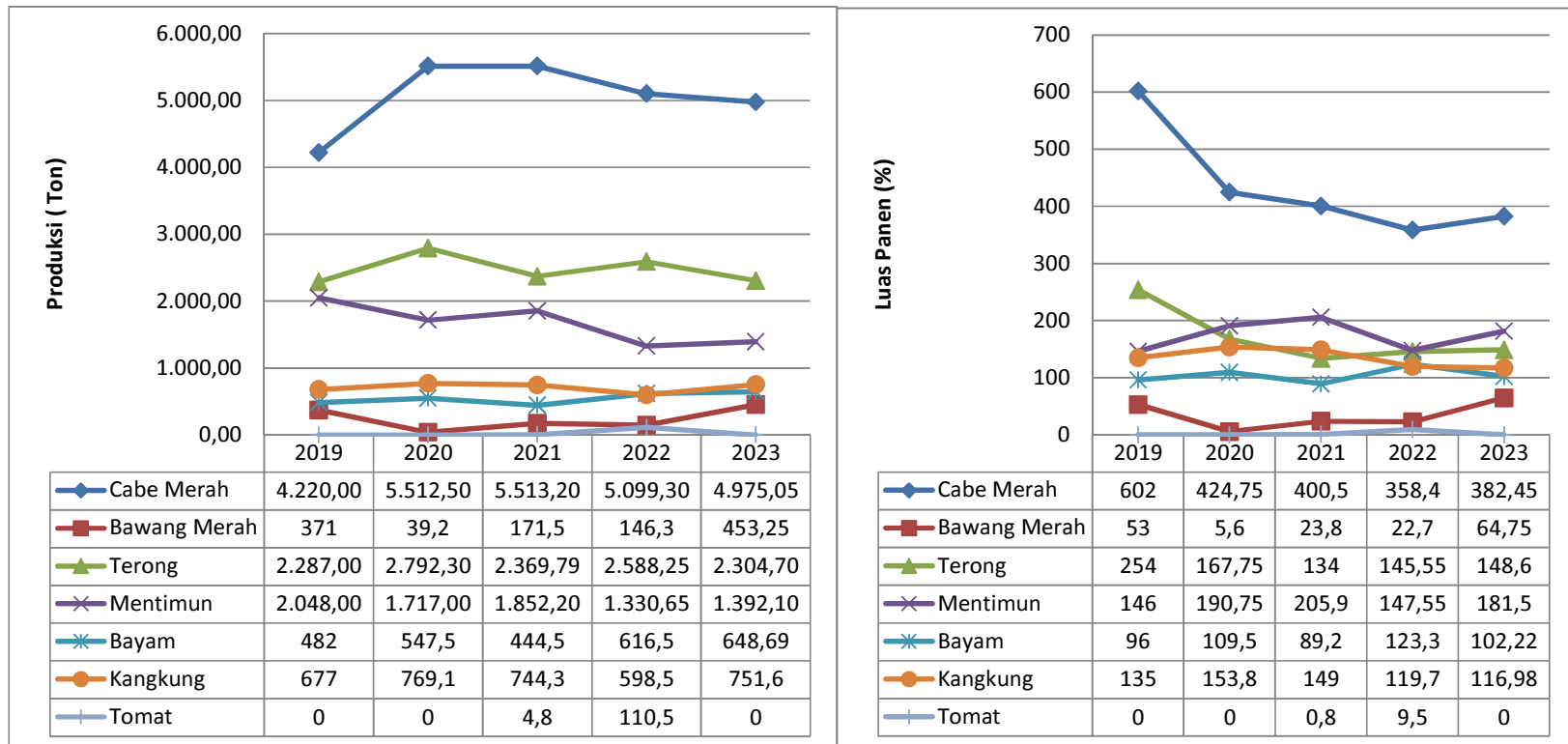


**Tabel 2.7.**  
**Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Sayuran di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (ton)					Produktifitas Rata-rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Cabe Merah	602	424,75	400,5	358,4	382,45	4.220,00	5.512,50	5.513,20	5.099,30	4.975,05	11,68
2.	Bawang Merah	53	5,6	23,8	22,7	64,75	371	39,2	171,5	146,3	453,25	6,95
3.	Terong	254	167,75	134	145,55	148,6	2.287,00	2.792,30	2.369,79	2.588,25	2.304,70	14,52
4.	Mentimun	146	190,75	205,9	147,55	181,5	2.048,00	1.717,00	1.852,20	1.330,65	1.392,10	9,57
5.	Bayam	96	109,5	89,2	123,3	102,22	482	547,5	444,5	616,5	648,69	5,27
6.	Kangkung	135	153,8	149	119,7	116,98	677	769,1	744,3	598,5	751,6	5,25
7.	Tomat	-	-	0,8	9,5	-	-	-	4,8	110,5	-	11,19

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

**Gambar 2.4.**  
**Pertumbuhan Produksi Sayuran (Ton) dan luas Panen (Ha) di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



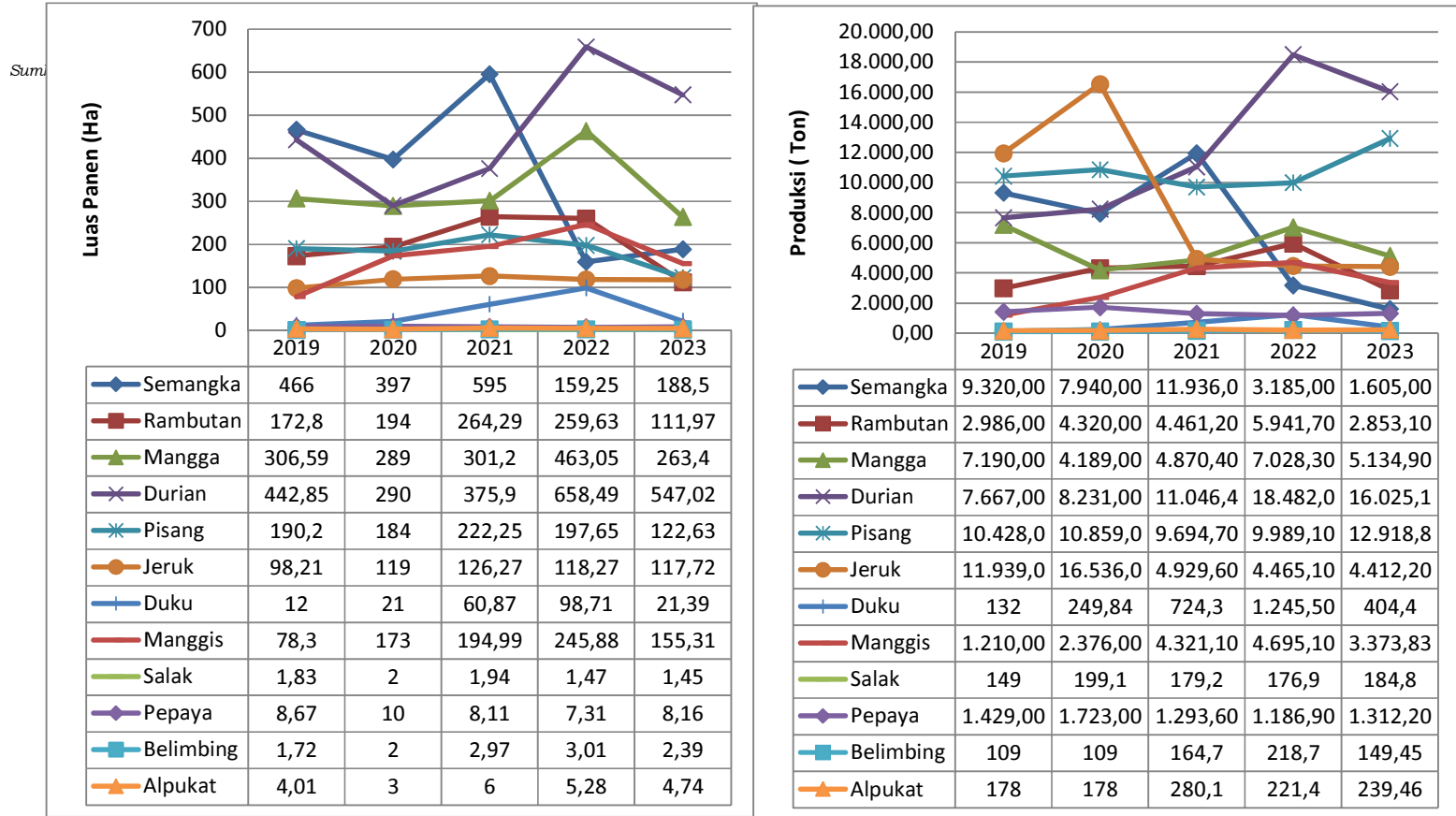
Sumber : Dinas Pertanian, 2024

**Tabel 2.8.**  
**Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Buah-Buahan**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen dan Produksi tahanan										Produktifitas Rata- rata  (Ton/Ha/tahun)
		2019		2020		2021		2022		2023		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	
1.	Semangka	466	9.320,00	397	7.940,00	595	11.936,00	159,25	3.185,00	188,5	1.605,00	12,04
2.	Rambutan	172,8	2.986,00	194	4.320,00	264,29	4.461,20	259,63	5.941,70	111,97	2.853,10	11,31
3.	Mangga	306,59	7.190,00	289	4.189,00	301,2	4.870,40	463,05	7.028,30	263,4	5.134,90	10,85
4.	Durian	442,85	7.667,00	290	8.231,00	375,9	11.046,40	658,49	18.482,00	547,02	16.025,10	15,03
5.	Pisang	190,2	10.428,00	184	10.859,00	222,25	9.694,70	197,65	9.989,10	122,63	12.918,80	31,5
6.	Jeruk	98,21	11.939,00	119	16.536,00	126,27	4.929,60	118,27	4.465,10	117,72	4.412,20	59,92
7.	Duku	12	132	21	249,84	60,87	724,3	98,71	1.245,50	21,39	404,4	7,04
8.	Manggis	78,3	1.210,00	173	2.376,00	194,99	4.321,10	245,88	4.695,10	155,31	3.373,83	10,31
9.	Salak	1,83	149	2	199,1	1,94	179,2	1,47	176,9	1,45	184,8	54,67
10.	Pepaya	8,67	1.429,00	10	1.723,00	8,11	1.293,60	7,31	1.186,90	8,16	1.312,20	99,33
11.	Belimbing	1,72	109	2	109	2,97	164,7	3,01	218,7	2,39	149,45	34,67
12.	Alpukat	4,01	178	3	178	6	280,1	5,28	221,4	4,74	239,46	30,09

Sumber data : Dinas Pertanian, 2024

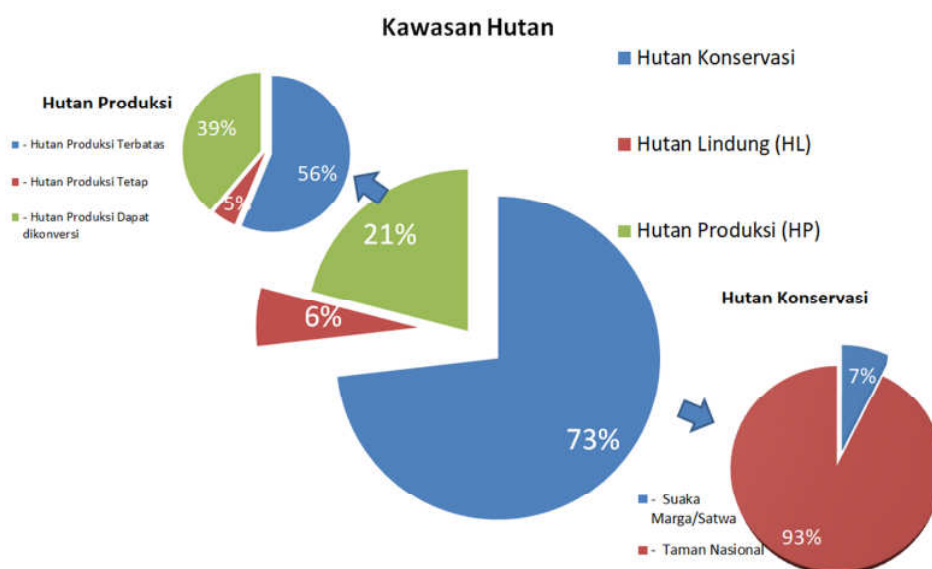
**Gambar 2.5.**  
**Pertumbuhan Produksi Buah-Buahan (Ton)**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



## b. Kehutanan

Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar terdiri dari hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sebagian besar kawasan di Pesisir Selatan terdiri dari hutan (sekitar 63,08 persen). Sebagian besar kawasan hutan di Pesisir Selatan merupakan hutan suaka alam wisata. Selain itu, Pesisir Selatan juga memiliki hutan lindung dan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi dapat dikonversi)

**Gambar 2.6.**  
**Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**



**Tabel 2.10.**  
**Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

No	Jenis Kawasan	Luas Area (Ha)
1.	Hutan Konservasi	279.951,92
	- Suaka Marga/Satwa	20.600,14
	- Taman Nasional	259.351,78
2.	Hutan Lindung (HL)	22.196,39
3.	Hutan Produksi (HP)	80.321,98
	- Hutan Produksi Terbatas	45.249,41
	- Hutan Produksi Tetap	3.937,92
	- Hutan Produksi Dapat dikonversi	31.134,65
Jumlah		382.470,29

### **c. Kawasan Pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil**

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai sekitar 234 km yang membentang dari Nagari Sungai Pinang di Kecamatan Koto XI Tarusan (berbatasan dengan Kota Padang) sampai dengan Nagari Sambungo di Kecamatan Silaut (berbatas dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu). Dari 15 kecamatan di Pesisir Selatan, 12 diantaranya merupakan kecamatan yang memiliki wilayah pesisir pantai. Tiga kecamatan yang tidak memiliki kawasan pesisir yaitu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Lunang. Selain itu, Pesisir Selatan juga memiliki potensi pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa wilayah pantai kecamatan sebanyak 53 buah pulau. Potensi alam di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil memberikan banyak manfaat bagi masyarakat karena sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber kegiatan ekonomi seperti untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya laut, pembibitan ikan, jasa pariwisata bahari serta sebagai kawasan konservasi alam berupa hutan mangrove dan terumbu karang.

### **d. Potensi Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor andalan Kabupaten Pesisir Selatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa besarnya potensi perlu dikelola dengan lebih baik lagi. Beragam potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, seperti wisata alam, budaya, lingkungan dan hasil buatan manusia (*event*) perlu dikembangkan guna menunjang dan meningkatkan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dipandang sebagai satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah,

menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan, dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan diantaranya dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Pesisir Selatan dikaruniai dengan keindahan alam yang menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak obyek yaitu: Kawasan Carocok, Kawasan Mandeh, Kawasan Jembatan Akar, Kawasan Bayang Sani dan Lokasi lokasi sepanjang pesisir pantai. Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya: meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti event-event nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana/atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel berskala bintang 4 ke atas, membangun Mal/pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata-wisata khusus malam hari, selanjutnya mengembangkan UMK yang menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/ swasta perlu dilakukan. Untuk lama tinggal wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 yaitu dari 2,5 hari menjadi 4 hari, sedangkan untuk wisatawan mancanegara dari 1,25 hari menjadi 2 hari. Meningkatnya lama tinggal wisata ini tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir. Perkembangan

Kinerja Urusan Pariwisata selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.11.**  
**Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kunjungan Wisata (orang)	2.481.464	2.069.513	344.247	944.664	944.664
	- Wisatawan Mancanegara (orang)	1.623	3.650	0	124	124
	- Wisatawan Nusantara (orang)	2.479.841	2.065.863	344.247	944.540	944.540
2.	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	- Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,5	2	0	1,25	1,25
	- Wisatawan Nusantara (Hari)	2,5	4	0	1,25	1,25
3.	PAD Sektor Pariwisata (juta Rupiah)	1.326.902	1.070.597	1.188.373.957	3.139.875.323	3.139.875.323
4.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangaan	124,89	93,15	-100	124	124
5.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	83,53	84,75	94	174,4	174,4
6.	Tingkat Hunian Akomodasi	7,4	7,5	15	15,96	15,96
7.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	n/a	n/a	n/a	1,272	1,272

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

**Tabel 2.12.**  
**Jumlah Daya Tarik Wisata pada Setiap Destinasi Utama Pariwisata**  
**Kabupaten (DUPK)**

No	Wilayah Destinasi	Daya Tarik Wisata			
		Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Hasil Buatan Manusia	Wisata Lingkungan
1.	DUPK Carocok dan Sekitarnya	21	1	2	-
2.	DUPK Mandeh dan Sekitarnya	15	4	2	-
3.	DUPK Pasir Putih dan	6	2	-	-
5.	DUPK Rumah Mande Rubiah & Sekitarnya	2	3	-	1

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025

Pada wilayah DUPK Carocok dan sekitarnya terdapat destinasi seperti Pulau Cingkuak, Pulau Karabak, Pulau Kasiak, Air Terjun Timbulun, Pantai Carorok Painan, Puncak Langkisau, Pantai Salido, Benteng Peninggalan Portugis, Makam Madame Van Kempen, Event Festival Langkisau dan beberapa atraksi wisata, seperti banana boat, jet

ski dan lain- lain. di wilayah DUPK Mandeh dan sekitarnya terdapat destinasi yang sudah banyak dikenal masyarakat seperti Pulau Cubadak (Kawasan Mandeh), Pulau Sironjong Ketek, Pulau Sirinjong Gadang, Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar dan lain-lain. Di wilayah DUPK Pasir Putih dan sekitarnya terdapat beberapa destinasi yang menarik masyarakat untuk berwisata seperti Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang, Air Terjun Sei Liku, Air Terjun Palangai Gadang, Pulau Beringin, Pulau Gosong, Rumah Percetakan Uang, dan lain- lain. Sedangkan di wilayah DUPK Rumah Gadang Mande Rubiah dan sekitarnya terdapat destinasi, diantaranya: Rumah Gadang Mande Rubiah, Istana Inderapura, Makam Bundo Kandung, Makam Cindua Mato, Taman Nasional Kerinci Seblat. Garis pantai dan pulau- pulau kecil merupakan wisata bahari yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Dari empat DUPK yang ada, DUPK Carocok dan sekitar sudah mulai tumbuh wisata bahari atau event-event bahari seperti memancing, diving, snorkling dan event bahari lainnya, namun pada DUPK lainnya masih belum berkembang.

#### **2.2.6. Demografi**

Isu kependudukan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) atau bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan dibawah 50 artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Pada saat itu jelas penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif dan sekarang Kabupaten Pesisir Selatan menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu untuk dapat dijadikan momentum dalam mencapai pembangunan lebih cepat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan konsep tersebut dan

berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah sebesar 525.355 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 264.292 jiwa (50,31 %) dan perempuan sebanyak 261.063 jiwa (49,69 %). Kondisi ini setara dengan 9,22 % dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbanyak, setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam.

Selanjutnya Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 bila berdasarkan jumlah sebaran penduduk, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.607 jiwa setara dengan 12,11 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.549 jiwa, atau setara dengan 1,63 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat secara lengkap pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7.  
 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan  
 Menurut Jenis Kelamin  
 Tahun 2019-2023



Sumber data: "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2024

**Tabel 2.13.**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019 – 2021**

NO.	KECAMATAN	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Silaut	7.929	7.407	15.336	8.024	7.568	15.592	8.139	7.705	15.844	8.282	7.870	16.152	8.500	8.171	16.671
2.	Lunang	11.206	10.741	21.947	11.415	11.008	22.423	11.579	11.207	22.786	11.782	11.446	23.228	11.960	11.657	23.617
3.	Basa Ampek Balai Tapan	7.849	7.798	15.647	7.766	7.721	15.487	7.867	7.815	15.682	7.995	7.935	15.930	8.169	8.155	16.324
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	7.878	7.601	15.479	7.930	7.569	15.499	8.033	7.661	15.694	8.164	7.779	15.943	8.286	7.881	16.167
5.	Pancung Soal	13.206	12.835	26.041	13.444	13.126	26.570	13.610	13.307	26.917	13.821	13.534	27.355	13.847	13.672	27.519
6.	Airpura	9.309	8.879	18.188	9.293	8.887	18.180	9.407	9.010	18.417	9.553	9.165	18.718	9.958	9.538	19.496
7.	Linggo Sari Baganti	25.251	24.611	49.862	24.842	24.327	49.169	25.067	24.551	49.618	25.373	24.858	50.231	25.737	25.290	51.027
8.	Ranah Pesisir	17.079	17.187	34.266	16.745	17.015	33.760	16.853	17.101	33.954	17.016	17.241	34.257	17.216	17.466	34.682
9.	Lengayang	31.463	31.089	62.552	30.702	30.292	60.994	31.083	30.570	61.653	31.569	30.946	62.515	32.130	31.477	63.607
10.	Sutera	28.874	28.316	57.190	28.249	27.842	56.091	28.633	28.233	56.866	29.114	28.722	57.836	29.663	29.362	59.025
11.	Batang Kapas	18.807	18.789	37.596	18.197	18.225	36.422	18.401	18.413	36.814	18.667	18.662	37.329	18.975	19.007	37.982
12.	IV Jurai	26.006	25.740	51.746	25.543	25.351	50.894	25.810	25.606	51.416	26.162	25.948	52.110	26.573	26.421	52.994
13.	Bayang	21.618	21.728	43.346	20.967	21.214	42.181	21.181	21.341	42.522	21.464	21.539	43.003	21.796	21.842	43.638
14.	IV Nagari Bayang Utara	4.302	4.379	8.681	4.107	4.179	8.286	4.147	4.199	8.346	4.200	4.232	8.432	4.263	4.286	8.549
15.	Koto XI Tarusan	27.136	26.712	53.848	26.630	26.240	52.870	26.750	26.339	53.089	26.956	26.523	53.479	27.219	26.838	54.057
KABUPATEN PESISIR SELATAN		257.913	253.812	511.725	253.854	250.564	504.418	256.560	253.058	509.618	260.118	256.400	516.518	264.292	261.063	525.355

Sumber: Badan Pusat Statistik-Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020-2022

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan pola yang tidak sama. Tabel 2.14 menampilkan Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 dan periode 2020-2023 yang mengalami kenaikan di hampir semua kecamatan dengan kenaikan yang cenderung hampir sama.

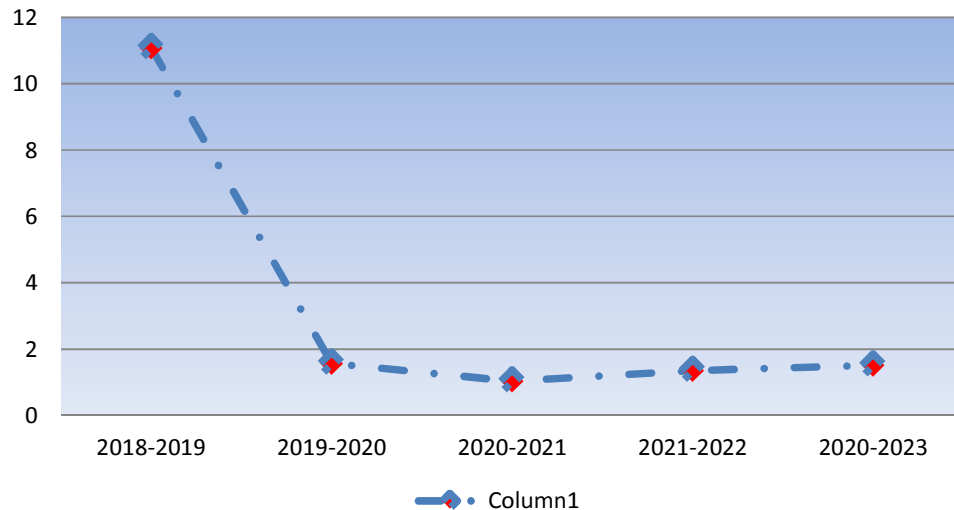
Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Airpura dan Kecamatan Silaut adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto XI Tarusan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 2.14.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2018-2023**

NO	KECAMATAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)				
		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2020-2023
1	Silaut	-1,33	2,48	1,62	1,94	2,40
2	Lunang	-0,17	1,96	1,62	1,94	1,89
3	Basa Ampek Balai Tapan	12,26	1,99	1,26	1,58	1,92
4	Rahul Tapan	0,19	1,64	1,26	1,59	1,56
5	Pancung Soal	-3,49	1,39	1,31	1,63	1,32
6	Airpura	11,56	2,58	1,30	1,63	2,51
7	Linggo Sari Baganti	9,53	1,46	0,91	1,24	1,39
8	Ranah Pesisir	13,14	1,12	0,57	0,89	1,05
9	Lengayang	18,84	1,63	1,08	1,40	1,56
10	Sutera	11,92	1,93	1,38	1,71	1,86
11	Batang Kapas	19,30	1,63	1,08	1,40	1,55
12	IV Jurai	10,36	1,58	1,03	1,35	1,50
13	Bayang	18,04	1,36	0,81	1,13	1,29
14	IV Nagari Bayang Utara	19,49	1,27	0,72	1,03	1,19
15	Koto XI Tarusan	10,89	0,96	0,41	0,73	0,89
<b>Total</b>		<b>11,08</b>	<b>1,57</b>	<b>1,03</b>	<b>1,35</b>	<b>1,51</b>

Sumber data: "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2024"

**Gambar 2.8.**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Pesisir Selatan**



Sumber data: "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2024"

### 2.3. Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi dalam suatu Kabupaten adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam Kabupaten yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten yang mana didalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output.

Struktur Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi antara lain:

#### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

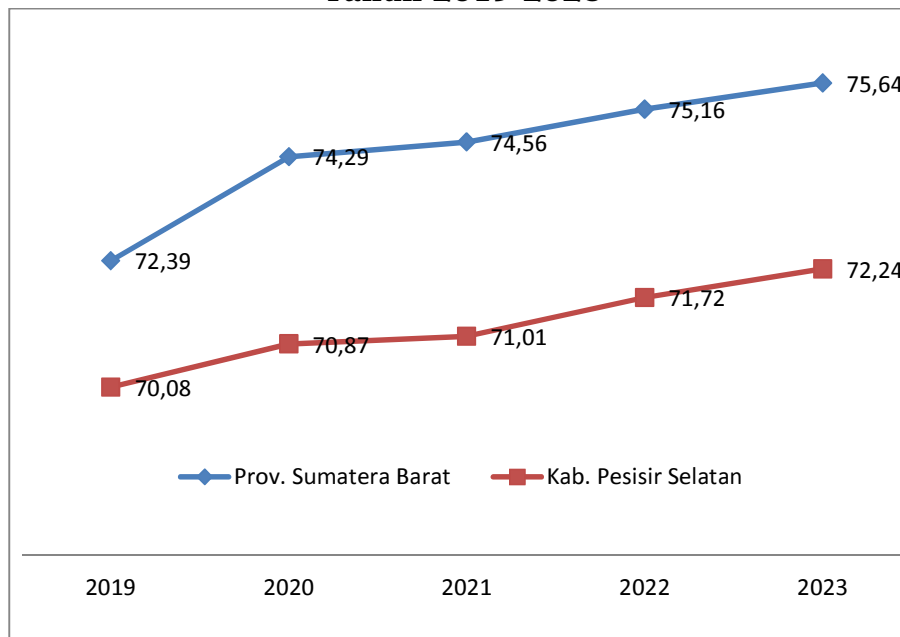
Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai inti dari pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU), namun yang dihitung

adalah gap nya dari nilai seratus. Sehingga jika IPM meningkat, maka proporsi nilai DAU yang disumbangkan oleh IPM menjadi menurun.

Capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Peningkatan kinerja IPM tertinggi terdapat pada tahun 2023, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin. Namun apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi, rata-rata capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan masih berada dibawah propinsi. Artinya banyak Kabupaten/Kota yang memiliki capaian IPM yang lebih baik sehingga berkontribusi terhadap capaian IPM Propinsi.

Peningkatan ini konsisten dengan peningkatan indikator penyusun IPM seperti usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Dari semua indikator tersebut, pengeluaran per kapita dan harapan lama sekolah merupakan pendorong utama peningkatan IPM Pesisir Selatan secara keseluruhan.

**Gambar 2.9.**  
**Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Indikator IPM**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,73	73,02	73,12	73,20	73,27
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,25	8,26	8,27	8,43	8,58
Pengeluaran (Rupiah /orang/tahun)	9.444	9.212	9.270	9.686	9.953

Sumber data: "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2024"

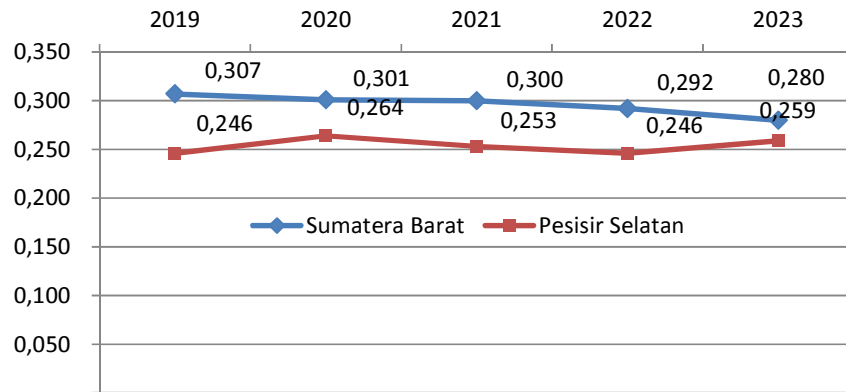
### **b. Ketimpangan**

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara. Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*Inclusive Economics Growth*). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh pemerataan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan merupakan masalah utama dalam pembangunan. Gini rasio merupakan salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah,  $0,30 < G < 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2019-2023 angka Indeks Gini di Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik dibandingkan dengan propinsi Sumatera Barat. Meskipun gini rasio berfluktuatif namun tidak signifikan, tetapi selama periode diatas, capaian gini rasio selalu berada diatas capaian propinsi. Artinya pendapatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu tersebut dikatakan merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah, Angka Indeks Gini rasio Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 meningkat dari 0,246 menjadi 0,259 pada tahun 2023, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.10.**  
**Grafik Perkembangan Indeks Gini**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

### c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

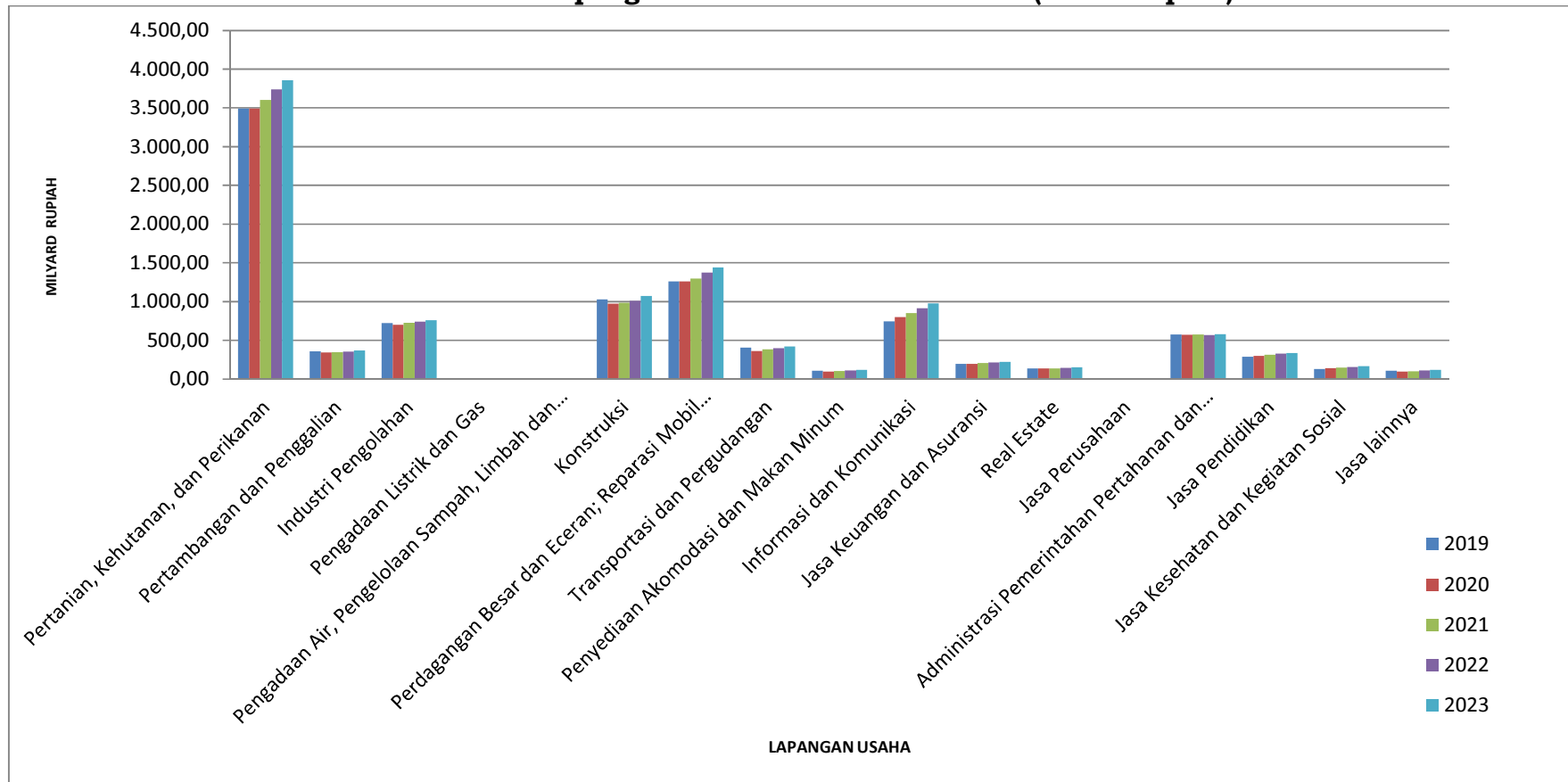
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan kapasitas produktif, kesempatan kerja, daya beli, dan peran pemerintah terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Selain itu, juga perlu memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Sustainable Economics Growth). Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dapat dijaga melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana. Perkembangan PDRB merupakan ukuran yang digunakan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pesisir Selatan Tahun 2022 mencapai 10.181,47 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 4 persen tahun 2023 menjadi 10.608,29 miliar rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya.

Dinamika perekonomian Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode lima tahun terakhir (2019-2023).

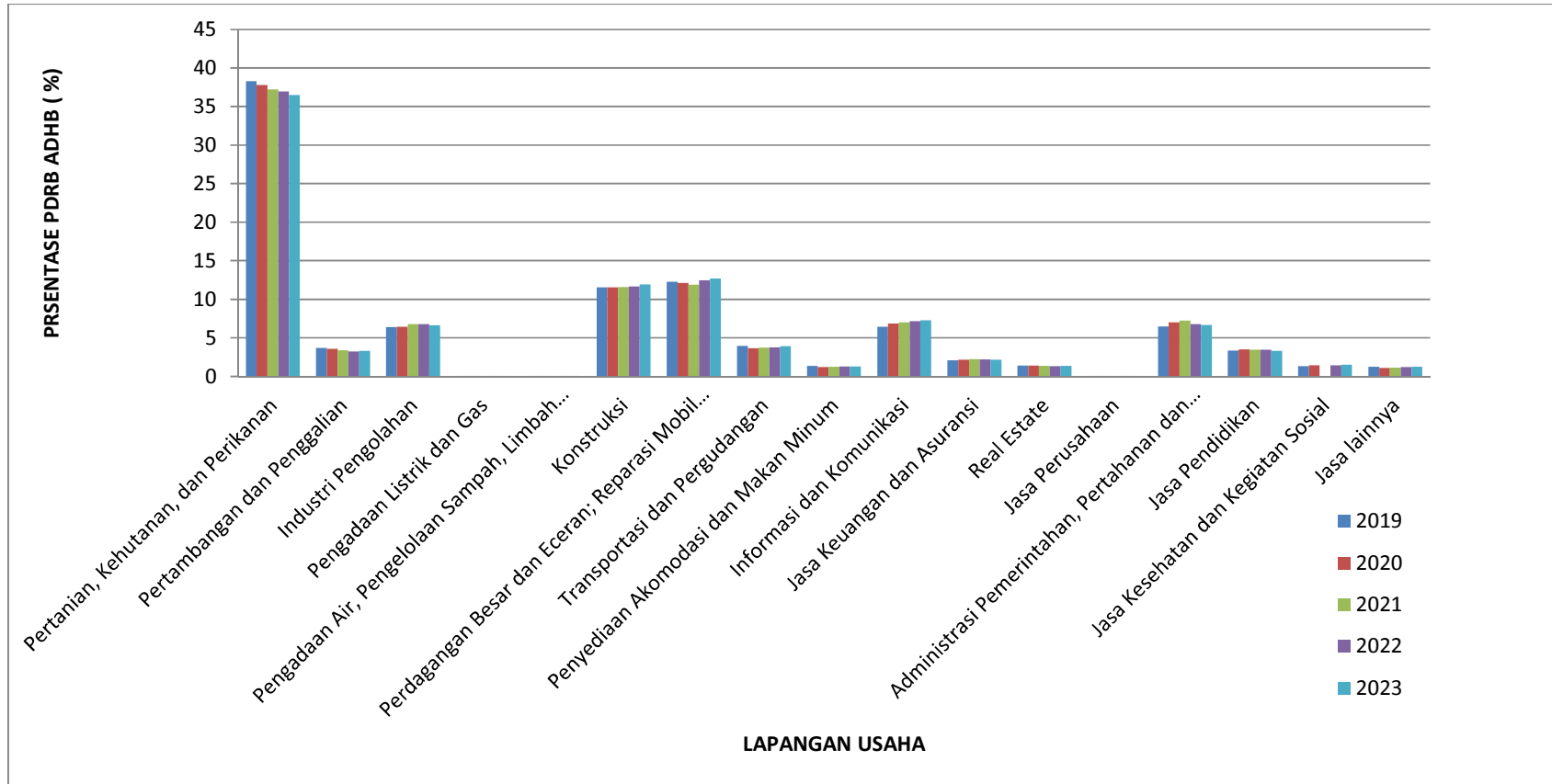
Sedangkan Struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; Informasi dan komunikasi; Industri Pengolahan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

**Gambar 2.11.**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

**Gambar 2.12.**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persen)**



Sumber data: "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2024"

Pada tahun 2023 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 36,49 persen. Capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 36,95 persen. Pada urutan kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi sebesar 12,68 persen. Selanjutnya 11,92 persen berasal dari lapangan usaha konstruksi, dari lapangan usaha sektor Informasi dan komunikasi sebesar 7,26 persen dan 6,64 persen berasal dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Disisi lain apabila ditinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, dan net ekspor barang dan jasa (X-M).

Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2019-2023. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 52,57 %.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2019-

2023, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2019 sebesar 30,31 menurun menjadi 29,16 tahun 2023.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi pun mengalami kecenderungan penurunan dalam periode 2019-2023. Tahun 2023 komponen ini sebesar 9,13 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,37. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Nilai komponen net ekspor barang dan jasa secara umum di Pesisir Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2020-2023 sebesar 2 poin setiap tahunnya. Kenaikkan ini menjadi motivasi bagi daerah dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat memiliki kualitas untuk diekspor, secara lebih rinci semua komponen PDRB menurut pengeluaran sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.16.**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023**

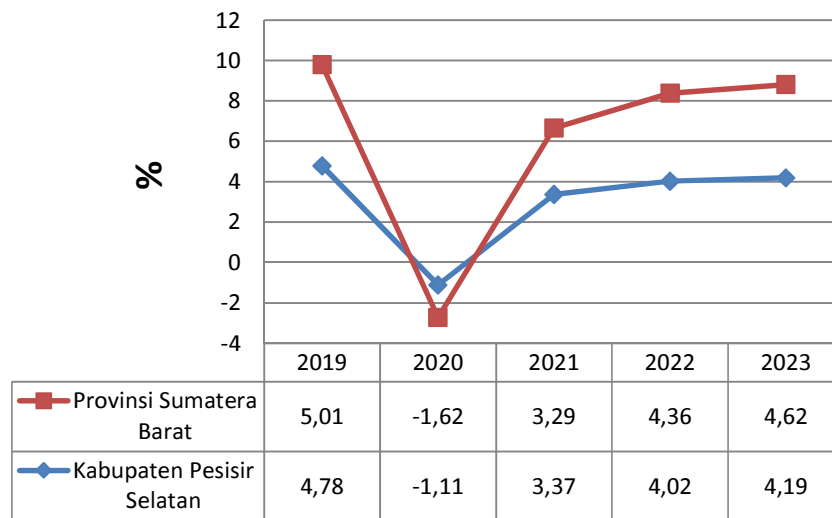
<b>Komponen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,35	52,72	52,01	51,81	50,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,28	11,37	10,92	9,86	9,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,31	29,69	29,34	28,57	29,16
Perubahan Inventori	0,03	0,12	0,27	0,39	-0,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	0,71	4,97	6,35	8,33	10,26
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"*

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dan rata-rata capaian berada di

bawah propinsi. Namun di saat masa Covid 19 tahun 2020, meskipun terjadi pertumbuhan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tetapi capaian ini berada diatas capaian propinsi. Tahun 2023 meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan tetapi capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yakni sebesar 4,19 persen sementara provinsi Sumatera Barat mencapai 4,62 persen sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafik dibawah ini.

**Gambar 2.13.**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

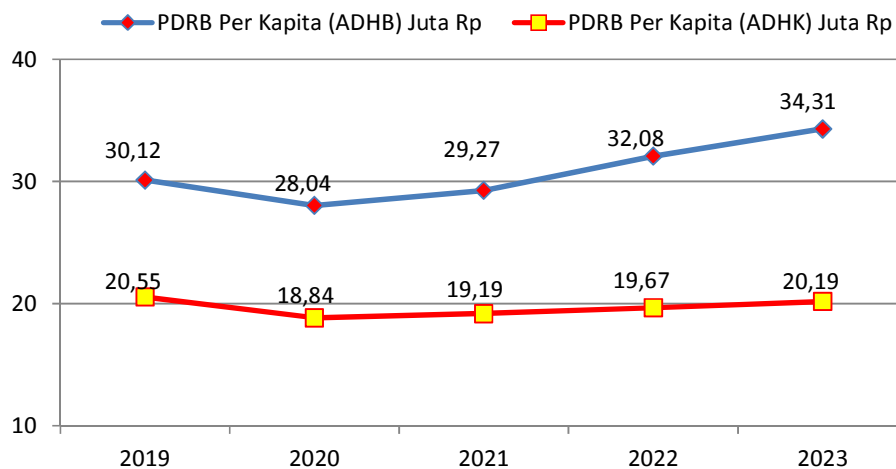
#### **d. PDRB Per kapita**

PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun parameter ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Selatan relatif membaik selama tahun 2020 – 2023. Kenaikan PDRB per kapita meski tren positif namun tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan bahwa kenaikan PDRB diikuti juga dengan kenaikan jumlah penduduk di

Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. PDRB Per Kapita berdasarkan Harga Berlaku lebih besar nilainya dibandingkan dengan berdasarkan harga konstan. Demikian ini disebabkan dalam Harga Berlaku termasuk faktor harga yang mempengaruhinya. Berdasarkan harga berlaku perkembangan PDRB Per kapita tahun 2020 meningkat dari 30,12 juta rupiah menjadi 34,31 juta rupiah di tahun 2023. Sedangkan ditinjau dari harga konstan nilai PDRB Perkapita juga meningkat dari tahun 2020 sebesar 18,84 juta rupiah menjadi 20,19 juta rupiah pada tahun 2023. Selengkapnya perkembangan PDRB perkapita digambarkan dalam grafik berikut ini:

**Gambar 2.14.**  
**Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita**  
**Kabupaten Pesisir Selatan (juta Rp)**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik “Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024”

### 2.3 Analisis Determinan Kemiskinan

Analisis modus intervensi terhadap determinasi kemiskinan berdasarkan 5 (lima) bidang prioritas yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan.

### **2.3.1 Bidang Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

Pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Derajat pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah melakukan evaluasi terhadap kemajuan pendidikan. Kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dianalisa berdasarkan indikator bidang pendidikan yaitu: (1) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA, (5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, (7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, (8) Angka Melek Huruf usia 15 tahun

ke atas, (9) Angka Putus Sekolah SD/MI, (10) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, (11) Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Indikator Bidang Pendidikan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	APK PAUD	53,93	62,30	59,37	58,64	59,80
2	APK SD/MI	113,14	111,64	113,45	112,91	109,76
3	APK SMP/MTs	84,82	84,78	86,13	80,69	91,25
4	APK SMA/MA	100,90	101,45	101,29	101,19	84,31
5	APM SD/MI	99,29	99,43	99,07	99,55	99,42
6	APM SMP/MTs	79,22	78,85	80,12	79,95	80,73
7	APM SMA/MA	74,40	75,27	75,69	74,49	65,03
8	Angka Melek Huruf 15 Tahun+	99,39	99,16	99,24	98,71	99,65
9	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,17	0,01	0,24	0,20	0,20
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1,63	0,02	0,13	1,40	1,35
11	Angka Putus Sekolah SMA/MA	0,77	0,20	0,30	0,38	2,46

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### **A. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

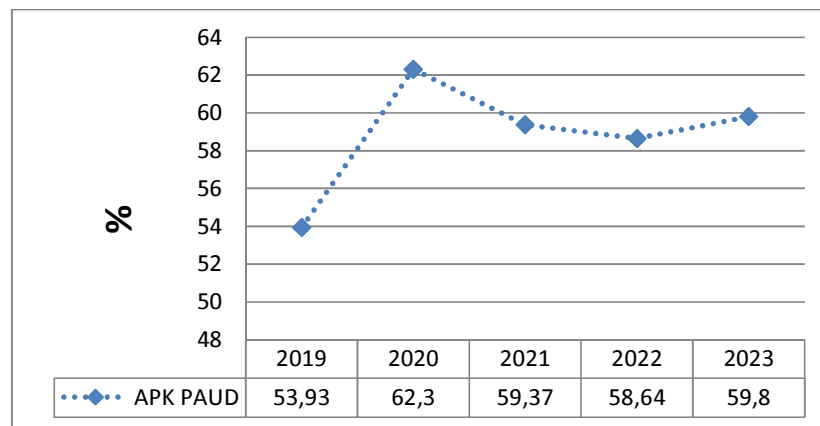
#### **A.1. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu menentukan penduduk usia sekolah dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase. APK PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tiga tahun terakhir

mengalami penurunan. Tahun 2020 merupakan pencapaian APK PAUD paling tinggi yaitu sebesar 62,30 persen dari sebelumnya 53,93 persen tahun 2019. Akan tetapi mulai menurun hingga tahun 2023 menjadi 59,80 persen. Kondisi ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan usia dini sangat penting, karena di masa *golden age* ini pondasi bagi anak untuk mempersiapkan dirinya menghadapi masa sekolah dan masa depan. Perkembangan partisipasi PAUD dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.15.**

**Perkembangan APK PAUD (%) Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

**A.2.1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI**

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 113,14 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada anak sekolah SD/MI yang berumur kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Pada tahun 2023, APK SD/MI ini turun menjadi 109,76 persen. Turunnya APK SD/MI ini dapat dipahami terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menerima anak pertama masuk SD/MI pada umur 7 tahun (umur kurang dari 6,5 tahun tidak diterima masuk SD/MI).

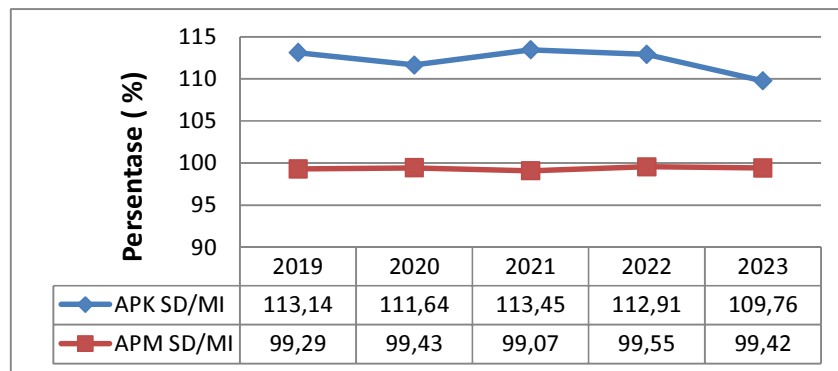
### A.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Berdasarkan tingkat pendidikan, APM terbagi dalam tiga kelompok umur, yaitu APM SD/MI (siswa usia 7-12 tahun), APM SMP/MTs (siswa usia 13-15 tahun) dan APM SMA/MA (siswa usia 16-18 tahun).

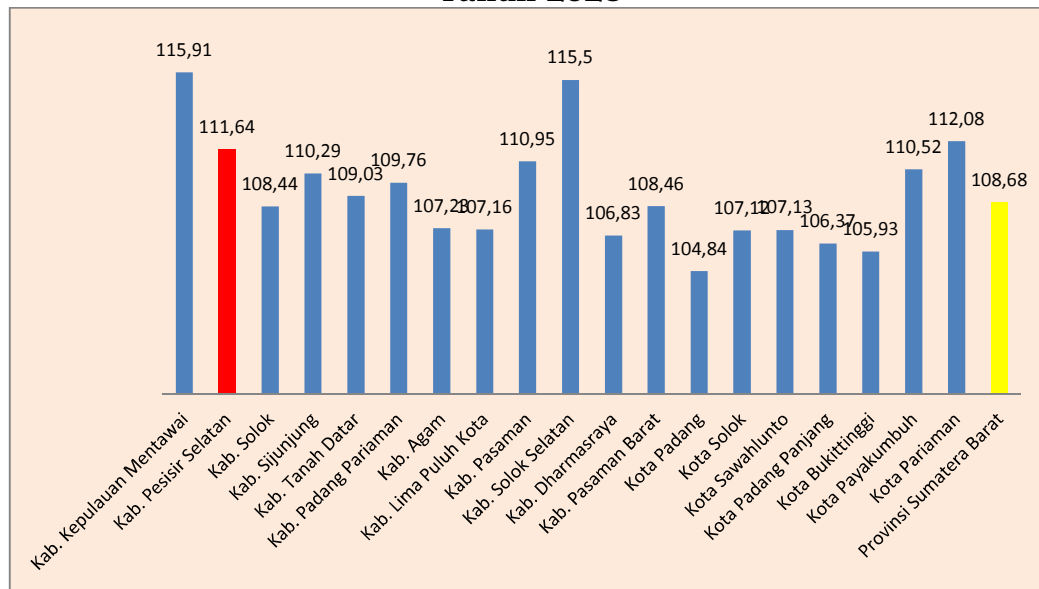
Posisi relatif APK SD/MI Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 109,76 persen berada di atas APK SD/MI Provinsi Sumatera Barat (108,03 persen) dan di atas Nasional (105,62 persen). APK SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah Nasional yaitu Kota Padang (104,58 persen). APK SD/MI tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan (114,05 persen) dan APK SD/MI yang terendah adalah Kota Padang (104,58 persen). APK SD/MI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 109,76 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada anak yang berumur kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI.

**Gambar 2.15.**

#### **Perkembangan APK dan APM SD/MI di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 - 2023**

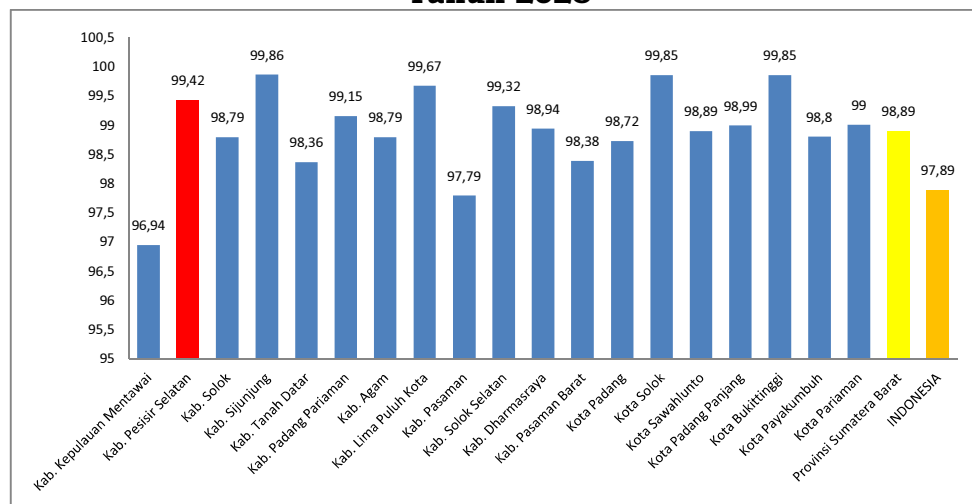


**Gambar 2.16.**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

**Gambar 2.17**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2023**



### A.3.1. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

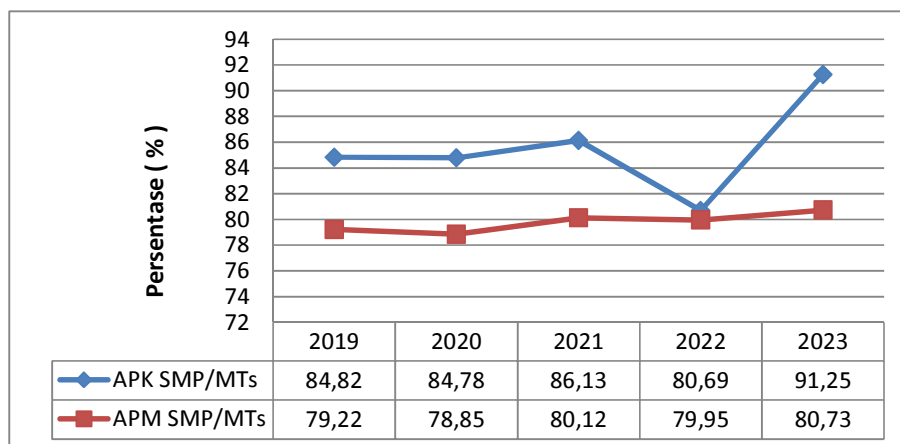
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 84,82 persen. Kondisi ini berarti bahwa ada anak usia 13 – 15 tahun yang tidak sekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs. Pada tahun 2023, APK SMP/MTs adanya peningkatan menjadi 91,25 persen. Meningkatnya APK SMP/MTs ini dapat dipahami terkait dengan upaya pemerintah untuk mewajibkan pendidikan anak belajar 9 tahun.

### A.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Pada tahun 2019 APM SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan adalah 79,22 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa 79,22 dari 100 siswa yang berumur 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs. Perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami peningkatan yaitu 79,22 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,73 persen pada tahun 2023 yang merupakan capaian terbaik selama lima tahun terakhir.

**Gambar 2.17.**

**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023**

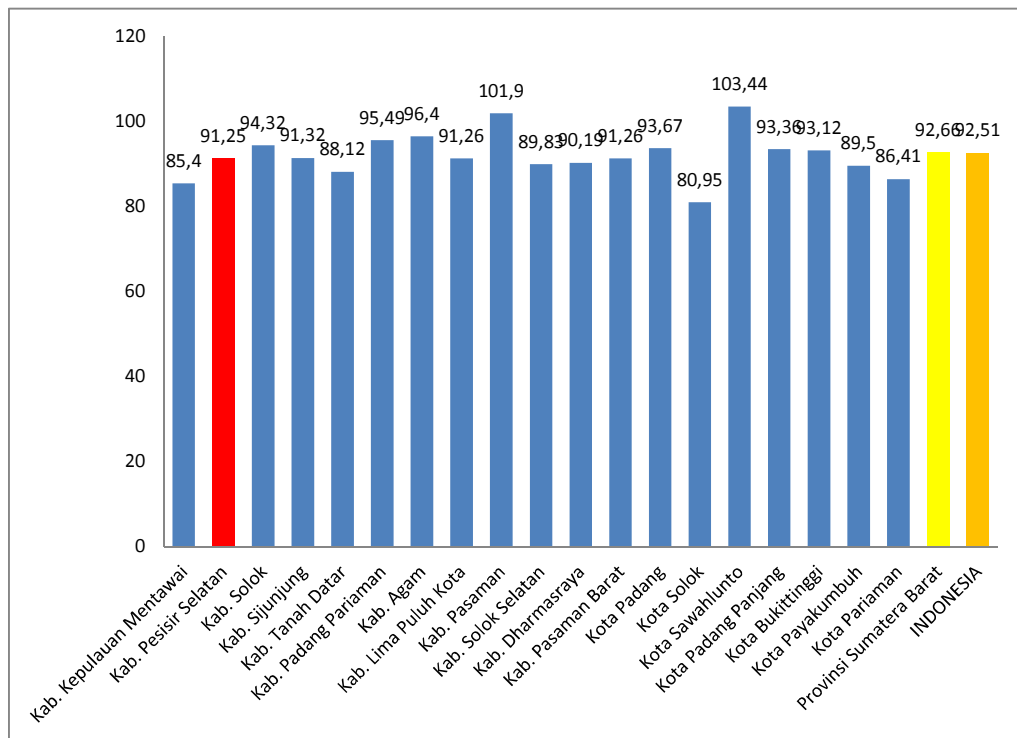


Sumber : Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka" 2024

Posisi relatif APM SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 80,73 persen berada di atas APM SMP/MTs Provinsi

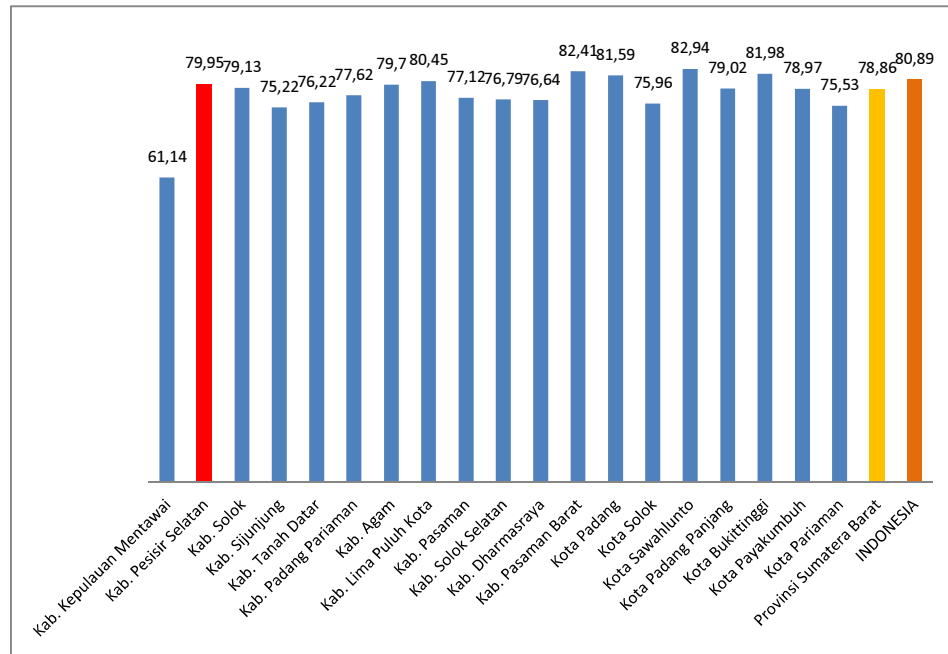
Sumatera Barat (80,22 persen) dan berada di bawah Nasional (81,35 persen). APM SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah Nasional yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai (67,69 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (80,73 persen), Kabupaten Solok (79,85 persen), Kabupaten Tanah Datar (78,60 persen), Kabupaten Padang Pariaman (78,22 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (80,08 persen), Kabupaten Dharmasraya (76,47 persen), Kota Padang (80,55 persen), Kota Solok (77,36 persen), Kota Padang Panjang (80,40 persen), Kota Payakumbuh (80,01 persen), dan Kota Pariaman (78,50 persen). APK SMP/MTs yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Sawahlunto (84,69 persen) dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (67,69 persen). APM SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 80,73 persen berarti masih ada sebesar 19,27 persen anak usia 13 – 15 tahun yang tidak sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs.

**Gambar 2.18.**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

**Gambar 2.19.**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Posisi relatif APK SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebesar 84,82 persen berada di bawah APK SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat (92,66 persen) dan di bawah Nasional (92,51 persen). APK SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada dibawah Nasional yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai (85,40 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (91,25 persen), Kabupaten Sijunjung (91,32 persen), Kabupaten Tanah Datar (88,12 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (91,26 persen), Kabupaten Solok Selatan (89,83 persen), Kabupaten Dharmasraya (90,19 persen), Kabupaten Pasaman Barat (91,26 persen), Kota Solok (80,95 persen), Kota Payakumbuh (89,50 persen) dan Kota Pariaman (86,41 persen). APK SMP/MTs tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Sawahlunto (103,44 persen) dan terendah adalah Kota Solok (80,95 persen). APK SMP/MTs Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 91,25 persen

menunjukkan bahwa ada anak usia 13 – 15 tahun yang tidak sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs.

#### **A.4.1. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA**

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMA/MA pada tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100,90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada anak sekolah SMA/MA yang berumur kurang atau lebih dari 16 – 18 tahun. Pada tahun 2023, APK SMA/MA menurun menjadi 84,31 persen.

Posisi relatif APK SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 84,31 persen berada di bawah APK SMA/MA Provinsi Sumatera Barat (92,00 persen) dan di bawah Nasional (86,34 persen). APK SMA/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah Nasional yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai (77,79 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (84,31 persen), Kabupaten Solok (85,57 persen), Kabupaten Sijunjung (85,35 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (85,86 persen), Kabupaten Pasaman (83,78 persen), Kabupaten Solok Selatan (83,37 persen). APK SMA/MA tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Pariaman (114,29 persen) dan APK SMA/MA yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (77,79 persen). APK SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan 84,31 persen menunjukkan bahwa ada anak usia 16 – 18 tahun yang tidak sekolah pada tingkat pendidikan SMA/MA.

#### **A.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA**

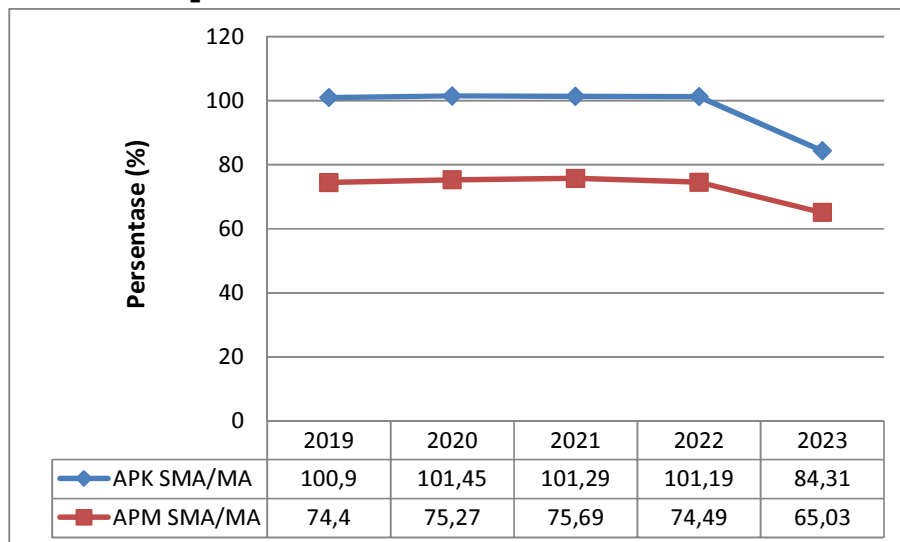
Pada tahun 2019 APM SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan adalah 74,40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa 74,40 dari 100 siswa yang berumur 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA. Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 – 2022 sedikit mengalami peningkatan yaitu 74,40 persen pada tahun 2019 menjadi 74,49 pada tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2023 jauh mengalami penurunan yaitu 65,03 persen. Capaian terbaik

untuk APM SMA/MA di Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir adalah tahun 2021 sebesar 75,69 persen.

Posisi relatif APM SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 65,03 persen berada di bawah APK SMA/MA Provinsi Sumatera Barat (69,18 persen) dan di atas Nasional (62,53 persen). APK SMA/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah Nasional yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai (56,74 persen), Kabupaten Sijunjung (59,47 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (58,84 persen), Kabupaten Solok Selatan (61,46 persen) dan Kabupaten Dharmasraya (57,07 persen). APK SMA/MA tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Pariaman (84,41 persen) dan terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (56,74 persen). APK SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 65,03 persen berarti bahwa ada anak usia 16 – 18 tahun yang tidak sekolah pada tingkat pendidikan SMA/MA sebesar 34,97 persen.

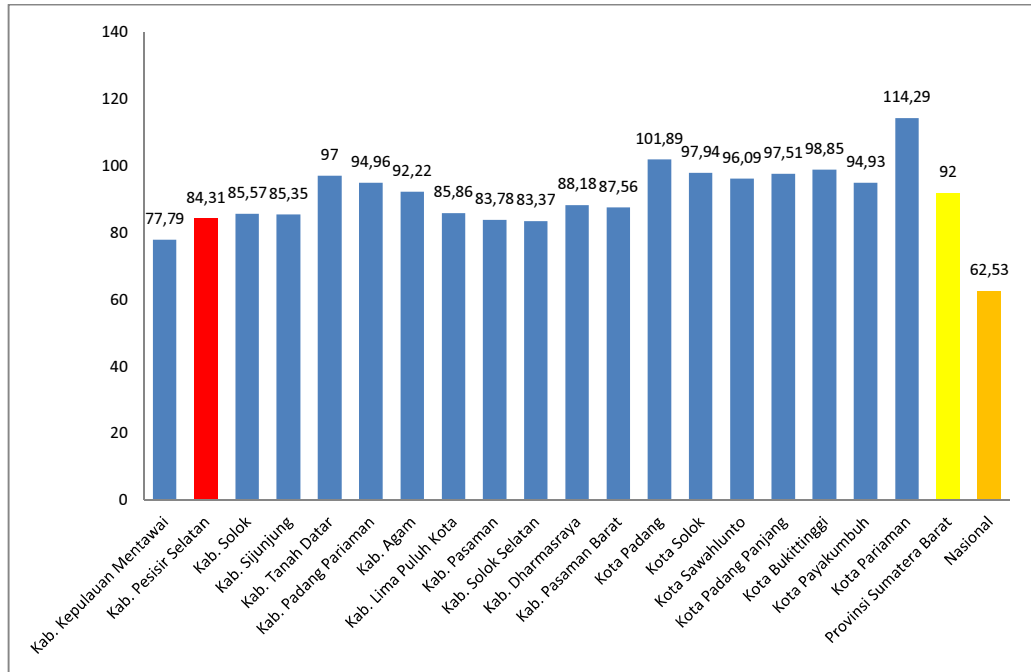
**Gambar 2.20.**

**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMA/MA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023**



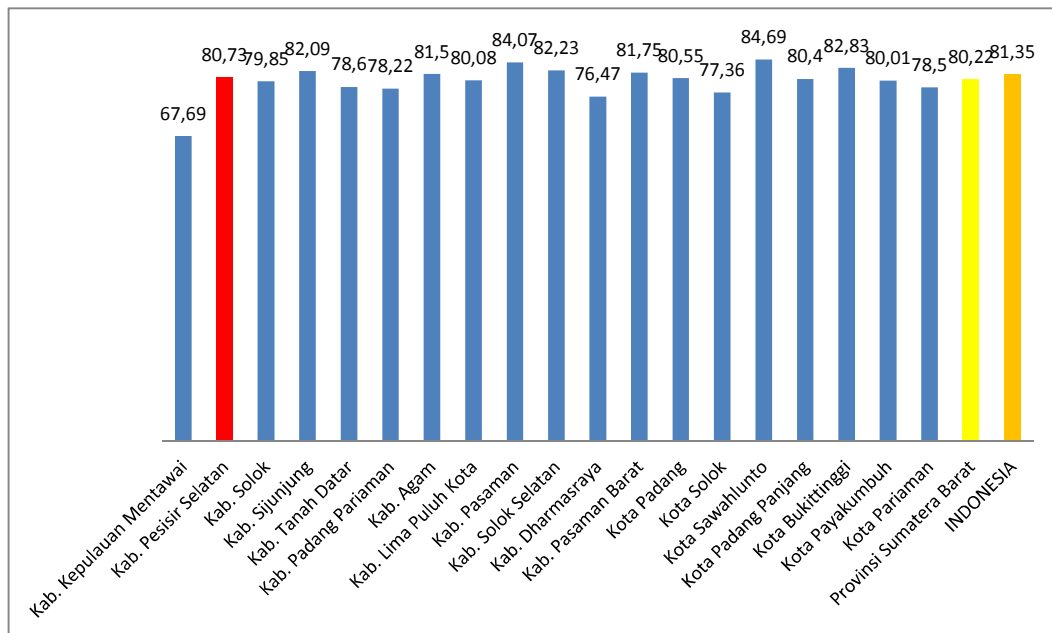
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

**Gambar 2.21.**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

**Gambar 2.22.**  
**Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

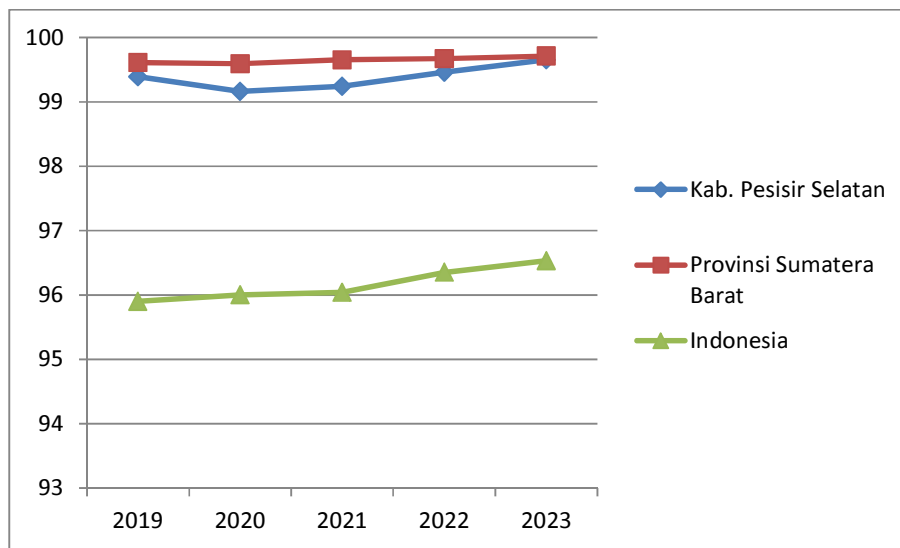


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebesar 99,39 persen dan menurun tahun 2020 menjadi 99,16 persen. Namun tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 99,24 dan terus meningkat menjadi 99,46 persen tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 99,65 persen tahun 2023 sekaligus merupakan capaian yang paling tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rentang waktu 2019-2023.

**Gambar 2.23.**  
**Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

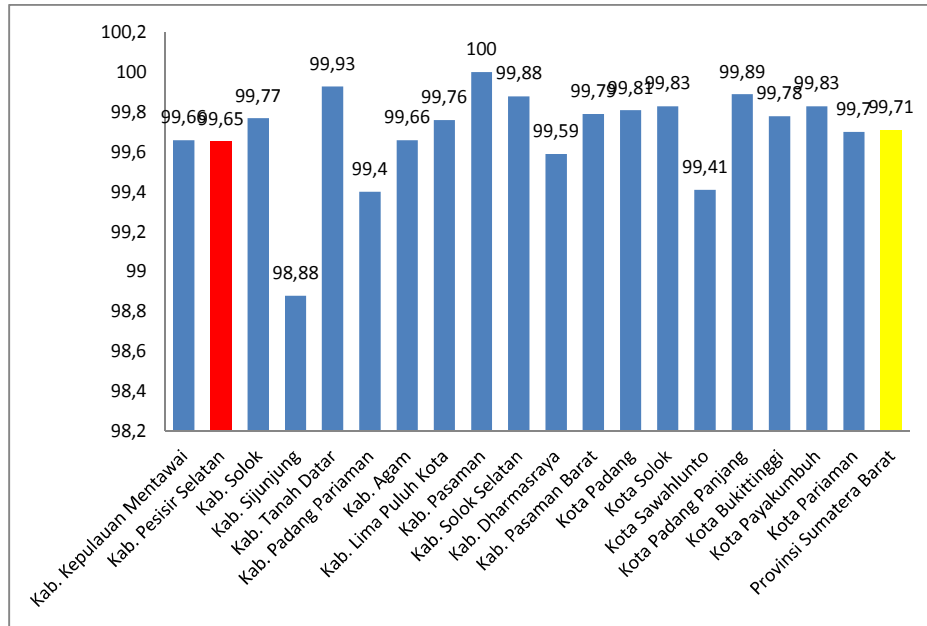


Sumber: Perkembangan Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 ( Bab 2)

Angka Melek Huruf Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 99,65 persen berada di bawah Angka melek huruf Provinsi Sumatera Barat (99,71 persen) dan di atas Nasional (96,53 persen). Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat seluruhnya berada di atas Angka Melek Huruf Nasional. Angka Melek Huruf tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman

(100,00 persen) dan yang terendah adalah Kabupaten Sijunjung (98,88 persen). Angka Melek Huruf Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 99,65 persen menunjukkan bahwa masih ada yang buta huruf pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebesar 0,35 persen.

**Gambar 2.24**  
**Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

### **b. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, kelompok umur 13 - 15 tahun, dan kelompok umur 16 - 18 tahun. Hal ini juga merupakan salah satu indikator dari berhasil atau tidaknya pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan atau pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

### d.1. Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun

Angka Putus Sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 – 2023 cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan tahun 2020 menjadi 0,01 persen, angka putus sekolah Pesisir Selatan menunjukkan trend yang buruk seperti yang ditunjukkan Gambar 2.25. Terjadi peningkatan angka putus sekolah Usia 7-12 Tahun pada tahun 2024 sebesar 0,24 persen. Capaian terbaik angka putus sekolah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada tahun 2020 (0,01 persen), sedangkan capaian terburuk angka putus sekolah usia 7-12 tahun terjadi pada tahun 2021 (0,24 persen).

**Gambar 2.25.**  
**Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

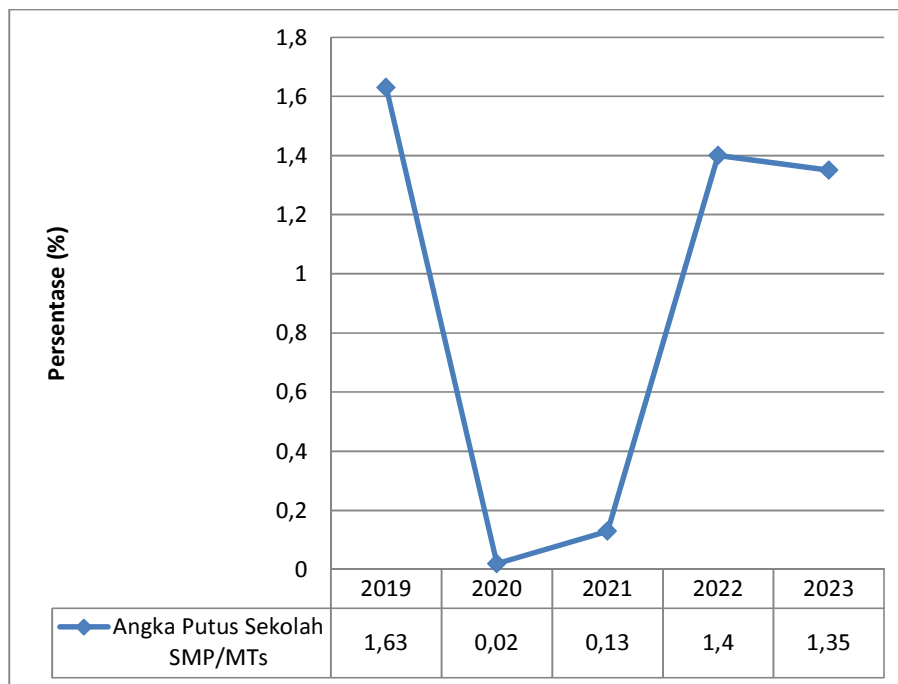


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### d.2. Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun

Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 – 2023 cenderung menurun. Angka Putus Sekolah usia 13 – 15 tahun tertinggi terjadi pada tahun 2019 (1,63 persen), sedangkan capaian terbaik dimana angka Angka Putus Sekolah usia 13 – 15 terendah terjadi pada tahun 2020 (0,02 persen).

**Gambar 2.27.**  
**Angka Putus Sekolah Usia 13-15 Tahun**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



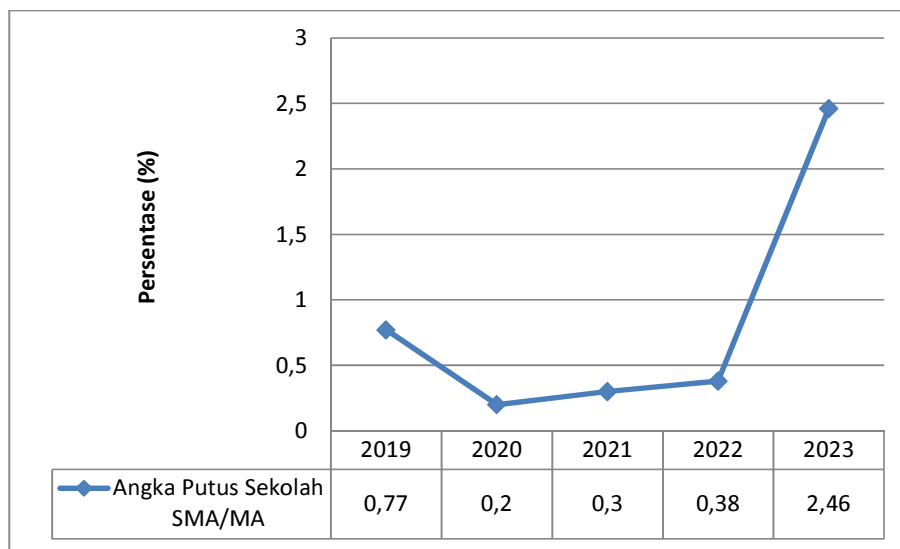
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### d.3. Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun

Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 sebesar 0,77 persen dan menurun menjadi 0,20 persen tahun 2020, namun meningkat lagi tahun 2021 menjadi 0,30

persen, tahun 2022 sebesar 0,38 persen dan meningkat tajam menjadi 2,46 persen tahun 2023. Capaian terbaik angka putus sekolah usia 16-18 Tahun berada pada tahun 2020 sebesar 0,20 persen dan capaian terburuk pada tahun 2023 meningkat tajam menjadi 2,46 persen.

**Gambar 2.28.**  
**Angka Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### 2.3.2. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau maupun di tingkat daerah. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh

kesinambungan antar upaya program yang dilaksanakan dan sektor lain yang terkait, serta kesinambungan dengan upaya program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah dan merata.

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan urusan kesehatan mencakup empat sub urusan yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmasi, Alat kesehatan, dan makan minum, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat di lihat dari kejadian kematian seperti perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Usia Harapan Hidup (UHH).

**Tabel 2.18.**  
**Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usia Harapan Hidup	70,73	70,86	70,96	71,25	71,52
2.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,068	5,51	6,4	0,4	0,4*
3.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,5	7,29	6,4	3,9	3,9*
4.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	9/1000 KH	7,47/1000 KH	8/1000 KH	9/1000 KH	11/1000 KH
5.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	9/1000 KH	7,5/1000 KH	8/1000 KH	10/1000 KH	12/1000 KH
6.	Angka Kematian Neo Natal per 1000 Kelahiran Hidup	8/100.000 KH	5,48/100.000 KH	4,6/1000 KH	6/1000 KH	7,5/1000 KH
7.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	66/100.000 KH	105/100.000 KH	172/100.000 KH	144/100.000 KH	138/100.000 KH
8.	Rasio Pos Yandu Per Satuan Balita	1 : 67	1 : 53	1 : 64	1 : 63	1 : 63*
9.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,25	0,20	0,02	0,04	0,04*
10.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0086	0,0079	0,00063	0,00081	0,000766
11.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,116	0,095	0,022	0,011	0,011*
12.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,23	0,206	0,028	0,024	0,024*
13.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	102,99	107,13	128,7	132	132*
14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,1	89,90	88,8	91,5	91,5*
15.	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	86	73	49	65,9	84,1
16.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100*

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
17.	Persentase anak usia 1 Tahun yang diimunisasi campak	90	85	62,6	98	98*
18.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	10,02	5,01	2,1	6	6*
19.	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	79,53 %	52,49 %	30,7	49	49*
20.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	37,04	14,25	63,8	82	82*
21.	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	260	157,15	178	264	264*
22.	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	3	3,9	3,9	4,7	4,7*
23.	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	79,9	48,64	61,5	73,7	73,7*
24.	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	N/a	83,59	95,1	94,1	94,1*
25.	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
26.	Penderita Diare yang ditangani (%)	126	84,70	69,3	99	99*
27.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,006	0,006	n/a	0,007	0,007*
28.	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90	85	85	78	78*
29.	Cakupan Kunjungan Bayi	104,2	105,7	87,85	107,6	107,6*
30.	Cakupan Puskesmas	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3*
31.	Cakupan Pembantu Puskesmas	43,41	43,96	43,96	54,1	54,1*
32.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	88,7	84,8	85,3	88,7	88,7*
33.	Cakupan Pelayanan Nifas	90,5	86,2	78,3	91,4	91,4*

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75,7	85,0	50,18	38,9	38,9*
35.	Cakupan Pelayanan anak balita	65,7	72,3	77,52	90,22	90,22*
36.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	94,3	84,2	93,2	96,1	96,1*
37.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	85	90	100	100*
38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100 %	100	100	100	100*
39.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100*
40.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	0,054	0,06	0,07	0,07*
41.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	n/a	66,67	66,67	75	75*
42.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	n/a	84,75	85,23	100	100
43.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	n/a	84,75	85,76	100	100
44.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	n/a	84,75	89,73	100	100
45.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	n/a	72,26	82,37	100	100
46.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	n/a	84,21	19,46	100	100
47.	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	n/a	21,18	24,51	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
48.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas yang mendapat skrining Kesehatan sesuai standar	n/a	70,75	52,04	100	100
49.	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	n/a	24,52	23,07	100	100
50.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	n/a	87,67	56,65	100	100
51.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar	n/a	97,65	92,15	100	100
52.	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	n/a	121,7	63,80	63,80	63,80*
53.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	n/a	24,70	72,67	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

#### a. Angka Kematian Ibu (AKI)

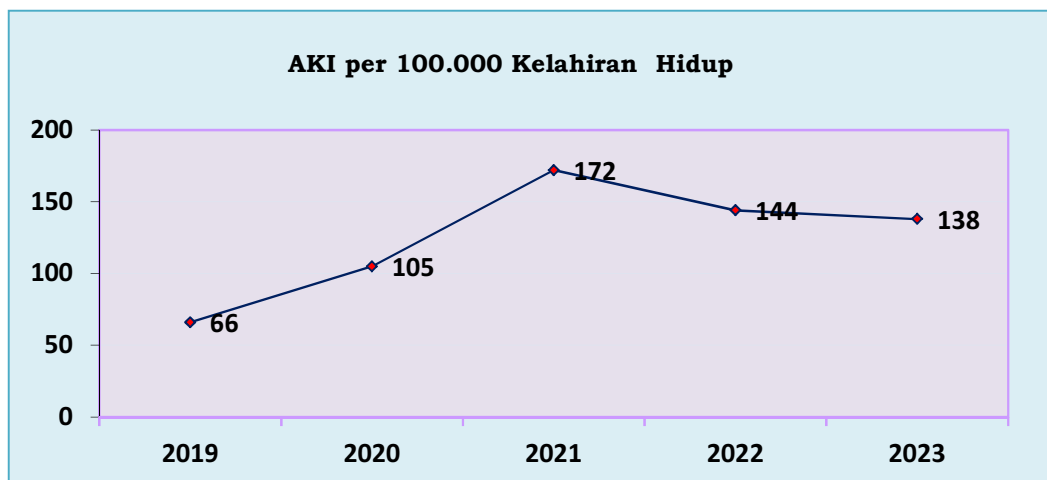
Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian ibu adalah Angka yang menunjukkan: kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga.

Angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 172 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 turun lagi menjadi 138 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan Kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan karena pendaraan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan Sistem Peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mame, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) angka kematian ibu maksimal yang ditetapkan 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai Tahun 2030, maka pencapaian AKI Kabupaten Pesisir selatan harus mendapatkan perhatian dalam pelayanan kesehatan Ibu karena angkanya melebihi dari target SDGs.

**Gambar 2.29.**  
**Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**

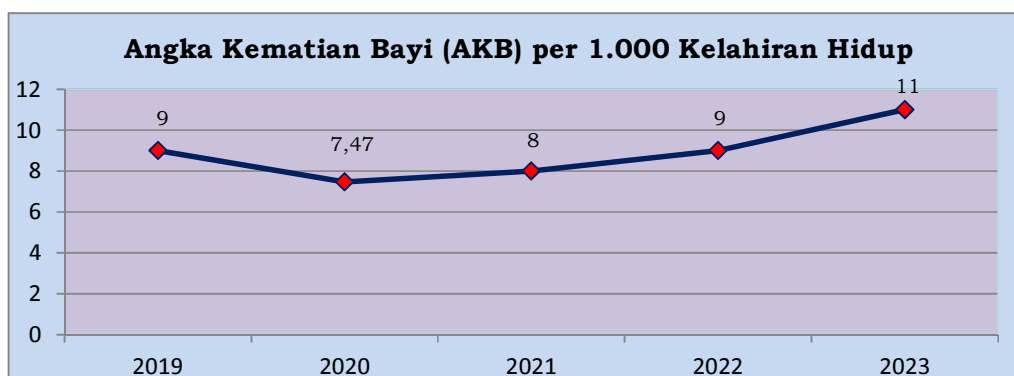


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

## b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

**Gambar 2.30.**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



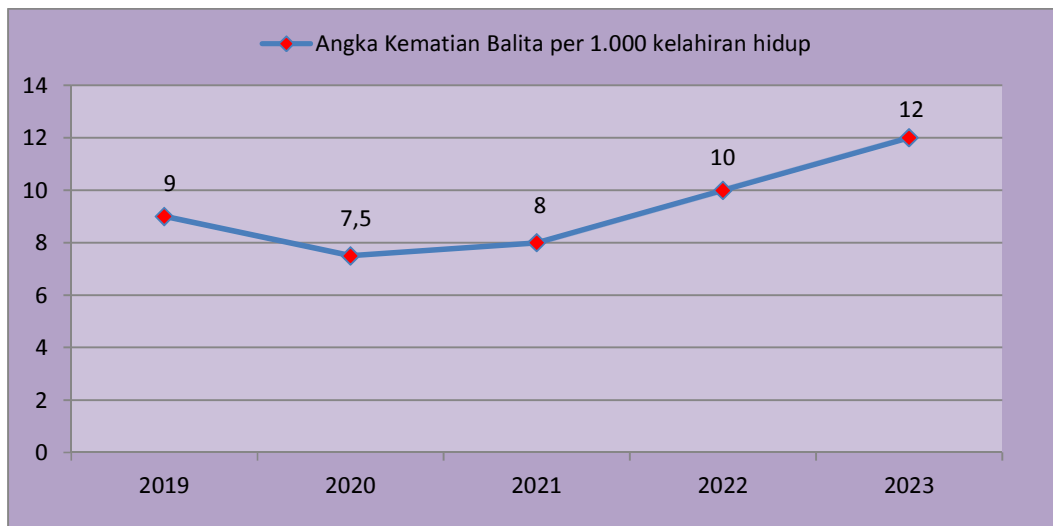
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dilihat dari gambar diatas bahwa angka kematian Bayi di Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan oleh faktor ibu hamil yang terlalu muda atau sudah terlalu tua, dekatnya jarak kelahiran, faktor banyak anak dalam keluarga juga sangat mempengaruhi, dan juga di picu kehamilan yang tidak normal, karena pada tahun 2023 terjadi kelahiran sebanyak 259 orang dengan berat bayi lahir rendah maka untuk tahun berikutnya dilakukan pemanfaatan kader posyandu dalam pemeriksaan kesehatan ibu hamil pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

### c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian anak 0 – 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi dan anak balita). Menggabungkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan.

**Gambar 2.31.**  
**Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



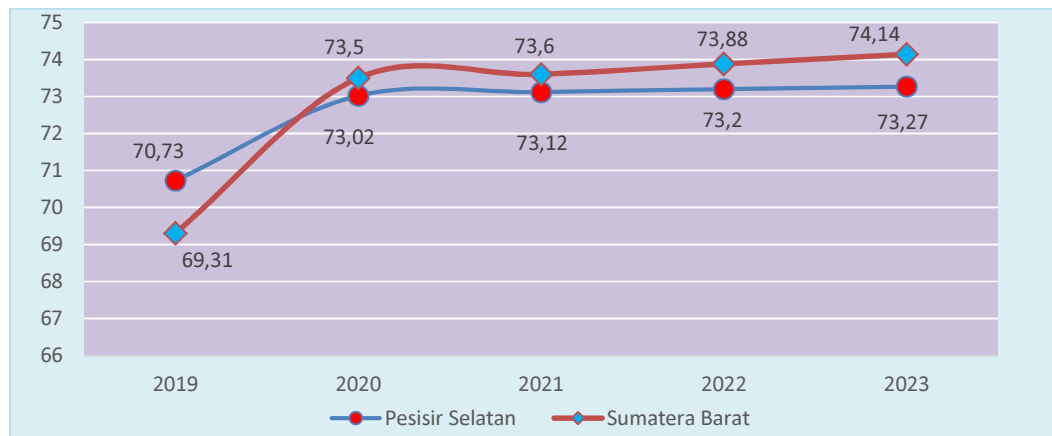
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Di Kabupaten Pesisir Selatan angka kematian balita pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. dan tidak melebihi dari target SDGs maksimal 25 per 1,000 kelahiran hidup. Maka pada dasarnya capaian indikator AKABA Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan masih dibawah ambang batas.

#### d. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Pesisir Selatan dapat dilihat salah satunya dari capaian Umur Harapan Hidup (UHH). Rata-rata umur harapan hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 tercatat 70,73 tahun, meningkat menjadi 73,27 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan UHH propinsi Sumatera Barat, capaian UHH Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir relatif baik dan walaupun masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan Umur Harapan Hidup sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

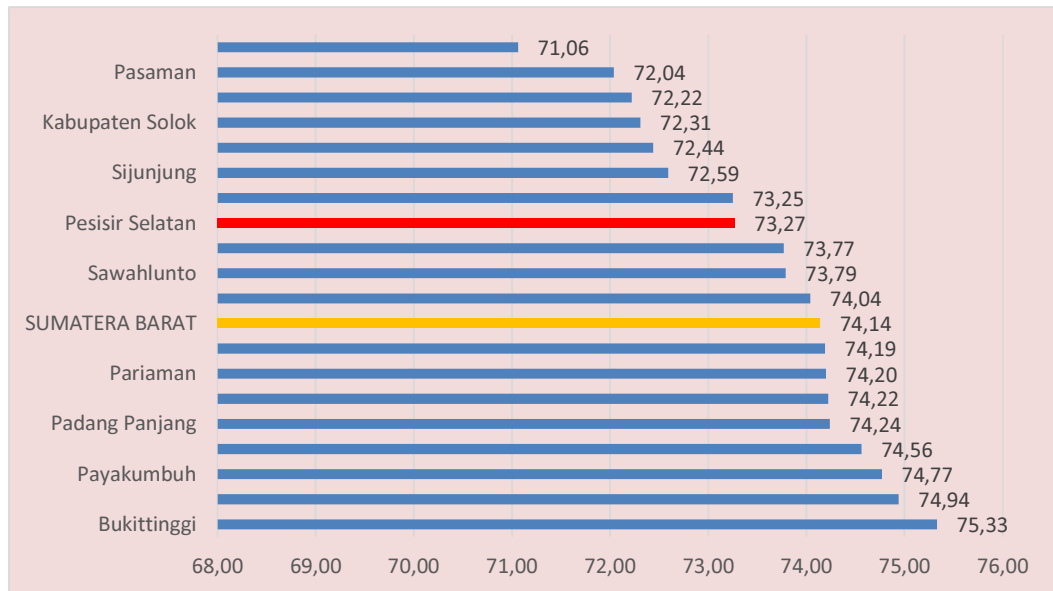
**Gambar 2.32.**  
**Perkembangan Umur Harapan Hidup**  
**Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024"

Secara posisi relatif UHH Kabupaten Pesisir Selatan berada pada peringkat Keberhasilan pembangunan kesehatan di Pesisir Selatan dapat dilihat salah satunya dari capaian Umur Harapan Hidup (UHH). Rata-rata umur harapan hidup Kabupaten Pesisir berada pada peringkat 12 (dua belas) dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

**Gambar 2.33.**  
**Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



Sumber Data: BPS "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024"

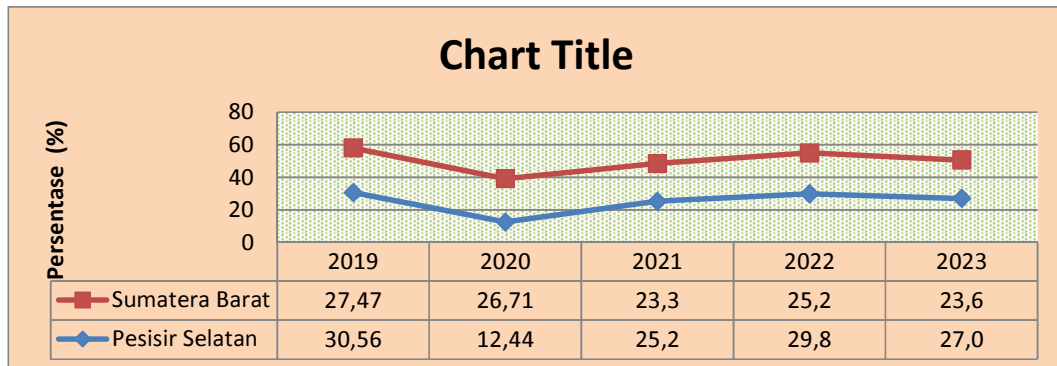
### e. Stunting

Menurut buku yang berjudul Pencegahan Stunting Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan, WHO mendefinisikan stunting sebagai kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, penyakit infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak kuat. Anak yang mengalami stunting, terutama pada usia dini kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya, termasuk otak.

Pada Tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah, selain isu stunting merupakan salah satu prioritas nasional (*major project*) dalam RPJMN 2016-2024 (cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir). Capaian penurunan Prevalensi stunting Kabupaten Pesisir

Selatan lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian penurunan stunting propinsi. Tahun 2020 angka stunting Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 11,8 % lebih rendah dari capaian propinsi 14,29 %. Hal yang sama terlihat apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata kabupaten, capaian Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan dengan capaian rata-rata Kabupaten sebesar 16,14 %. Capaian baik ini tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menangani program dan kegiatan yang terkait dengan stunting.

**Gambar 2.34.**  
**Perbandingan Angka Stunting**  
**Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019 - 2023**

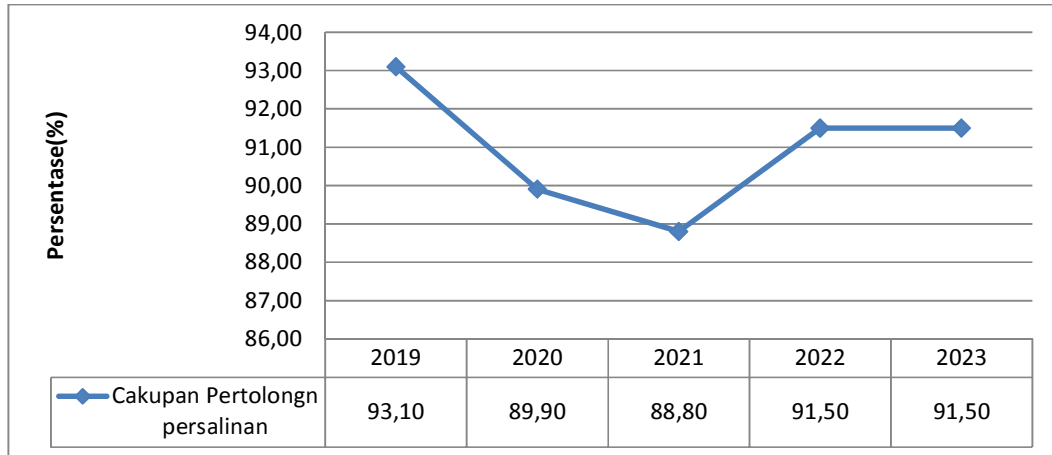


*Sumber Data: Dinas Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat, 2023*

### **e.1. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih**

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih. Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

**Gambar 2.35.**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan**  
**yang memiliki Kompetensi Kebidanan**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**



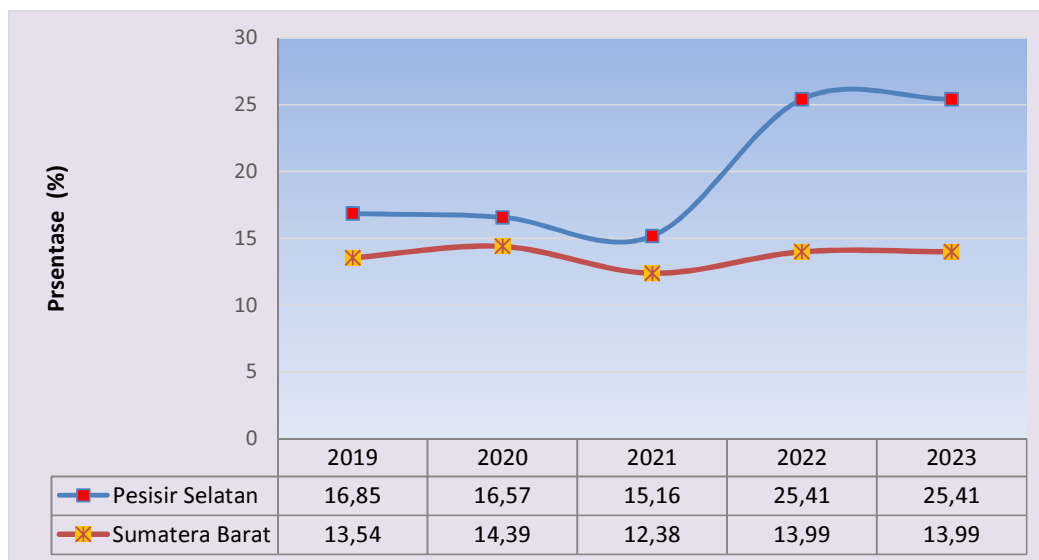
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### **e.2. Angka Kesakitan**

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui angka kesakitan yang merupakan adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar masyarakat dapat mudah, murah dan merata mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar berikut menjelaskan bahwa angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan dalam masa 2019 - 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu menjadi 25,41 persen dibanding tahun 2021 sebesar 15,16 persen. Dan pada Tahun 2023, angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan tetap berada pada angka 25,41 persen.

**Gambar 2.36.**

**Grafik Perbandingan Angka Kesakitan  
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2019 – 2023**



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

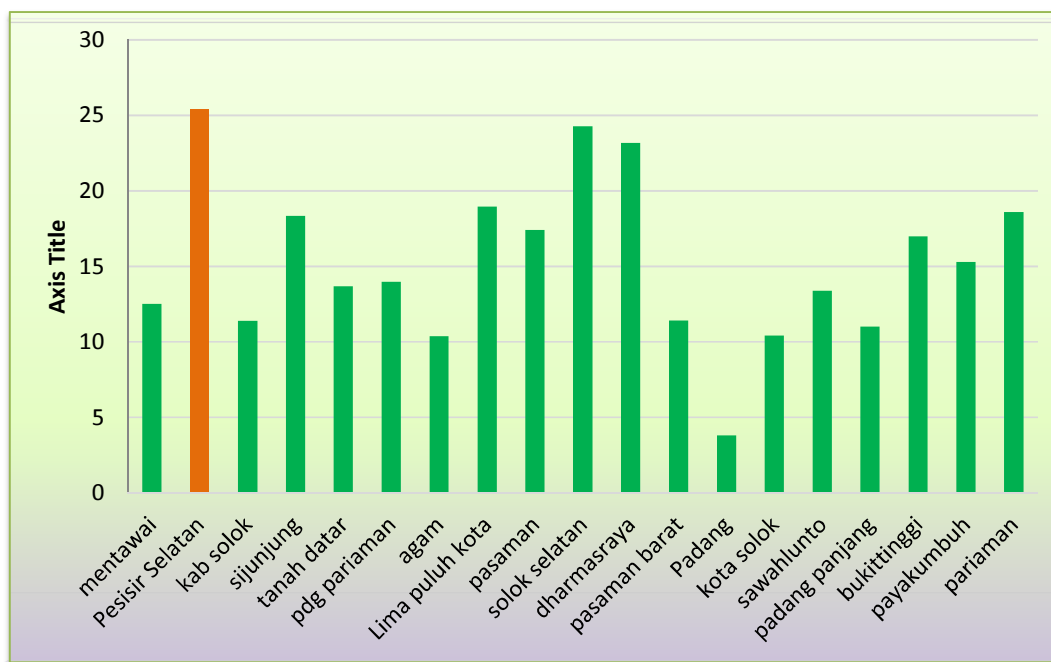
Apabila dilihat dari rata-rata angka kesakitan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, maka angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan paling tinggi di Propinsi Sumatera Barat. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian ke depan dalam menyusun perencanaan kerja daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan derajat kesehatan, sekarang lagi mengutamakan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembiayaan dan Jaminan kesehatan ini memegang peranan penting dalam mencapai tujuan di setiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Gambar 2.37.**

**Grafik Perbandingan angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

**Tahun 2022**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2023

Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN total coverage;
2. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total coverage bagi PBI Daerah;
3. Advokasi dari koordinasi dengan Pimpinan Daerah dan Stakeholder terkait;
4. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di semua tingkatan; dan
5. Bekerjasama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

### 2.3.3. Bidang Infrastruktur Dasar

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Melihat kondisi perkembangan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19.**

**Perkembangan Capaian Pelayanan  
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun 2019-2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	28,23	29,55	30,90	32,34	34,12
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	54,34	57,05	59,13	59,49	60,98
3	Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi Layak (%)	75,13	75,27	76,06	76,52	77,35
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum (%)	94,88	95,59	96,45	98,37	98,37*
5	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	n/a	87,80	88,50	89,88	89,88*

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

• Angka Sementara

#### a. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari: a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten.

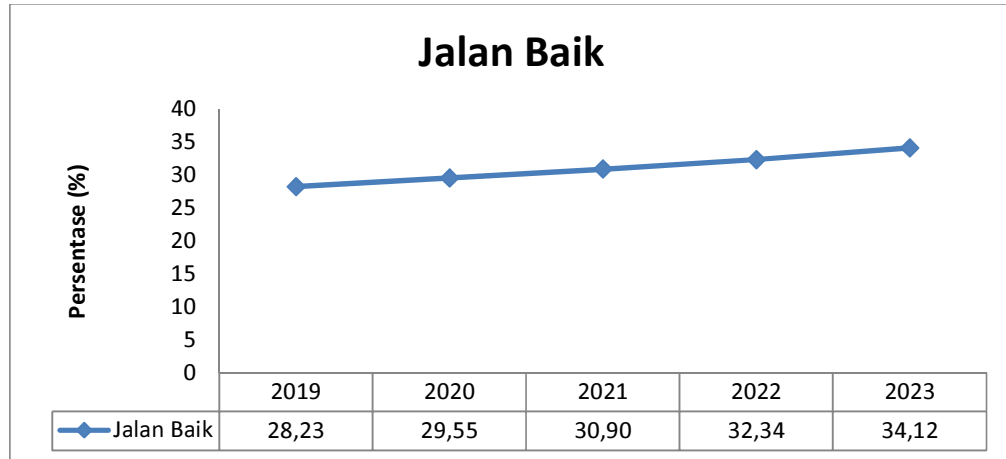
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 34,12 % pada tahun 2023. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,78 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 32,34 % dan telah memenuhi target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar 2.38.**

**Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**

**Tahun 2019 - 2023**



Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

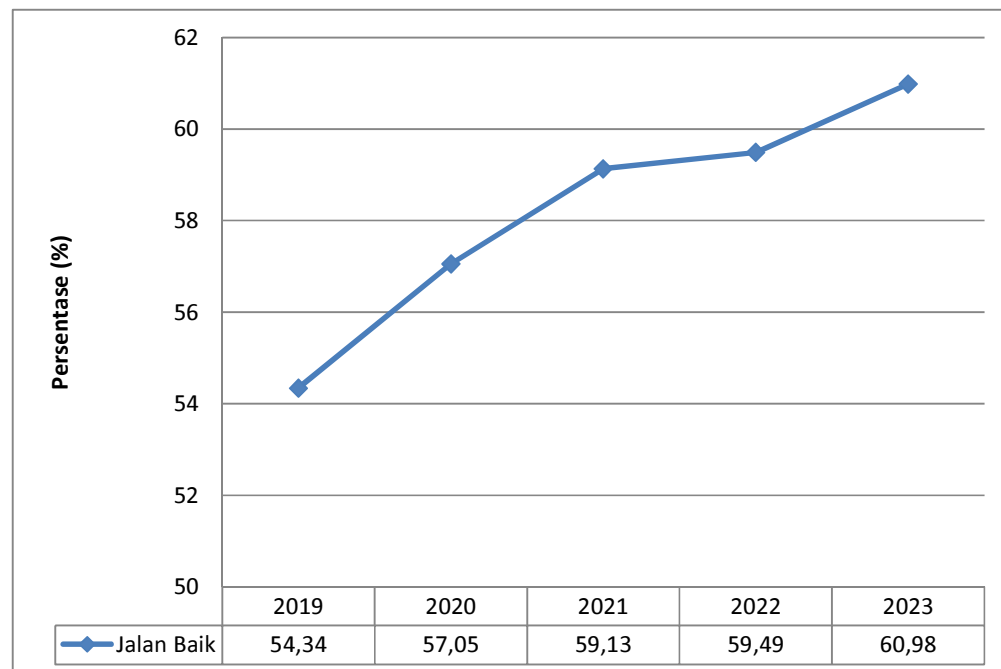
**b. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi mengungkapkan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai

berikut: 1) Peningkatan kesejahteraan petani, 2) pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi, 3) desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi, 4) demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani, 5) akuntabilitas dan transparansi, 6) efisiensi dan efektivitas, 7) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal, 8) terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan 9) satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 54,34 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 60,98 %. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan RPJMD sebesar 59,2 %. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar 2.39.**  
**Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2019 – 2023**



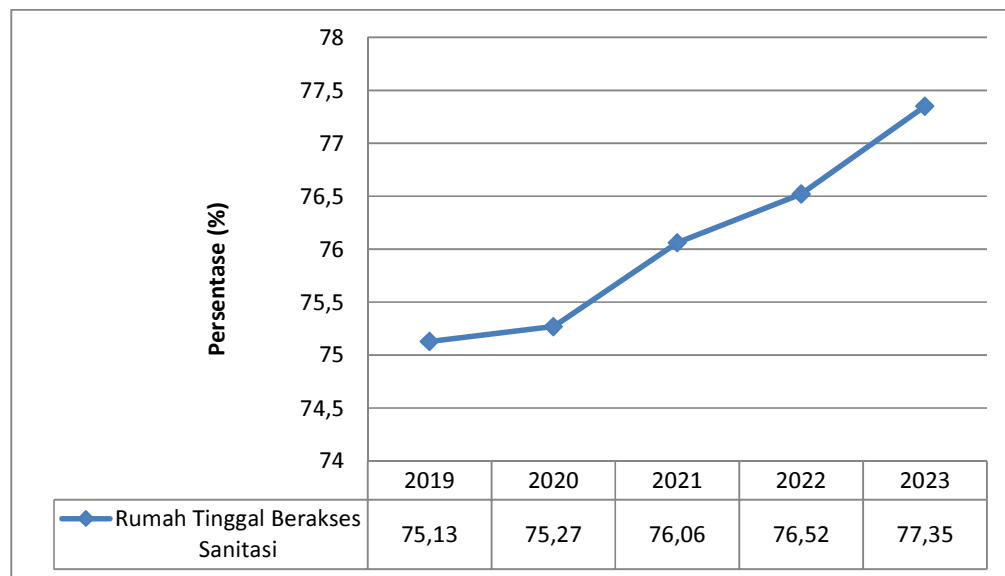
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

### c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, persentase rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2019 adalah 75,13 %, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,35 %. Dari data tersebut di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan masih ada 22,65 % rumah yang belum memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Gambar 2.40.**  
**Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

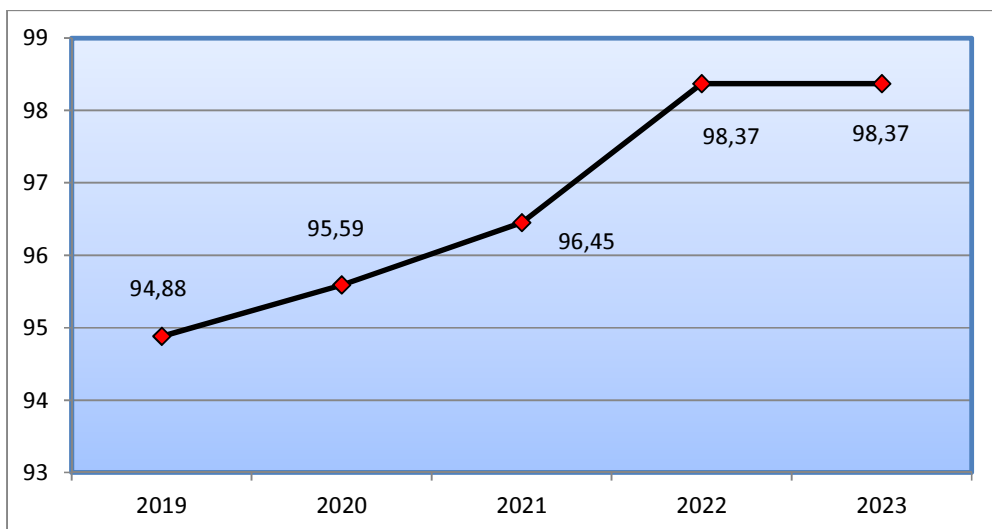


Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

#### d. Persentase Penduduk berakses Air Minum

Salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah penyediaan akses air minum dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu “mencapai *universal access* dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Persentase rumah tinggal berakses air minum layak di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 mencapai 89,88 % atau meningkat dibanding tahun 2020 dengan capaian 87,80 %. Namun capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dari 98,37 % akses air minum yang dicapai, hanya 89,88 % yang memiliki akses air minum layak, dan sisanya 8,49 % belum layak.

**Gambar 2.41.**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**



Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

**e. Permukiman Layak Huni dan Permukiman Kumuh**

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2023, rasio permukiman layak huni sebesar 0,9692. Capaian ini sama dengan tahun lalu dan meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencapai 0,968095.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

**Tabel 2.20.**  
**Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0,245	0,246	0,2057	0,2072	0,2099
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,968086	0,968095	0,968095	0,9692	0,9692
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0,0839	0,0838	0,0827	0,0802	0,0802

Sumber Data: Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Rasio Rumah Layak Huni

$$= (\text{Jumlah Rumah Layak Huni}) : (\text{Jumlah Penduduk})$$

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 hektar Kawasan kumuh perdesaan dan 229 hektar Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 0,0802 %.

#### **2.3.4. Bidang Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya penduduk yang bekerja menggambarkan tingkat kesejahteraan yang baik, sebaliknya banyaknya penduduk yang menganggur menjadi indikator buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan terserap di dunia kerja menjadi satu tanda bahwa tingkat kesejahteraan semakin baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020-2022 menurun secara signifikan, namun pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali meningkat sebesar 0,14 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 4,61 persen tahun 2022 menjadi 4,75 persen tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pencari kerja aktif seiring adanya peningkatan perekonomian secara umum. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu rasio jumlah angkatan kerja terhadap

jumlah penduduk usia kerja. Angka TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 68,82 persen tahun 2019 turun menjadi 65,00 persen tahun 2023.

**Tabel 2.21.**  
**Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Barat**  
**dan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**

Tahun	TPT		TPAK	
	Sumbar	Pessel	Sumbar	Pessel
2019	5,38	6,02	68,82	68,82
2020	6,88	7,00	67,88	65,00
2021	6,52	5,97	69,01	50,18
2022	6,28	4,61	67,72	66,95
2023	5,94	4,75	69,61	65,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024"

Apabila dibandingkan secara relative dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 berada pada peringkat ke empat belas setelah Kota Payakumbuh. Angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin tahun 2023 berjumlah 256.424 jiwa mengalami peningkatan sebesar 11,49 persen dari tahun 2022 dengan rincian yang bekerja 244.236 jiwa meningkat sebesar 11,32 % sedangkan pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan sebesar 14,96 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat peningkatan jumlah pencari kerja aktif seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

**Tabel 2.22.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019 - 2023**

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kabupaten</b>						
1.	Kep. Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
2.	<b>Pesisir Selatan</b>	<b>6,02</b>	<b>7,00</b>	<b>5,97</b>	<b>4,61</b>	<b>4,75</b>
3.	Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
4.	Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71
5.	Tanah Datar	3,20	4,79	4,63	5,91	5,35
6.	Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41	6,60	6,69
7.	Agam	4,78	4,61	5,06	4,93	4,96
8.	Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
9.	Pasaman	5,28	5,04	4,92	5,38	5,09
10.	Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
11.	Dharmasraya	5,06	5,31	5,00	6,23	6,22
12.	Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02	6,33	6,01
<b>Kota</b>						
13.	Padang	8,74	13,64	13,37	11,69	10,86
14.	Solok	7,06	8,35	5,15	3,90	3,72
15.	Sawahlunto	6,84	8,20	6,38	5,00	4,98
16.	Padang Panjang	4,38	7,22	4,90	4,84	5,49
17.	Bukittinggi	6,20	7,51	6,09	4,90	4,99
18.	Payakumbuh	4,13	6,68	6,47	5,16	4,84
19.	Pariaman	5,48	5,73	6,09	5,19	5,68
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>		<b>5,38</b>	<b>6,88</b>	<b>6,52</b>	<b>6,28</b>	<b>5,94</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024"

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut**  
**Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2022-2023**

No.	Kegiatan Utama	2022	2023	Persentase
<b>I.</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>229.994</b>	<b>256.424</b>	<b>11,49</b>
	Bekerja	219.392	244.236	11,32
	Pengangguran Terbuka	10.602	12.188	14,96
<b>II.</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>113.527</b>	<b>138.072</b>	<b>21,62</b>
	Sekolah	26.557	30.652	15,42
	Mengurus Rumah Tangga	73.109	81.389	11,33
	Lainnya	13.861	26.031	87,80
	<b>Jumlah</b>	<b>343.521</b>	<b>394.496</b>	<b>14,84</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024"

### 2.3.5 Bidang Ketahanan Pangan

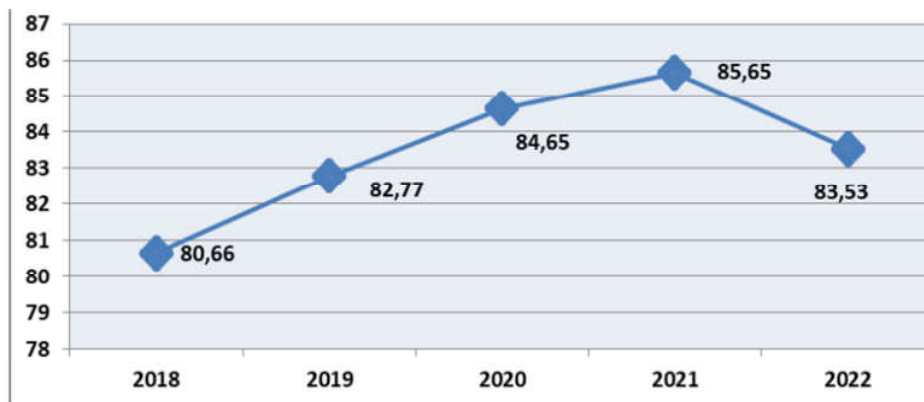
Luas lahan sawah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 23.885,09 Ha. Sebagian besar dari luas lahan ini didominasi oleh lahan sawah irigasi yaitu sebesar 17.301,92 Ha. Kecamatan yang memiliki lahan sawah irigasi adalah Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 2.597,58 Ha. Selain sawah, Kabupaten Pesisir Selatan juga menghasilkan beberapa produk perkebunan. Secara umum, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah menghasilkan

komoditi utama dari sektor pertanian berupa hasil tanaman pangan (padi dan jagung), hasil tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, palawija dan buah-buahan) serta hasil tanaman perkebunan (gambir, kelapa, kelapa sawit, kakao, karet, pala, kopi dan cengkeh).

Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

IKP di Kabupaten mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 ke angka 85,65, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 83,53. Namun secara keseluruhan, pencapaian ini masih dikategorikan kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik ( $IKP > 75,68$ ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.

**Gambar 2.42.**  
**Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

## **2.4. Kondisi Fiskal**

### **a. Kapasitas Keuangan Daerah**

Desentralisasi fiskal menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tersebut salah satunya dapat diukur atau tercermin dari kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumber daya finansial secara selektif yang mencakup pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari Pemerintah Pusat serta pengukuran untuk membiayai berbagai program dan layanan.

Kapasitas fiskal ini salah satu indikator keberhasilan daerah dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Kapasitas fiskal daerah diukur melalui Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

**Tabel 2.25.**  
**Kapasitas Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No.	Tahun	Indeks KFD	Kategori KFD
1.	2019	0,796	Sedang
2.	2020	0,780	Sedang
3.	2021	0,692	Rendah
4.	2022	1,055	Sangat rendah
5.	2023	0,803	Sangat rendah

Sumber: Kepmenkeu 2019-2023

Berdasarkan data di atas, kapasitas fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023 berada pada kategori sedang, rendah dan sangat rendah. Kategori sedang terdapat pada tahun 2019 dengan indeks 0,796 dan tahun 2020 dengan indeks 0,780. Sedangkan tahun 2021 kapasitas fiskal Kabupaten Pesisir Selatan turun menjadi kategori “rendah” dan tahun 2022 dan 2023 turun lagi menjadi kategori “sangat rendah” artinya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum mampu membiayai belanja daerah untuk pembangunan atau dengan kata lain, Kabupaten Pesisir Selatan lebih besar ketergantungannya dengan Pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah.

Setiap tahunnya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal Daerah yang dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam melihat kemampuan keuangannya dalam membiayai pembangunan didaerah yang salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kapasitas Fiskal Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.26.****Kategori Kapasitas Fiskal Daerah**

<b>Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah</b>	<b>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah</b>
RKFD < 1,302	Sangat rendah
1,302 ≤ RKFD < 1,799	Rendah
1,799 ≤ RKFD < 2,296	Sedang
2,296 ≤ RKFD , 2,793	Tinggi
2,793 ≤ RKFD	sangat tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023

b. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Penerapan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, maka daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi sumber daya melalui Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan di daerah. Untuk itu daerah perlu meningkatkan kemampuan keuangannya melalui penerimaan sumber daya yang telah ada maupun menggali sumber daya baru.

Derajat desentralisasi fiskal adalah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Rasio Derajat Desentralisasi ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat pendapatannya dalam membiayai pembangunan didaerah.

**Tabel 2.27.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan/ Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 % - 25 %	Instruktif
Rendah	25 % - 50 %	Konsultatif
Sedang	50 % - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 % - 100 %	Delegatif

Sumber : Nadeak, 2003:21

**Tabel 2.28.**  
**Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal**

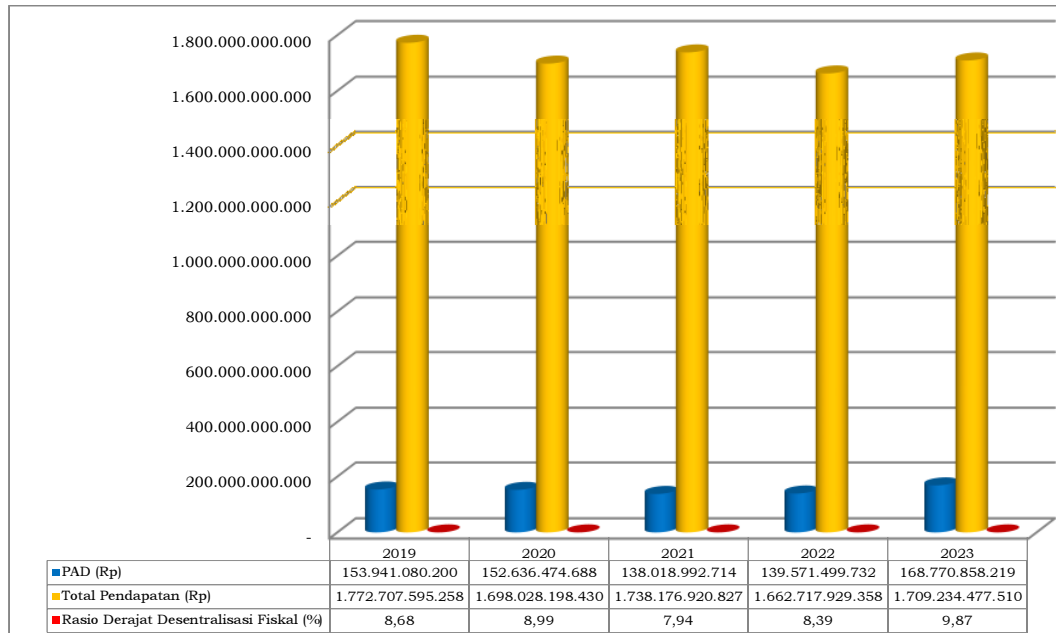
Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, 1991:20

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan kontribusi terendah berada pada tahun 2021 sebesar 7,94 % dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 9,87 %. Jika dilihat dari Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah berada pada pola hubungan ***Instruktif***, sedangkan jika dilihat dari Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada skala 00,00 - 10,00 yang berarti kemampuan keuangan daerah

**sangat kurang.** Dengan artian tingginya ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pemerintah Pusat.

**Gambar 2.42**  
**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Hasil Analisis BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2023

Untuk mengatasi ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan penggalan sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas database subjek dan objek pajak untuk peningkatan penggalan potensi PAD;
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah;

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pajak dan meningkatkan PAD;
4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi kebijakan dan pelayanan pajak untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang taat membayar pajak;
5. Optimalisasi penggalan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

c. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang terdiri dari:

- d. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari:
- e. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- f. Pendapatan transfer terdiri dari: transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
- g. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan atau dengan kata lain belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan.

- i. Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
- j. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- k. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- l. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:
- m. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

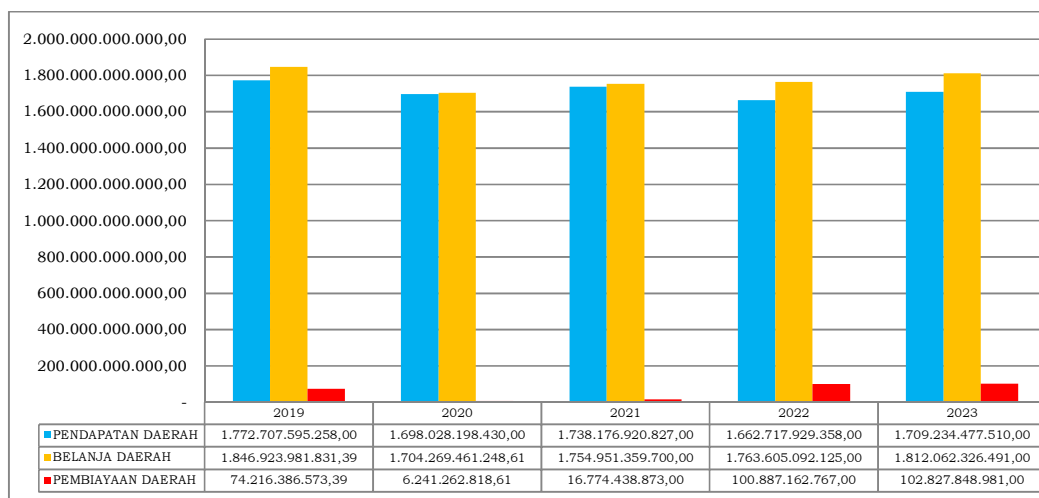
- n. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi terdiri dari: belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, aset lainnya.
- o. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- p. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- q. Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya yang terdiri:
- r. Penerimaan pembiayaan, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- s. Pengeluaran pembiayaan, adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah yang bersumber dari: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,

pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- t. Pada struktur APBD dapat dilihat perkembangan pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun, serta komposisi komponen pendapatan maupun belanja tersebut. Pendapatan dapat dilihat dari PAD, pendapatan transfer (dana perimbangan, DAK dan DAU, dan lain-lain), serta pendapatan daerah lain yang sah. Dari sisi belanja dapat dilihat perkembangan proporsi antara belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya pada analisis belanja yang lebih rinci akan melihat perkembangan proporsi masing-masing komponen belanja tersebut. Untuk melihat perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Perkembangan struktur APBD secara umum berfluktuatif seiring dengan perkembangan ekonomi nasional yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 4,21 persen dari Rp. 1.772.707.595.258,00 menjadi Rp. 1.698.028.198.430,00.

**Gambar 2.43.**  
**Perkembangan Struktur APBD Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,36 menjadi Rp. 1.738.176.920.827,00 pada tahun 2021. Untuk tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 4,34 persen menjadi Rp. 1.662.717.929.358,00 serta pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,80 persen menjadi Rp. 1.709.234.477.510,00.

Untuk belanja daerah dari tahun 2019 turun sebesar 7,74 persen dari Rp. 1.846.923.981.831,39 menjadi Rp. 1.704.269.461.248,61 tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 2,97 persen menjadi Rp. 1.754.951.359.700,00 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 naik sebesar 0,49 persen menjadi Rp. 1.763.605.092.125,00 serta pada tahun 2023 naik sebesar 2,75 persen menjadi Rp. 1.812.062.326.491,00.

Sedangkan untuk pembiayaan secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai 2023 tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 91,59 persen dari Rp. 74.216.386.573,39 tahun 2019 menjadi Rp. 6.241.262.818,61.

#### d. Analisis Pendapatan

Pendapatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Upaya Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah harus tetap dijaga kesinambungannya. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelaksanaan program pembangunan mendorong Pemerintah Daerah untuk tetap mengupayakan peningkatan pendapatan daerah. Evaluasi anggaran pendapatan dilakukan untuk melihat proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Evaluasi anggaran pendapatan pertama kali dilakukan dengan

**Tabel 2.29.**  
**Struktur Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

KODE REK.	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.772.707.595.258</b>	<b>1.698.028.198.430</b>	<b>1.738.176.920.827</b>	<b>1.662.717.929.358</b>	<b>1.709.234.477.960</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>153.941.080.200</b>	<b>152.636.474.688</b>	<b>138.018.992.714</b>	<b>139.571.499.732</b>	<b>168.770.858.669</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	27.337.210.782	28.949.287.406	21.381.399.178	27.570.180.014	28.244.849.306
4.1.01.	Retribusi Daerah	13.505.569.321	10.793.229.391	3.746.914.150	4.537.044.250	9.164.490.663
4.1.01.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.395.930.840	9.632.288.482	7.968.835.181	9.766.118.702	29.890.129.759
4.1.01.	Lain-lain PAD yang Sah	104.702.369.257	103.261.669.409	104.921.844.205	97.698.156.766	101.471.388.941
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.516.188.955.658</b>	<b>1.406.277.777.647</b>	<b>1.430.885.577.263</b>	<b>1.478.227.245.818</b>	<b>1.528.055.215.291</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.437.596.055.079	1.344.553.477.576	1.343.163.462.103	1.381.617.701.514	1.426.255.227.737
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.592.900.579	61.724.300.071	87.722.115.160	96.609.544.304	101.799.987.554
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>102.577.559.400</b>	<b>139.113.946.095</b>	<b>169.272.350.850</b>	<b>44.919.183.808</b>	<b>12.408.404.000</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	102.577.559.400	139.113.946.095	96.139.479.335	44.219.183.808	12.408.404.000
4.3.02.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	-	-	73.132.871.515	700.000.000	-

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

melihat komposisi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah beserta masing-masing komponennya, dengan menganalisis antar waktu melalui perkembangan pendapatannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa nominal dan proporsinya dan dari mana pendapatan tersebut didapatkan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 168.770.858.219,00 dan terendah pada tahun 2021 sebesar Rp. 138.018.992.714,00. Sedangkan untuk pendapatan transfer tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.528.055.215.291,00 dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.406.277.777.647,00. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp. 169.272.350.850,00 dan terendah pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.408.404.000,00.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.12 di atas bahwa PAD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 berada pada angka Rp. 153.941.080.200,00, Pendapatan Transfer berada pada angka Rp. 1.516.188.955.658,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berada pada angka Rp. 102.577.559.400,00. Tahun 2020, PAD menurun pada angka Rp. 152.636.474.688,00, pendapatan transfer menurun menjadi Rp. 1.406.277.777.647,00 dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan menjadi Rp. 139.113.946.095,00. Sedangkan pada tahun 2021, PAD menurun menjadi Rp. 138.018.992.714,00, Pendapatan Transfer meningkat menjadi Rp. 1.430.885.577.263,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan menjadi Rp. 169.272.350.850,00. Pada Tahun 2022 dan 2023, PAD mengalami peningkatan sebesar 20,92 persen dari Rp. 139.571.499.732,00 menjadi Rp. 168.770.858.219,00, sedangkan pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 3,37 persen dari Rp. 1.478.227.245.818,00 menjadi Rp. 1.528.055.215.291,00. Untuk Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 72,38 persen dari Rp. 44.919.183.808,00 menjadi Rp. 12.408.404.000,00.

Untuk nilai Dana Perimbangan terbesar Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 juga terjadi pada tahun 2023 dengan

nilai Rp. 1,24 triliun, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp. 1,10 triliun. Sedangkan untuk nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah terbesar Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, terjadi pada tahun 2020 dengan nilai Rp. 391 milyar, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai Rp. 7 milyar.

#### e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. PAD sangat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga akan menopang kemandirian dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

**Tabel 2.30.**  
**Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	153.941.080.200,00	152.636.474.688,00	138.018.992.714,00	139.571.499.732,00	168.770.858.219,00
4.1.01.	Pajak Daerah	27.337.210.782,00	28.949.287.406,00	21.381.399.178,00	27.570.180.014,00	28.244.849.306,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.505.569.321,00	10.793.229.391,00	3.746.914.150,00	4.537.044.250,00	9.164.490.663,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.395.930.840,00	9.632.288.482,00	7.968.835.181,00	9.766.118.702,00	29.890.129.759,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	104.702.369.257,00	103.261.669.409,00	104.921.844.205,00	97.698.156.766,00	101.471.388.491,00

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Komponen PAD secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping memperlihatkan adanya upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada tahun 2019, pajak daerah berada pada angka Rp. 27,3 milyar. Lalu mengalami kenaikan menjadi Rp. 28,9 milyar pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 21,3 milyar dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp. 27,5 milyar dan pada tahun 2023 menjadi Rp. 28,2 milyar. Komponen retribusi daerah, tahun 2019 berada pada angka Rp. 13,5 milyar dan turun menjadi Rp. 10,7 milyar pada tahun 2020, turun lagi menjadi 3,7 milyar tahun 2021 serta pada tahun 2022 dan 2023 naik menjadi Rp. 9,7 milyar dan Rp. 29,8 milyar.

Untuk komponen retribusi daerah mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023, nilai terbesar berada pada tahun 2019 (Rp. 13,5 milyar) dan yang terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3,7 milyar. Untuk komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tahun 2019 berada pada angka Rp. 8,3 milyar dan meningkat tahun 2020 pada angka Rp. 9,6 milyar. Untuk tahun 2021, mengalami penurunan yaitu berada pada angka Rp. 7,9 milyar dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp. 9,7 milyar dan mencapai puncaknya tahun 2023 pada angka Rp. 29,8 milyar. Sedangkan untuk komponen lain-lain PAD yang sah, tahun 2019 berada pada angka Rp. 104,7 milyar turun menjadi Rp. 103,2 milyar tahun 2020 dan naik lagi menjadi Rp. 104,9 milyar tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 97,6 milyar dan naik pada tahun 2023 menjadi Rp. 101,4 milyar.

#### **f. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, DAU, DAK Fisik, Dak Non Fisik, Dana Desa, DID) dan pendapatan transfer antar daerah (bagi hasil). Untuk melihat tren pendapatan transfer Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 - 2023 disajikan pada Gambar 2..

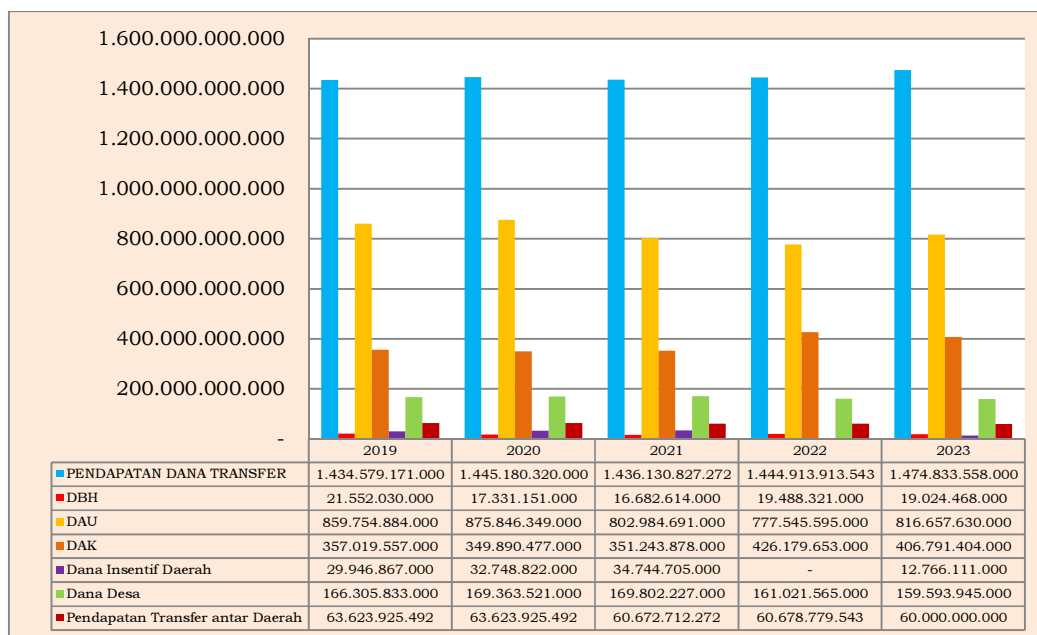
Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dari Rp. 21.552.030.000,00 menjadi Rp. 16.682.614.000,00 tahun 2021 dan naik sebesar 16,82 persen atau Rp. 19.488.321.000,00 tahun 2022 dan turun sebesar 2,38 persen atau Rp. 19.024.468.000,00. Pendapatan Dana Alokasi Umum berfluktuatif dari tahun 2019 sampai 2023, pendapatan DAU paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 875.846.349.000,00 dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 777.545.595,000,00. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penggunaan Dana Alokasi Khusus terbagi 2 yaitu :

1. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant) merupakan DAU yang alokasi penganggarnya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas daerah dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant), merupakan DAU yang alokasi penganggarnya telah ditentukan dari pusat seperti pengajian P3K, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan

Pendapatan Dana Alokasi Khusus juga berfluktuatif dari tahun 2019 sampai 2023 dengan pendapatan DAK tertinggi sebesar Rp. 426.179.653.000,00 tahun 2022 dan terendah sebesar Rp. 349.890.477.000,00 pada tahun 2020. Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun 2019 sampai 2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,73 persen/tahun dari Rp. 29.946.867.000,00 tahun 2019 menjadi Rp. 32.748.822.000,00 tahun 2020, meningkat lagi menjadi Rp. 34.744.705.000,00 tahun 2021 dan pada tahun 2023 turun sebesar 63,26 persen atau Rp. 12.766.111.000,00. Dana insentif daerah ini didapatkan karena adanya penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai bagus oleh Pemerintah Pusat.

#### **Gambar 2.44.**

## Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 -2023



Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Pendapatan dana desa dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,05 persen/tahun atau Rp. 166.305.833.000,00 tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 169.363.521.000,00 tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 169.802.227.000,00 tahun 2021. Sedangkan dari tahun 2021 sampai 2023 rata-rata turun sebesar 3,02 persen/tahun dari Rp. 169.802.227.000,00 tahun 2021 turun menjadi Rp. 161.021.565.000,00 tahun 2022 dan turun lagi menjadi Rp. 159.593.945.000,00 tahun 2023.

### **g. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk melihat tren lain- lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel 2.14 dibawah ini:

**Tabel 2.31.**  
**Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Lain-lain PAD yang Sah</u>	99.292.759.400	121.871.655.118	152.314.186.251	44.267.500.000	10.541.404.000
1	Pendapatan Hibah	99.292.759.400	121.871.655.118	88.359.186.251	43.567.500.000	10.541.404.000
2	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	63.955.000.000	700.000.000	-

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Berdasarkan tabel 2.14. dapat dijelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh dana hibah sebesar Rp. 99.292.759.400,00 naik pada tahun 2020 sebesar 22,74 persen menjadi Rp. 121.871.655.118,00. Pada tahun 2021 turun sebesar 27,50 persen menjadi Rp. 88.359.186.251,00 dan turun lagi cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 50,69 persen dan 75,80 persen tahun 2023.

#### **h. Analisis Belanja**

Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada standar harga satuan, analisa standar belanja dan aturan lainnya.

**Tabel 2.32.**  
**Struktur Belanja Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022	2023
I	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.813.953.970.248,94</b>	<b>1.854.122.929.692,00</b>	<b>1.729.897.102.605,00</b>	<b>1.659.324.726.602,00</b>	<b>1.693.206.878.521,00</b>
1	Belanja Tidak Langsung	999.164.449.984,53	1.048.845.781.783,40	-	-	-
2	Belanja Langsung	814.789.520.264,41	805.277.147.908,60	-	-	-
3	Belanja Operasi	-	-	1.200.810.078.936,00	1.159.985.286.084,00	1.252.845.697.180,00
4	Belanja Modal	-	-	264.811.989.760,00	248.663.386.713,00	218.593.033.169,00
5	Belanja Tidak Terduga	-	-	7.218.401.854,00	5.345.000.000,00	5.000.000.000,00
6	Belanja Transfer	-	-	257.056.632.055,00	245.331.053.805,00	216.768.148.172,00

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Belanja daerah dari tahun 2019 – 2023 berfluktuatif, dengan belanja daerah paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.854.122.929.692,00 dan alokasi belanja paling rendah sebesar Rp. 1.659.324.726.602,00 tahun 2022. Hal ini disebabkan karena turunnya transfer pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus lebih efektif efisien dalam merencanakan program kegiatan pembangunan.

### **h.1. Belanja Daerah Menurut Jenis**

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK.

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional dan pengelolaan SMP Boarding School, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian, serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
  - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja hibah antara lain digunakan stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, KONI, PMI, Pramuka, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi asset.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
    - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
    - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
    - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
    - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2025 terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

- 6.
7. Dalam mengoptimalkan belanja daerah, beberapa kebijakan Perencanaan Belanja daerah yang ditempuh yaitu:
8. Mempedomani aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengalokasian belanja daerah tahun 2025 seperti mandatory spending, belanja yang diarahkan (earmark), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja pemenuhan urusan sesuai SPM, belanja yang ditentukan persentase sesuai amanat Undang-Undang, pencapaian prioritas pusat dan daerah, pencapaian visi dan misi RPJMD dan sebagainya.
9. Keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan
  1. Belanja modal diarahkan untuk belanja sarana dan prasarana, pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
  2. Menggalakkan belanja daerah dengan pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka memacu perputaran ekonomi di sektor UMKM.
  3. Mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) agar seluruh pengelolaan keuangan daerah terhindar dari kebocoran data dan dapat dipertanggungjawabkan serta lebih efektif dan efisien.

**Tabel 2.33.**  
**Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021 – 2023**

NO.	URAIAN	2021	2022	2023
1.	BELANJA OPERASI	1.200.810.078.936	1.159.985.286.084	1.252.845.697.180
	a. Belanja Pegawai	794.191.803.282	770.433.489.164	810.457.273.357
	b. Belanja Barang dan Jasa	349.070.877.021	342.004.770.545	402.970.155.372
	c. Belanja Hibah	57.296.398.633	47.547.026.375	39.273.268.451
	d. Belanja Bantuan Sosial	251.000.000	-	145.000.000
2.	BELANJA MODAL	264.811.989.760	248.663.386.713	218.593.033.169
	a. Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	2.645.120.943	1.468.665.451
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.338.729.723	73.610.014.259	49.971.046.318
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.617.128.666	36.543.371.453	50.761.762.922
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	147.090.060.370	123.865.261.248	109.952.605.781
	e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.016.071.001	11.724.768.810	6.187.637.697
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.218.401.854	5.345.000.000	5.000.000.000
4.	BELANJA TRANSFER	257.056.632.055	245.331.053.805	216.768.148.172
	a. Belanja Bagi Hasil	4.402.674.555	4.536.097.205	3.531.928.972
	b. Belanja Bantuan Keuangan	252.653.957.500	240.794.956.600	213.236.219.200
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1.729.897.102.605</b>	<b>1.659.324.726.602</b>	<b>1.693.206.878.521</b>

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2023

Berdasarkan tabel 2.16 diatas, terlihat komposisi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya berfluktuatif. Hal ini terlihat dari penurunan belanja operasi 3,40 persen dari tahun 2021 dari Rp. 1.200.810.078.936,00 menjadi Rp. 1.159.985.286.084,00 tahun 2022 dan

tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,01 persen menjadi Rp. 1.252.845.697.180,00. Untuk belanja modal dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan dengan rata-rata 9,10 persen/tahun dari Rp. 264.811.989.760,00 tahun 2021 turun menjadi Rp. 248.663.386.713,00 tahun 2022 dan turun lagi sebesar Rp. 218.593.033.169,00 tahun 2023. Hal ini juga berlaku untuk belanja tidak terduga yang mengalami rata-rata penurunan sebesar 16,20 persen/tahun dari Rp. 7.218.401.854,00 tahun 2021 turun menjadi Rp. 5.345.000.000,00 tahun 2022 dan turun lagi menjadi Rp. 5.000.000.000,00 tahun 2023. Belanja transfer yang terdiri dari belanja hibah dan bantuan keuangan dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan dengan rata-rata 8,10 persen/tahun dari Rp. 257.056.632.055,00 tahun 2021 menjadi Rp. 245.331.053.805,00 tahun 2022 dan tahun 2023 turun menjadi Rp. 216.768.148.172,00.

## h.2. Belanja Menurut Fungsi

Belanja menurut fungsi merupakan pengelompokan anggaran belanja daerah berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD dan BUD. Dapat dijelaskan bahwa, pelayanan umum dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan sebesar 4,33 persen dari Rp. 1.224.869.382.773,00 tahun 2021 menjadi Rp. 1.171.805.610.495,00 tahun 2022 dan turun sebesar 10,66 persen tahun 2023 menjadi Rp. 1.046.929.723.589,00. Untuk urusan ketertiban dan keamanan mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 124,31 persen dari Rp. 4.909.982.524,00 tahun 2021 menjadi Rp. 11.013.538.780,00 tahun 2022 dan turun 62,62 persen tahun 2023 menjadi Rp. 4.116.905.336,00. Kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk pencegahan COVID-19. Urusan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,01 persen dari Rp. 217.159.656.396,00 tahun 2021 menjadi Rp. 204.099.033.756,00 tahun 2022 dan turun lagi 5,12 persen tahun 2023 menjadi Rp. 193.644.291.965,00. Untuk urusan perlindungan lingkungan hidup dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan rata-

rata sebesar 13,92 persen/tahun dari Rp. 21.634.669.346,00 tahun 2021 menjadi Rp. 16.031.041.141,00 tahun 2023.

Untuk melihat besaran belanja berdasarkan fungsi, dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.34.**  
**Belanja Daerah Menurut Fungsi**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021-2023**

No	Urusan	2021	2022	2023
1	Pelayanan Umum	1.224.869.382.773	1.171.805.610.495	1.046.929.723.589
2	Ketertiban dan Keamanan	4.909.982.524	11.013.538.780	4.116.905.336
3	Ekonomi	217.159.656.396	204.099.033.756	193.644.291.965
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	21.634.669.346	18.584.479.465	16.031.041.141
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	27.612.059.187	15.620.103.495	8.593.863.969
6	Kesehatan	97.093.891.908	80.682.381.346	92.381.653.926
7	Pariwisata	6.974.406.195	9.425.886.090	6.134.911.373
8	Pendidikan	126.100.369.371	145.986.103.109	322.785.712.887
9	Perlindungan Sosial	3.542.684.905	2.107.590.066	2.588.774.335

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2023

Sedangkan urusan perumahan dan fasilitas umum dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan dengan rata-rata 44,21 persen/tahun dari Rp. 27.612.059.187,00 tahun 2021 menjadi Rp. 8.593.863.969,00 tahun 2023. Urusan kesehatan mengalami rata-rata penurunan sebesar 15,70 persen/tahun dari Rp. 97.093.891.908,00 tahun 2021 menjadi Rp. 92.381.653.926,00 tahun 2023. Untuk urusan pariwisata berfluktuatif dari Rp. 6.974.406.195,00 tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 9.425.886.090,00 tahun 2022 dan turun lagi menjadi Rp. 6.134.911.373,00 tahun 2023. Urusan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 68,44 persen/tahun dari Rp. 126.100.369.371,00 tahun 2021 meningkat

menjadi Rp. 145.986.103.109,00 tahun 2022 dan meningkat lagi tahun 2023 menjadi Rp. 322.785.712.887,00. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 ini dikarenakan adanya pengalokasian dana DAU yang ditentukan khusus untuk bidang pendidikan dengan tujuan untuk pencapaian target kinerja pendidikan terutama untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan yang belum mencapai target. Urusan perlindungan sosial terus menurun dari tahun 2021 sampai 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar 31,67 persen/tahun dari Rp. 3.542.684.905,00 tahun 2021 menjadi Rp. 2.107.590.066,00 tahun 2022 dan naik sedikit menjadi Rp. 2.588.774.335,00 tahun 2023.

### h.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang bersumber dari:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
  - b. Pencairan dana cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman daerah
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah Yang bersumber dari:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
  - b. Penyertaan modal daerah
  - c. Pembentukan dana cadangan
  - d. Pemberian pinjaman daerah dan/atau
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

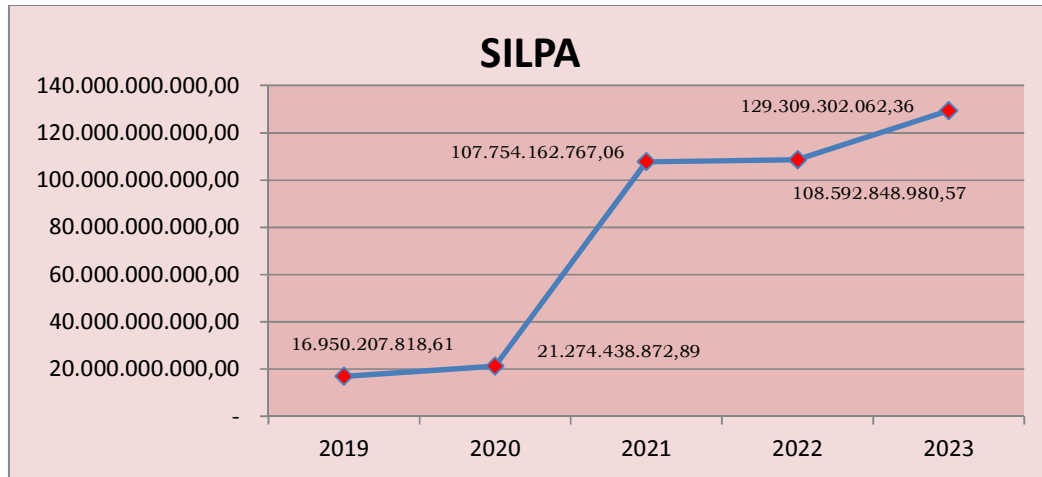
Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. SiLPA dapat terjadi karena realisasi pendapatan yang melebihi target dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Tinggi atau rendahnya SiLPA belum serta merta menunjukkan baiknya kinerja Pemerintah Daerah. Masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai apakah SiLPA yang ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan suatu prestasi atau sebaliknya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menilai SiLPA yaitu reformasi manajemen keuangan daerah, manajemen pendapatan daerah, manajemen belanja daerah, manajemen kas dan anggaran kas daerah, manajemen aset daerah, manajemen utang dan investasi daerah, dan manajemen kemitraan Pemerintah Daerah. Pada tabel 2.18 dibawah ini dapat kita lihat perkembangan SiLPA Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 sampai 2023.

**Tabel 2.35.**  
**Perkembangan SILPA Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.750.292.649.910,00	1.787.094.489.692,00	1.734.397.102.605,00	1.628.620.096.059,00	1.623.805.488.445,00
2	Belanja	1.813.953.970.248,94	1.854.122.929.692,00	1.729.897.102.605,00	1.659.324.726.602,00	1.693.206.878.521,00
3	Pembiayaan	11.578.669.546,89	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	102.374.271.822,57
4	SILPA	16.950.207.818,61	21.274.438.872,89	107.754.162.767,06	108.592.848.980,57	129.309.302.062,36

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

**Gambar 4.36.**  
**Perkembangan SILPA Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**



Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan SiLPA sangat fluktuatif. Tahun 2019 sampai 2021 dapat dikatakan bahwa terdapat SiLPA karena pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena protokol COVID-19 yang ketat. Mulai dari tahun 2022, SiLPA yang dihasilkan lebih tinggi karena akibat diberlakukannya penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah dibedakan menjadi 2 (dua) bagian sehingga SiLPA yang dihasilkan tersebut banyak berasal dari kegiatan *tagging* sehingga SiLPA tersebut menjadi sisa yang tidak bebas untuk digunakan kembali untuk kegiatan diluar kegiatan *tagging* atau sisa *earmark*.

## **BAB III**

### **PROFIL KEMISKINAN DAERAH**

#### **3.1. Konsep Kemiskinan**

Ada dua perspektif dalam melihat kemiskinan yang eksis pada suatu wilayah. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang direpresentasikan melalui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pada sisi lain, kemiskinan dilihat sebagai suatu proses. Menurut pandangan ini eksisnya kemiskinan pada suatu wilayah merupakan akibat dari suatu proses yang sistemik yang mencakup dimensi waktu dan sistem. Kedua pandangan ini tentunya menimbulkan persepsi dan implikasi yang berbeda dalam mendesain strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pandangan pertama lebih berdimensi jangka pendek sedangkan pandangan kedua lebih menyentuh akar penyebab kemiskinan baik pada tataran makro regional maupun pada tataran mikro.

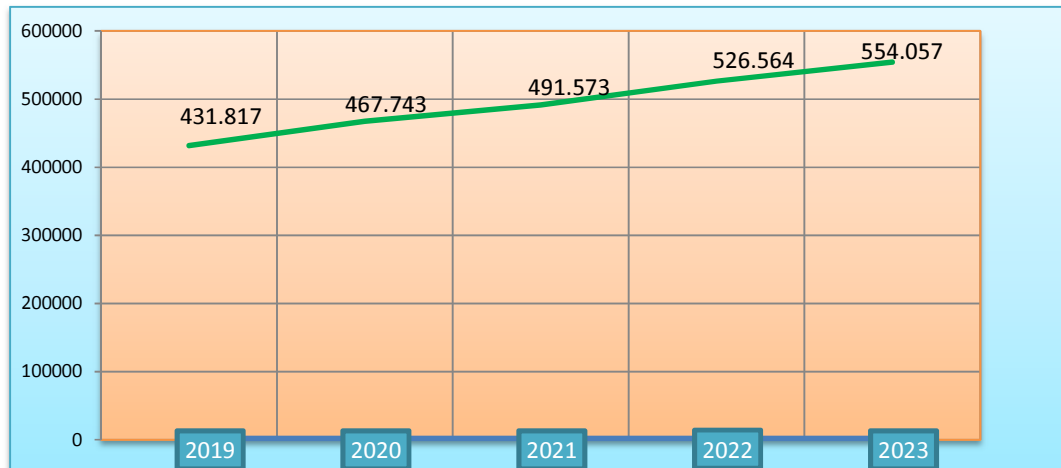
Pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran. Sebelumnya, kemiskinan dimaknai dengan pandangan yang relatif sempit. Kemiskinan hanya dilihat sebagai dimensi ekonomi *an-sich*, seperti: aspek pendapatan, pengeluaran atau aset/faktor produksi. *World Bank* menetapkan seseorang masuk dalam kategori miskin bila hanya memiliki pendapatan di bawah 2 US\$ per hari. Pandangan tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mc. Quibria, seorang Ekonom Senior pada *Asian Development Bank (ADB)*. Menurutnya, orang dikatakan miskin bila tidak punya aset/modal dan bila punya, tidak mampu menggunakan aset/modal yang dimilikinya. Seseorang miskin, bila hanya punya aset tenaga, namun tidak bekerja, atau tinggal di desa namun tidak punya tanah (sawah atau kebun). Paradigma tentang kemiskinan seperti yang dijelaskan sebelumnya sempat menjadi *mainstream* pada wacana publik selama beberapa dekade silam. Repotnya, wacana ini sangat mempengaruhi paradigma

pengambil kebijakan (*policy maker*) di lingkungan pemerintahan pada berbagai level maupun institusi non-pemerintah lainnya yang *concerned* pada upaya penanggulangan kemiskinan. Tentunya, paradigma kemiskinan yang berdimensi ekonomi tersebut pada gilirannya bermuara pada penetapan pilihan strategi dan kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Tak aneh, bila sebelumnya banyak ditemui proyek maupun program penanggulangan kemiskinan yang sarat dengan pendekatan ekonomi semata. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan sangat sektoral dan parsial. Alhasil, sebagian besar proyek ataupun program dinilai kurang efektif. Bahkan, tak sedikit proyek atau program yang menemui kegagalan karena banyak yang tidak tepat sasaran baik kelompok penerima manfaat maupun kegiatan atau kebutuhannya. Selain itu, lebih bersifat karikatif, temporer, dan tidak berkelanjutan. Sehingga harapan bagi terjadinya laju penurunan angka kemiskinan pun bak menggantung asap. Bahkan, muncul dampak negatif semisal apatisme dan sikap ketergantungan di tingkat masyarakat. Belum lagi, fenomena *moral hazard* berupa penyalahgunaan kekuasaan dari penyelenggara program seperti nepotisme, *marked-up* dan berbagai bentuk manipulasi lainnya. Kini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang mencakup dimensi kehidupan yang jauh lebih luas. Wacana kekinian tentang kemiskinan telah bersifat multidimensi, baik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. Terlebih, kian disadarinya dampak kemiskinan yang ternyata juga bersifat multidimensi. Karenanya, strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan pun cenderung menjadi komprehensif dan lintas sektoral.

Paradigma kemiskinan yang bersifat multidimensi itulah yang menjadi basis pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan pada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan ini. Kemiskinan adalah situasi yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi serba kekurangan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi standar kebutuhan hidup

yang layak sebagai manusia yang bermartabat. Standar hidup yang layak sebagai manusia yang bermartabat dimaksud meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi, pertanahan, lingkungan hidup, kesempatan bekerja dan berusaha, rasa aman serta pengakuan sebagai warga masyarakat yang juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Sehingga, ukuran kemiskinan bukan hanya sebatas aspek ekonomi seperti pendapatan/pengeluaran saja. Namun, juga bersifat multi aspek. Beberapa indikator yang kini juga kerap menjadi ukuran diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kemiskinan terdiri atas aspek makanan dan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan sebagainya). Pengertian ini menggunakan pendekatan konsumsi, sehingga ukuran konsumsi dijadikan standar kehidupan yang “layak” dengan melihat kebutuhan dasar (*basic need approach*), sehingga dihasilkan suatu standar pengeluaran/konsumsi minimal yang dihitung dalam satuan rupiah per bulan yang disebut garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Gambar 3.1.**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019 - 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas)

Garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), dimana Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. Berdasarkan pengertian kemiskinan tersebut, maka berimplikasi pada strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka (TNP2K, 2015).

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (TNP2K, 2011). Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi: (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya menjadi:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

### **3.2. Profil Kemiskinan Konsumsi**

Untuk melihat kondisi kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan melalui beberapa tahapan analisis terhadap indikator utama kemiskinan konsumsi yakni: persentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin, Indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan Indeks keparahan Kemiskinan (P2). Berbagai analisis dapat dilakukan terhadap indikator utama kemiskinan meliputi:

1. Analisis posisi relatif

Tujuan analisis ini adalah untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat capaian indikator terhadap rata-rata capaian di tahun tertentu. Dengan demikian kita dapat menilai apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk dibandingkan pencapaian di tingkat provinsi dan nasional. Analisis posisi relatif juga dapat melihat apakah pencapaian indikator lebih baik, sama atau lebih buruk jika dibandingkan dengan indikator kinerja/target seperti RPJMD, RPJMN dan SDGs.

2. Analisis perkembangan antar waktu

Analisis ini diperlukan untuk menjelaskan perkembangan indikator dari waktu ke waktu (tahun ke tahun). Gambaran perkembangan indikator akan memperkaya analisis posisi relatif. Analisa perkembangan antar waktu akan membantu untuk menjelaskan apakah pencapaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pencapaian tahun-tahun

sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir. Selanjutnya menjelaskan apakah capaian indikator tersebut dari tahun ke tahun selama periode dimaksud mengalami fluktuasi, konsisten membaik, atau memburuk.

### 3. Analisis efektifitas

Analisis ini secara sederhana digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan daerah terhadap capaian indikator yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan melihat *trend line* dari grafik perkembangan antar waktu, pada kurun waktu tertentu yang hendak dilihat efektivitas kebijakannya. Selain itu dapat dijelaskan perubahan capaian indikator dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap, atau perlambatan.

### 4. Analisis relevansi

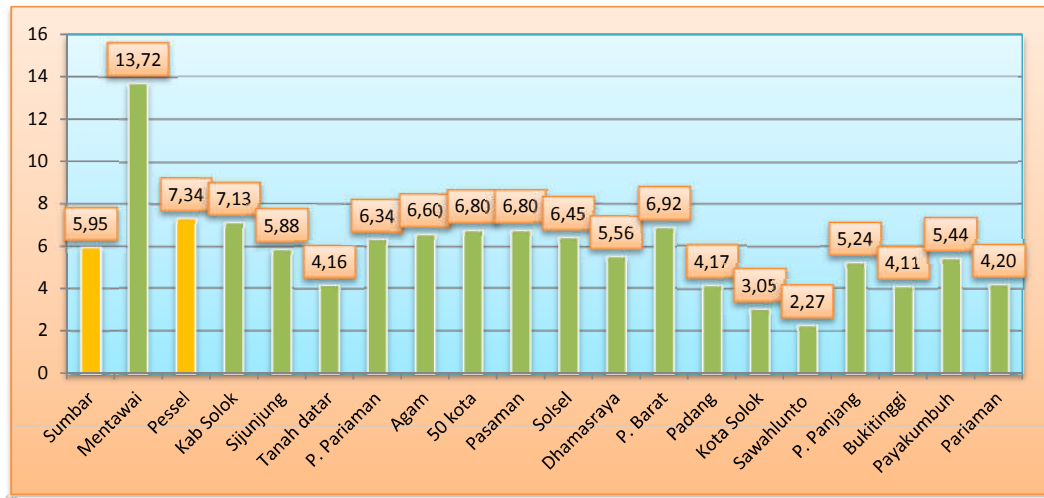
Analisis ini merupakan analisis lebih lanjut dari analisis efektivitas, setelah melihat kebijakan di suatu daerah secara umum efektif memperbaiki suatu indikator kemiskinan. Misalnya penurunan persentase penduduk miskin, seberapa besar penurunannya, perbandingan dengan level pemerintahan provinsi dan pusat, keterkaitan kebijakan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Analisis ini dapat digunakan untuk melihat relevansi hasil kebijakan pada berbagai level pemerintahan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan arah *trend line* capaian indikator kemiskinan tertentu antara kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

#### **3.2.1. Persentase Penduduk Miskin (PO)**

Persentase penduduk miskin (*headcount index/HCL/PO*) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan

miskin. Berdasarkan Gambar 3.2. dibawah ini dapat dianalisis posisi relatif kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 baik secara nasional, provinsi maupun sesama kabupaten/kota di Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 berada pada angka 7,34 persen. Tingkat kemiskinan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,36 persen, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada angka 5,95 persen.

**Gambar 3.2**  
**Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten/Kota**  
**di Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



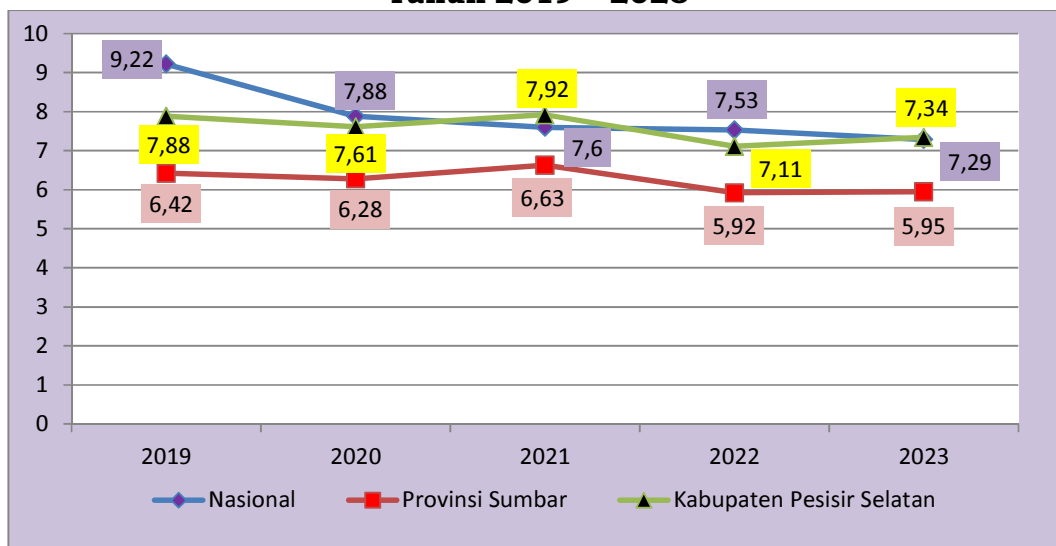
Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan bersama 11 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka tingkat kemiskinan Pesisir Selatan berada pada posisi 2 (dua) tertinggi setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai (13,72 persen)

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Selama lima tahun terakhir (2019 – 2023) cenderung mengalami penurunan (Gambar 3.3). Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 7,88 persen menjadi 7,61 persen pada tahun 2020 berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,27 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7,92

persen berarti jumlah penduduk miskin bertambah 0,31 persen. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 7,11 persen berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan berkurang sebesar 0,81 persen dan kembali meningkat menjadi 7,34 persen tahun 2023. Berarti pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 0,23 persen. Kondisi ini merupakan akibat adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 4,9 persen dari Rp. 526.564,- perkapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp. 554.057 perkapita per bulan pada tahun 2023. Terjadinya kenaikan garis kemiskinan ini jelas dapat mendegradasi penduduk yang tadinya rentan miskin menjadi kembali miskin.

**Gambar 3.3.**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan,**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional**  
**Tahun 2019 – 2023**



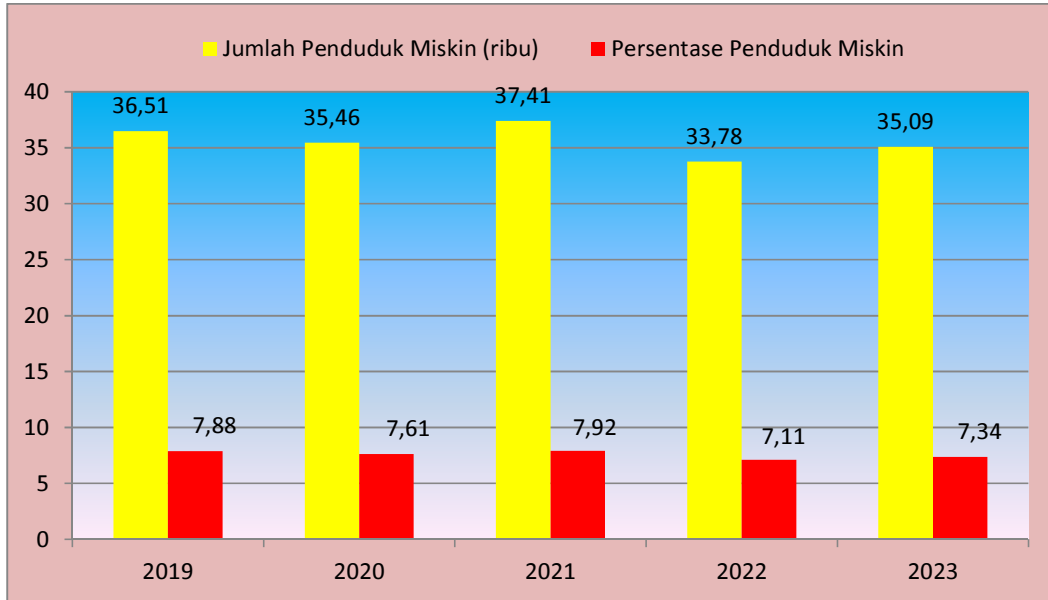
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

### 3.2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi tiga, namun secara jumlah jika dibandingkan bersama 11 kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi pertama tinggi. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk

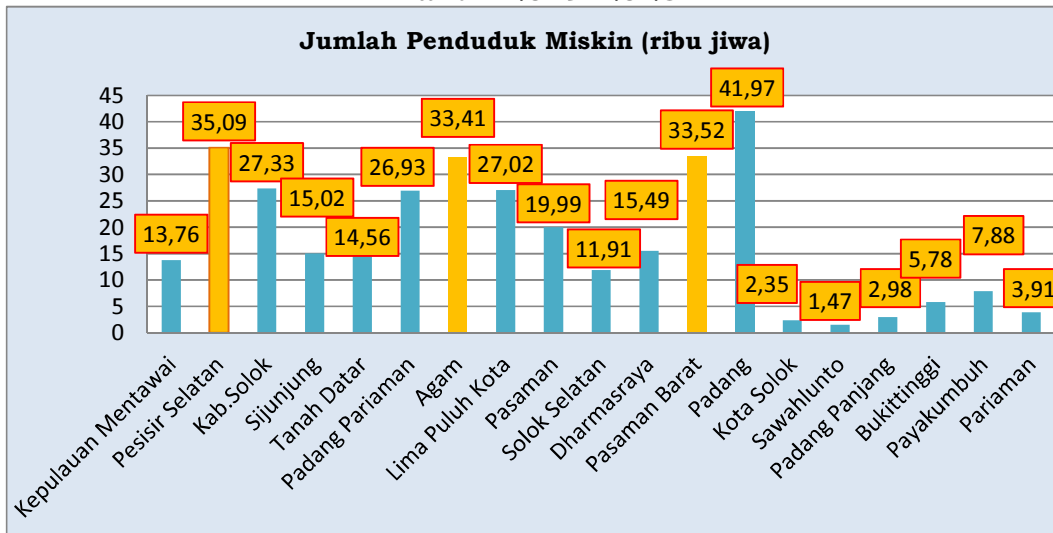
miskin Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 3.4 sedangkan Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar 3.5. dibawah ini:

**Gambar 3.4.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019–2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat 2024

**Gambar 3.5.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019–2023**



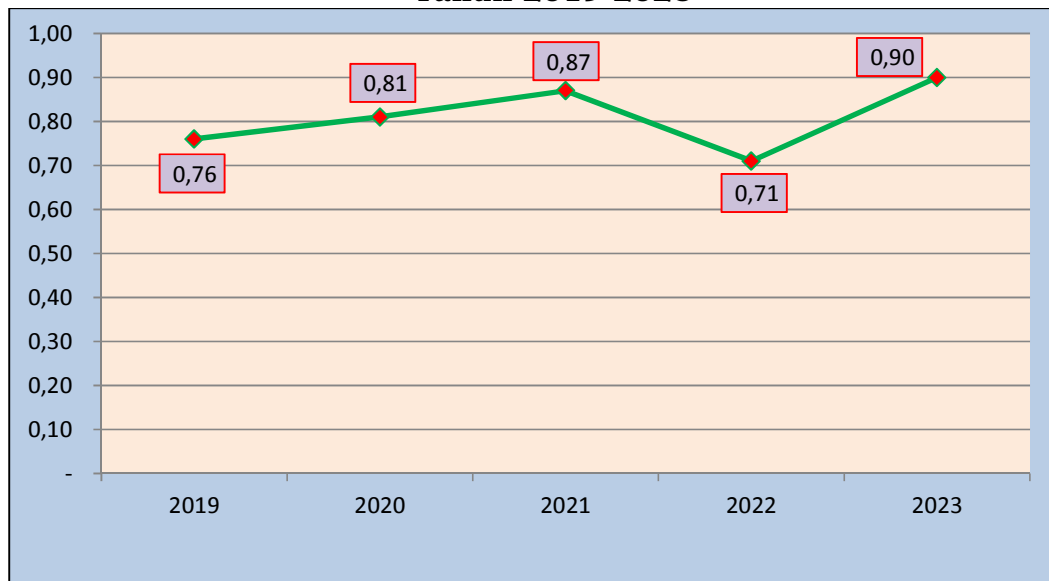
Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat 2024

### **3.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari Poverty Gap Index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai Poverty Gap Index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Poverty Gap Index mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

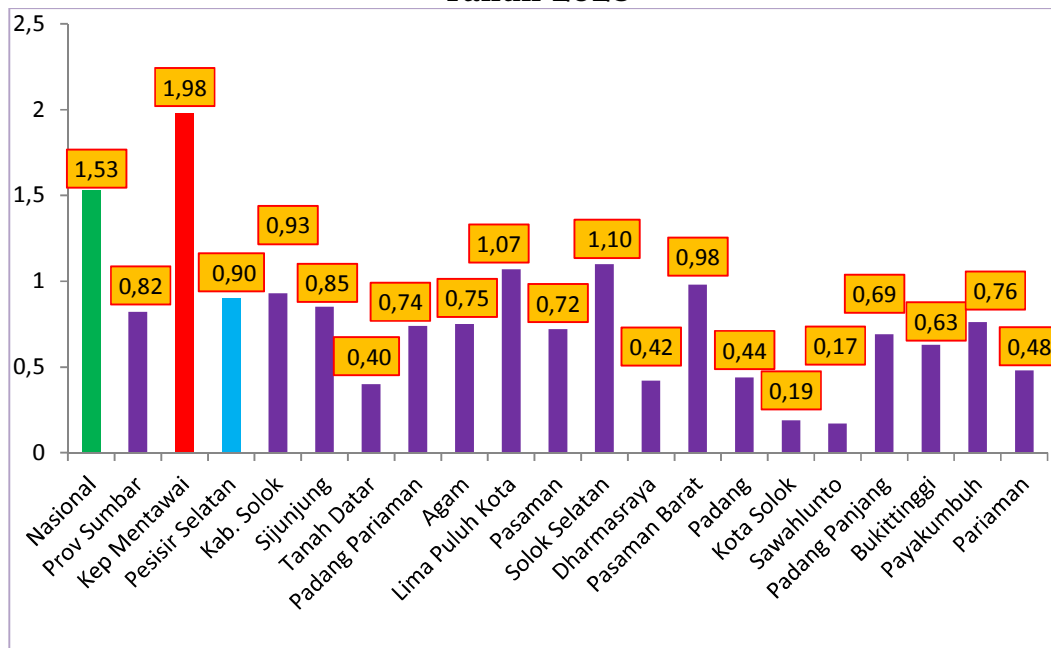
Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir (2019 – 2023) mengalami peningkatan yaitu pada angka 0,76 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,90 persen pada tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan antar kabupaten/kota se Sumatera Barat, maka indeks kedalaman Kabupaten Pesisir Selatan berada pada nomor urut ke 6 (enam) tertinggi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai (1,98 persen), Kabupaten Solok Selatan (1,10 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (1,07 persen), Kabupaten Pasaman Barat (0,98 persen) dan Kabupaten Solok (0,93 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.6.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

**Gambar 3.7.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

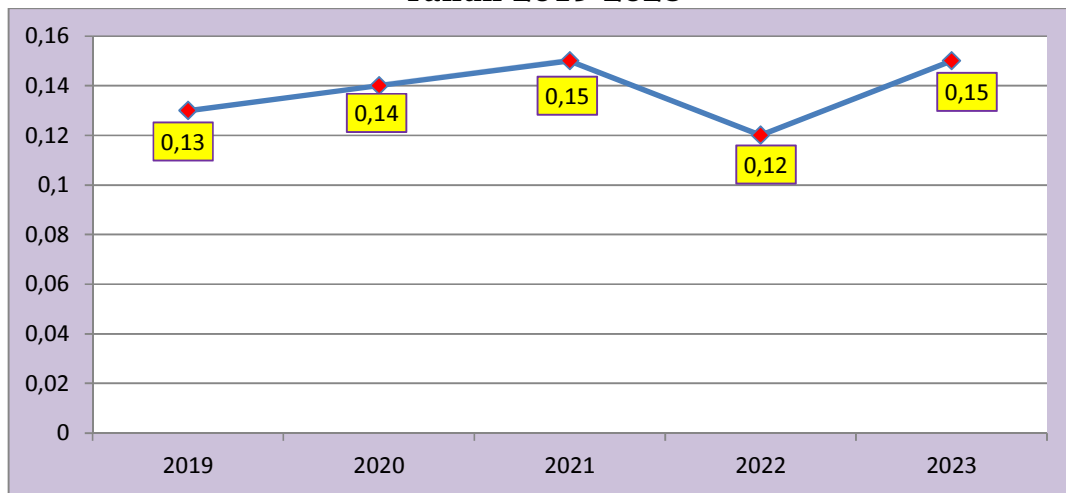


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024"

#### **3.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

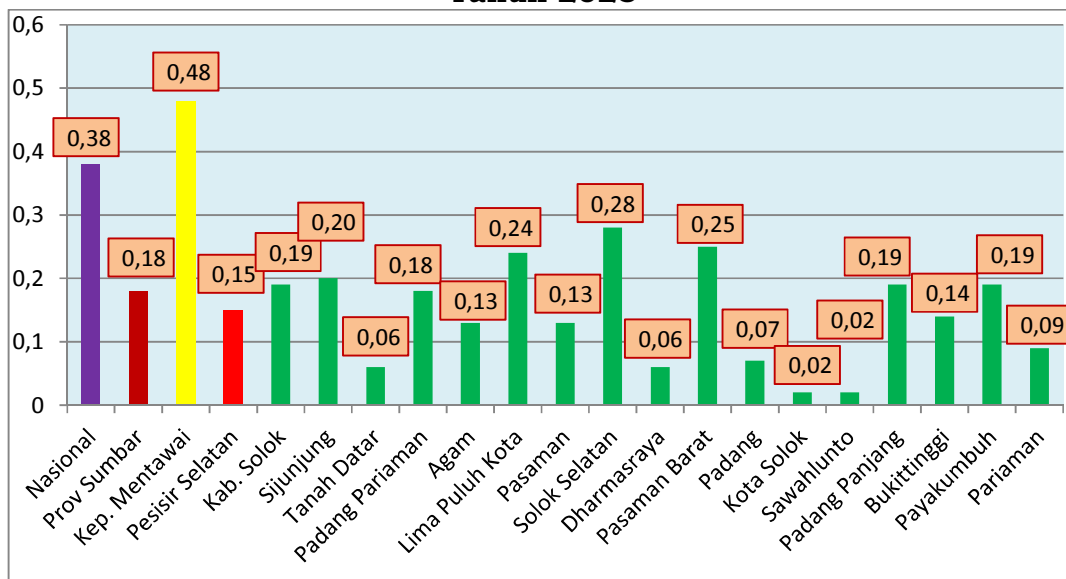
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika kita melihat indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 (0,15 persen) lebih rendah dibandingkan provinsi Sumatera Barat (0,18 persen) dan nasional (0,38). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Jika dibandingkan bersama 19 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tertinggi ke 10 (sepuluh) pada tahun 2023 dari Kabupaten Kepulauan Mentawai (0,48 persen), Kabupaten Solok Selatan (0,28 persen), Kabupaten Pasaman Barat (0,25 persen), Kabupaten Lima Puluh Kota (0,24 persen), Kabupaten Sijunjung (0,20 persen), Kota Payakumbuh (0,19 persen), Kota Padang Panjang (0,19 persen), Kabupaten Solok (0,19 persen), dan Kabupaten Padang Pariaman (0,18 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.8.**  
**Indek Keparahan Kemiskinan (P2)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik "Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024"

**Gambar 3.9.**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024"

Perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan (P2) Pesisir Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuatif yang beragam. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tertinggi berada pada tahun 2021 dan tahun 2023 yaitu berada pada angka

0,15 persen sedangkan yang terendah sejak lima tahun terakhir berada pada tahun 2022 yaitu berada pada angka 0,12. Semakin kecil indeks keparahan kemiskinan ini, menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin semakin menyempit.

Untuk melihat kondisi umum kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas, dan analisis relevansi sebelumnya dapat disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Analisis Kondisi Umum Kemiskinan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Ekonomi Tahun 2019-2023**

<b>PERSPEKTIF ANALISIS</b>					
<b>I N D I K A T O R</b>		Analisis Posisi Relatif	Analisis Perkembangan Antar Waktu	Analisis Efektivitas	Analisis Relevansi
	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Nilai Kabupaten Pesisir Selatan lebih kecil dari Nasional dan lebih besar dari Propinsi	Kecenderungan menurun	Kebijakan mengurangi kemiskinan	Sejalan dengan Nasional dan Provinsi
	Jumlah Penduduk Miskin	Peringkat 2 tertinggi di Provinsi Sumbar Tahun 2022 dan 2023	Fluktuatif	Kebijakan mengurangi kemiskinan	sejalan dengan Nasional dan Provinsi
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Nilai Kabupaten Pesisir Selatan lebih kecil dari Provinsi Sumbar dan Nasional (Peringkat 6 tertinggi Tahun 2022 dan Peringkat 5 tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Sumbar)	Fluktuatif dengan kecendrungan menurun	Perbaikan status ekonomi	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi
	Indeks Keparahakan Kemiskinan (P2)	Nilai Kabupaten Pesisir Selatan lebih kecil dari Provinsi Sumbar dan Nasional (Peringkat 8 tertinggi Tahun 2022 dan Peringkat 11 Tahun 2023 di Provinsi Sumbar)	Fluktuatif dengan kecendrungan menurun	Kebijakan mengurangi kemiskinan	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi

### **3.3. Kemiskinan Konsumsi dan Non Konsumsi**

Banyak studi menunjukkan secara umum kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rendahnya tingkat investasi swasta, masalah ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta rentannya kecukupan pangan. Untuk menemukan setiap permasalahan yang terjadi pada setiap bidang tersebut sehingga dapat digambarkan dengan baik, dilakukan dengan analisis posisi relatif.

#### **3.3.1. Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem sudah berada pada 1,12 % atau mengalami penurunan sebesar 0.92 % poin dari periode Maret 2022, yang merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar dalam 5 tahun terakhir, Data Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 % atau masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yakni 6,5 - 7,5 %. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan sedikitnya 1,86 % poin untuk mencapai 7,5 % pada 2024.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh

pemerintah dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan nasional, yaitu:

- a) konvergensi program, di mana kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada;
- b) kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan;
- c) perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error kelompok miskin yang tidak menerima program; dan
- d) meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Dukungan pemerintah dalam melaksanakan ketiga strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) tersebut juga terus meningkat, di antaranya ditunjukkan dengan peningkatan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 493,5 triliun pada 2024. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan APBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pagu anggaran program pemberdayaan ekonomi 2024 senilai Rp76,3 triliun. Dengan demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu strategi kebijakan fiskal jangka pendek pemerintah.

Dalam rangka pencapaian sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekaligus penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan di 2024, selain peningkatan dukungan APBN, dibutuhkan pula peningkatan komitmen dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa yang lebih optimal, melalui pengalokasian APBD dan APB Desa yang lebih afirmatif dalam pelaksanaan intervensi strategi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan di daerah hingga tingkat desa. Melalui ketiga strategi itu, maka program-program penanggulangan kemiskinan dan percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem di kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta mitra non-pemerintah seperti swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya dapat lebih intensif dikolaborasikan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan P3KE, Pemerintah tetap konsisten untuk terus memperbaiki penetapan sasaran, cakupan, dan wilayah penerima manfaat program dengan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau Data P3KE. Dengan data P3KE ini, target penerima manfaat program kemiskinan ekstrem bisa lebih tepat sasaran dalam intervensinya.

### **3.3.2. Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan**

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan data P3KE (by name by adres) yang kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024, dimana terdapat 2.170 Data Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan. Data P3KE merupakan basis data yang relatif terbaru dengan elemen yang sangat relevan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat sampai dengan 30 % terbawah. Data terbaru yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2024, jumlah estimasi data miskin ekstrim di Kabupaten Pesisir Selatan turun drastis dari 2.170 jiwa menjadi 800 jiwa. Data penduduk miskin ekstrem yang telah dituangkan dalam SK Bupati Pesisir Selatan tersebut disampaikan ke seluruh Perangkat Daerah termasuk Pemerintahan Nagari melalui operator yang telah ditunjuk oleh

Pemerintahan Nagari, untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data penduduk tersebut melalui Aplikasi SIMAPAN (Sistim Informasi Masyarakat Penerima Manfaat) Kabupaten Pesisir Selatan. Verifikasi dan validasi terhadap penduduk miskin ekstrem tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### **3.3.3. Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dijelaskan bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat diperlukan indikator lokal untuk menentukan sasaran masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan. Penetapan kriteria ini berdasarkan pada penghitungan indeks kumulatif (*Indeks Komulatif = Indeks x bobot x indeks terintegrasi* dari 16 item variable/parameter) dan berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh kelas tingkat kemiskinan yaitu sebagai berikut:

- a. Kelas I (sangat miskin) dengan nilai 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan 0,99 (nol koma Sembilan Sembilan);
- b. Kelas 2 (miskin) dengan nilai 1,00 sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan Sembilan); dan
- c. Kelas 3 (rentan miskin) dengan nilai 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

**Tabel 3.2.**  
**Parameter, indeks, bobot dan indeks terintegrasi dalam**  
**penetapan fakir miskin dan orang tidak mampu**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Parameter	Indeks	Bobot	Keterangan	Indeks Terintegrasi
1.	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1,00	0,50	1. Milik Sendiri	1,00
				2. Kontrak/sewa	0,50
				3. Milik Sendiri/ Orang lain	0,25
				4. Dinas	0,10
2.	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1,00	0,50	1. Milik Sendiri	1,00
				2. Milik keluarga/ orang lain	0,50
				3. Tanah Negara	0,10
3.	Penghasilan rata-rata satu keluarga/bulan	1,00	0,50	1. Lebih dari Rp. 3.000.000,-	1,00
				2. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	0,60
				3. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	0,30
				4. Kurang dari Rp. 1.000.000	0,10
4.	Jenis dan luas lahan pertanian produktif	1,00	0,40	1. Sawah/kebun/ ladang > 2 Ha	1,00
				2. 1 – 2 Ha	0,60
				3. < 1 Ha	0,30
				4. Tidak ada	0,10
5.	Kepemilikan kendaraan bermotor	1,00	0,40	1. Mobil/bagan/alat berat	1,00
				2. Motor lebih dari 2 unit	0,70
				3. Motor > 150 cc	0,50
				4. Motor 110 cc –150 cc	0,30

No	Parameter	Indeks	Bobot	Keterangan	Indeks Terintegrasi
				5. Tidak memiliki kendaraan	0,10
6.	Kepemilikan Kendaraan bermotor	1,00	0,40	1. Bernilai lebih dari Rp. 25.000.000	1,00
				2. Bernilai Rp. 10.000.000 – Rp, 25.000.000	0,60
				3. Bernilai kurang dari Rp. 10.000.000	0,30
				4. Tidak ada	0,10
7.	Luas lantai bangunan	1,00	0,30	1. < 50 m <sup>2</sup>	0,10
				2. 50 m <sup>2</sup> - 75 m <sup>2</sup>	0,30
				3. 75 m <sup>2</sup> - 100 m <sup>2</sup>	0,60
				4. > 100 m <sup>2</sup>	1,00
8.	Jumlah tanggungan keluarga	1,00	0,30	1. Tidak ada	1,00
				2. 1 jiwa	0,80
				3. 2 jiwa	0,60
				4. 3 jiwa	0,50
				5. 4 jiwa	0,30
				6. 5 jiwa	0,20
				7. Lebih dari 5 jiwa	0,10
9.	Jenis lantai	1,00	0,30	1. Granit	1,00
				2. Keramik	0,80
				3. Cor-an	0,50
				4. Papan	0,30
				5. Tanah	0,10
10.	Jenis dinding	1,00	0,30	1. Tembok kualitas baik	1,00
				2. Tembok lama/ belum plester	0,60

No	Parameter	Indeks	Bobot	Keterangan	Indeks Terintegrasi
				3. Kayu/papan	0,30
				4. Bambu/rotan	0,10
11.	Jenis atap	1,00	0,30	1. Beton/genteng beton	1,00
				2. Keramik genteng	0.80
				3. Genteng tanah liat	0,60
				4. Asbes	0.40
				5. Seng	0,20
				6. Ijuk/rumbia/sejenis	0,10
12.	Sumber air minum	1,00	0,10	1. Air kemasan bermerk	1,00
				2. Air Isi ulang	0.80
				3. PDAM dan sejenisnya	0,60
				4. Sumur milik umum	0.40
				5. Sumur milik sendiri	0,20
				6. Air sungai/hujan	0,10
13.	Daya listrik terpasang	1,00	0,10	1. Lebih dari 1.300 watt	1,00
				2. 1.300 watt	0.80
				3. 900 watt	0,50
				4. 450 watt	0.30
				5. Tanpa meteran/ Listrik numpang	0,10
14.	Bahan bakar/ energy utama untuk memasak	1,00	0,10	1. Listrik	1,00
				2. Gas 12 Kg	0,60
				3. Gas 3 Kg	0,30
				4. Kayu bakar/arang	0.10
15.	Penggunaan fasilitas tempat	1,00	0,10	1. Milik sendiri dengan kualitas baik	1,00

No	Parameter	Indeks	Bobot	Keterangan	Indeks Terintegrasi
	buang air besar			2. Milik sendiri dengan kualitas sedang	0,80
				3. Milik sendiri dengan kualitas jelek	0,50
				4. Fasilitas umum/ bersama	0,30
				5. Tidak ada	0,10
16.	Keluarga yang sakit kronis/ menahun/ODGJ	1,00	0,30	1. > 3 orang	0,10
				2. 2 orang	0,30
				3. 1 orang	0,60
				4. Tidak ada	1,00

Sumber: Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

**Tabel. 3.3.**  
**Perhitungan indeks komulatif**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Parameter	Indeks	X	Bobot	X	Indeks terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Keterangan
1.	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1,00	x	0,50	x	1,00	=	0,50	Milik Sendiri
2.	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	1,00	x	0,50	x	1,00	=	0,50	Milik Sendiri
3.	Penghasilan rata-rata satu keluarga/bulan	1,00	x	0,50	x	0,10	=	0,05	Kurang dari Rp. 1.000.000,-
4.	Jenis dan luas lahan produktif	1,00	x	0,40	x	0,10	=	0,04	Tidak Ada
5.	Kepemilikan kendaraan bermotor	1,00	x	0,40	x	0,30	=	0,12	Punya 1 motor dg kapasitas 125 cc
6.	Kepemilikan asset lainnya (hewan ternak, emas, dan perlengkapan rumah tangga)	1,00	x	0,40	x	0,30	=	0,12	Bernilai kurang dari Rp. 10.000.000

No	Parameter	Indeks	X	Bobot	X	Indeks terintegrasi	=	Indeks Kumulatif	Keterangan
7.	Luas lantai bangunan	1,00	x	0,30	x	0,60	=	0,18	Luas lantai bangunan 80 m <sup>2</sup>
8.	Jumlah tanggungan keluarga	1,00	x	0,30	x	0,50	=	0,15	3 Jiwa
9.	Jenis lantai	1,00	x	0,30	x	0,50	=	0,15	Cor-an
10.	Jenis dinding	1,00	x	0,30	x	0,30	=	0,09	Papan
11.	Jenis atap	1,00	x	0,30	x	0,20	=	0,06	Seng
12.	Sumber air minum	1,00	x	0,10	x	0,20	=	0,02	Sumur milik sendiri
13.	Daya listrik terpasang	1,00	x	0,10	x	0,30	=	0,03	450 Watt
14.	Bahan bakar/energi utama untuk memasak	1,00	x	0,10	x	0,30	=	0,03	Gas 3 Kg
15.	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar (BAB)	1,00	x	0,10	x	0,50	=	0,05	Milik sendiri dg kualitas jelek
16.	Keluarga yang sakit kronis/menahun/ODGJ	1,00	x	0,30	x	0,60	=	0,18	ODGJ satu orang
								2,27	

Sumber: Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

### 3.3.4. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Aplikasi SIMAPAN di Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor: 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 pada 16 Juni 2022, yang menetapkan tiga tingkatan kemiskinan, yaitu Sangat Miskin, Miskin, dan Rentan Miskin.

## **1. Sangat Miskin**

Sangat miskin merujuk pada tingkat kemiskinan yang sangat parah dan ekstrem. Individu atau keluarga yang dikategorikan sebagai sangat miskin biasanya mengalami kondisi kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan kesulitan ekstrem. Faktor utama yang menandai kondisi ini termasuk pendapatan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Orang-orang yang sangat miskin sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat, dengan tingkat ketidakstabilan yang tinggi. Mereka mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau akses ke sumber daya produktif, dan sering kali hidup di lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat. Upaya untuk mengatasi kondisi sangat miskin melibatkan program-program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung dan berkelanjutan kepada individu atau keluarga tersebut. Pendekatan ini mencakup kebijakan dan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk membantu keluar dari lingkaran kemiskinan, menciptakan keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

## **2. Miskin**

Miskin adalah suatu kondisi sosial dan ekonomi di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Kondisi kemiskinan dapat mencakup keterbatasan akses terhadap pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang aman dan produktif. Tingkat kemiskinan dapat diukur berdasarkan pendapatan, dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di

bawah batas kemiskinan dianggap sebagai miskin. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor tetapi tidak terbatas pada kurangnya kesempatan ekonomi, ketidaksetaraan, atau faktor-faktor struktural seperti kebijakan yang tidak mendukung. Kemiskinan juga dapat bersifat relatif, tergantung pada konteks ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Penanggulangan kemiskinan melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kondisi hidup mereka yang berada dalam kemiskinan. Upaya ini dapat mencakup bantuan sosial, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengurangi ketidaksetaraan.

### **3. Rentan Miskin**

Rentan miskin merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki risiko tinggi untuk terjerumus ke dalam kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka mungkin tidak sepenuhnya miskin, tetapi berada pada posisi yang rentan dan dapat dengan mudah terkena dampak buruk yang dapat menyebabkan penurunan kondisi ekonomi mereka. Faktor-faktor yang membuat seseorang atau kelompok rentan miskin bisa bervariasi, termasuk pekerjaan yang tidak tetap, keterbatasan keterampilan atau pendidikan, ketidakstabilan lingkungan ekonomi, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan. Selain itu, perubahan dalam kondisi kesehatan, peristiwa bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah juga dapat membuat individu atau kelompok menjadi rentan terhadap kemiskinan. Penanganan terhadap penduduk rentan miskin melibatkan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial mereka. Ini bisa mencakup program pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat

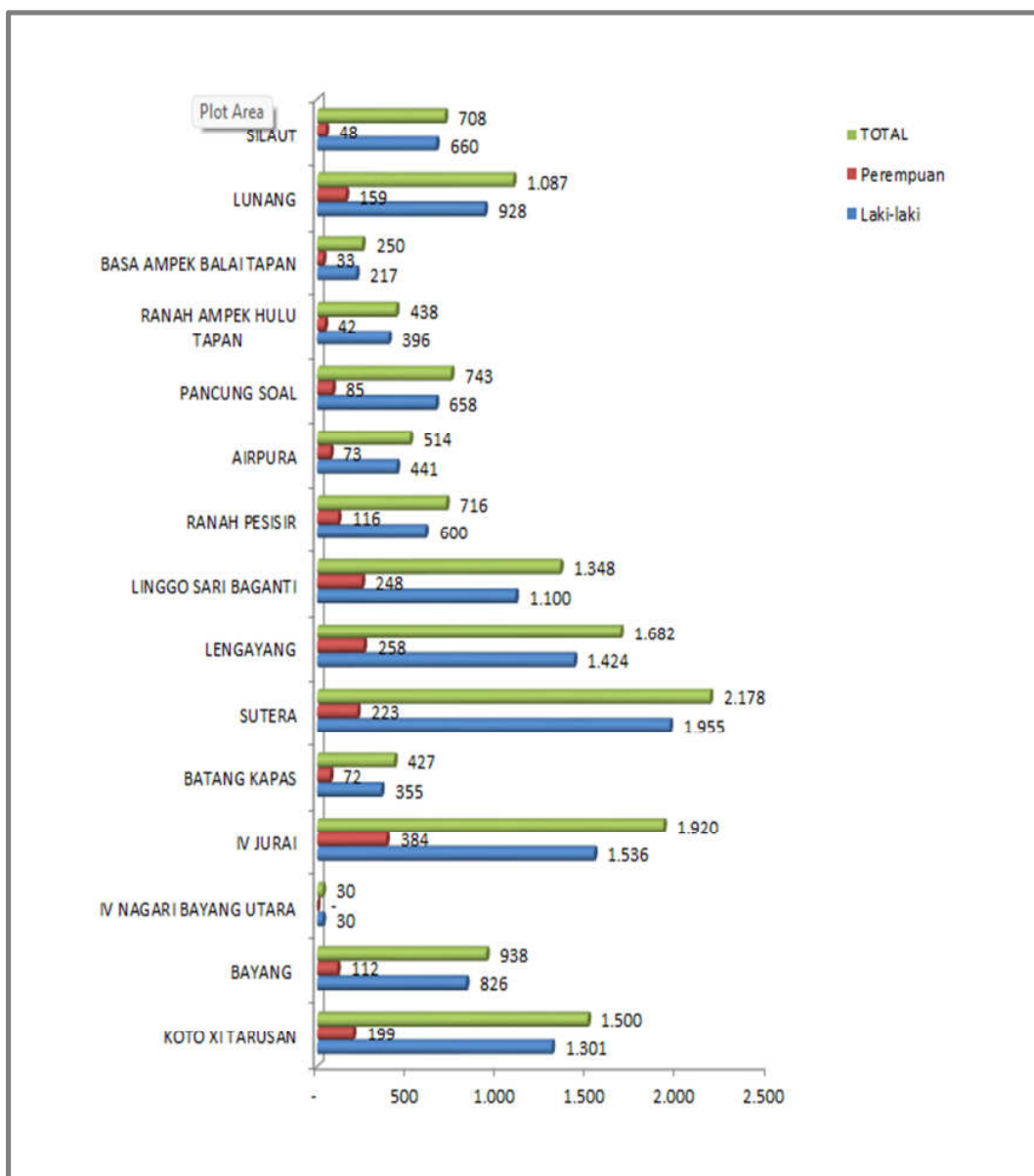
seseorang atau kelompok menjadi rentan miskin, pihak berwenang dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari terhadap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 yang terdiri dari 2.170 Kepala Keluarga melalui Aplikasi SIMAPAN bulan Juli 2024, dapat ditetapkan hasil sebagai berikut:

1. Data penduduk yang tergolong sangat miskin yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari melalui Aplikasi SIMAPAN per Juli 2024 sudah tidak ditemukan lagi data penduduk dengan kriteria sangat miskin (miskin ekstrem).
2. Data penduduk yang tergolong Miskin per Juli 2024 berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 6.392 Kepala Keluarga yang terdiri dari Kepala Keluarga dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 5.584 KK dan Kepala Keluarga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 808 KK. Sedangkan data penduduk yang tergolong Miskin berdasarkan jumlah jiwa ada sebanyak 27.706 Jiwa (Laki-Laki = 14.029 jiwa dan Perempuan 13.677 jiwa), data ini tersebar pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Data penduduk yang tergolong Rentan Miskin per Juli 2024 berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebanyak 8.087 Kepala Keluarga yang terdiri dari Kepala Keluarga dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 6.843 KK dan Kepala Keluarga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.244 KK. Sedangkan data penduduk yang tergolong rentan miskin berdasarkan jumlah jiwa ada sebanyak 34.684 jiwa (Laki-Laki = 17.432 jiwa dan Perempuan 17.252 jiwa), data ini juga tersebar pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

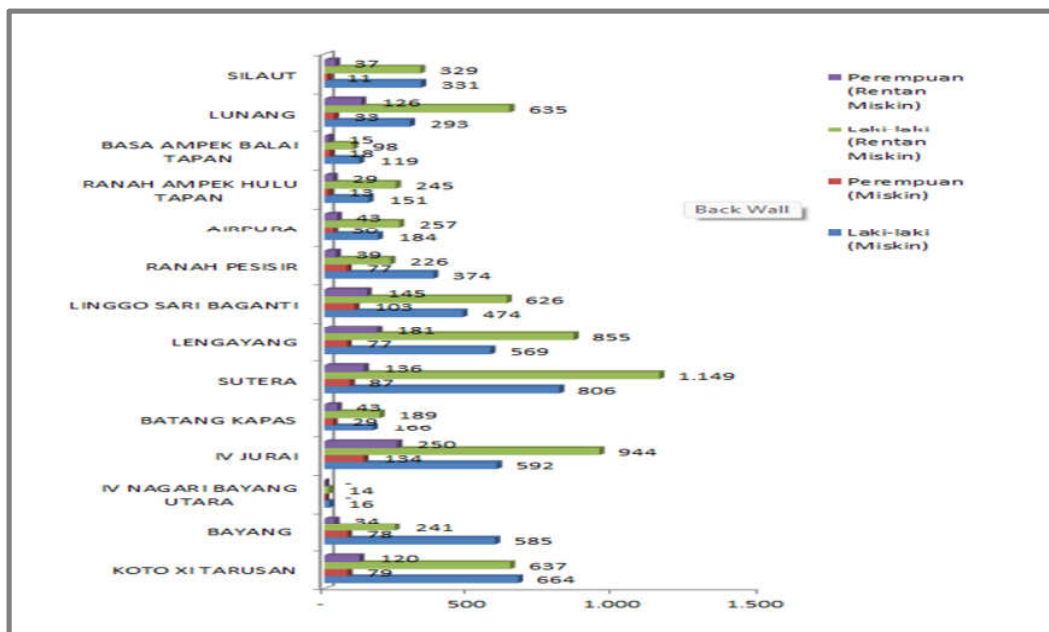
4. Jika ditinjau dari data penduduk miskin dan rentan miskin dapat ditetapkan sebesar 14.479 KK (Laki-laki = 12.427 dan Perempuan = 2.052) atau ditetapkan sebesar 62.390 Jiwa (Laki-Laki = 31.461 jiwa dan Perempuan = 30.929).
5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.10.**  
**Rekapitulasi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Kepala Keluarga**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**

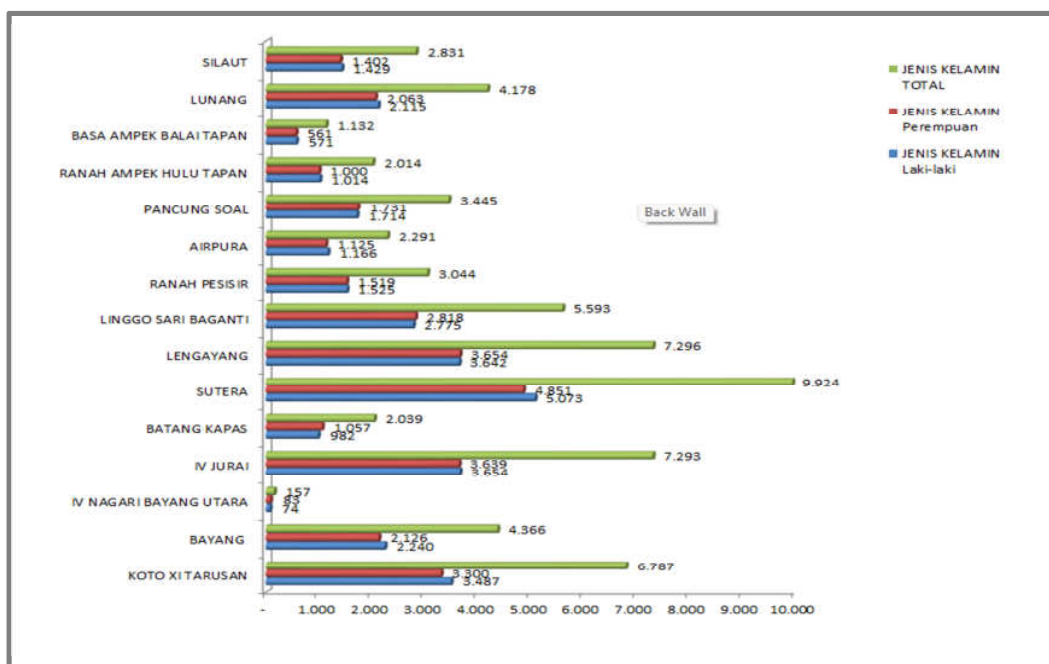


Sumber: Aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat)

**Gambar 3.11.**  
**Distribusi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**

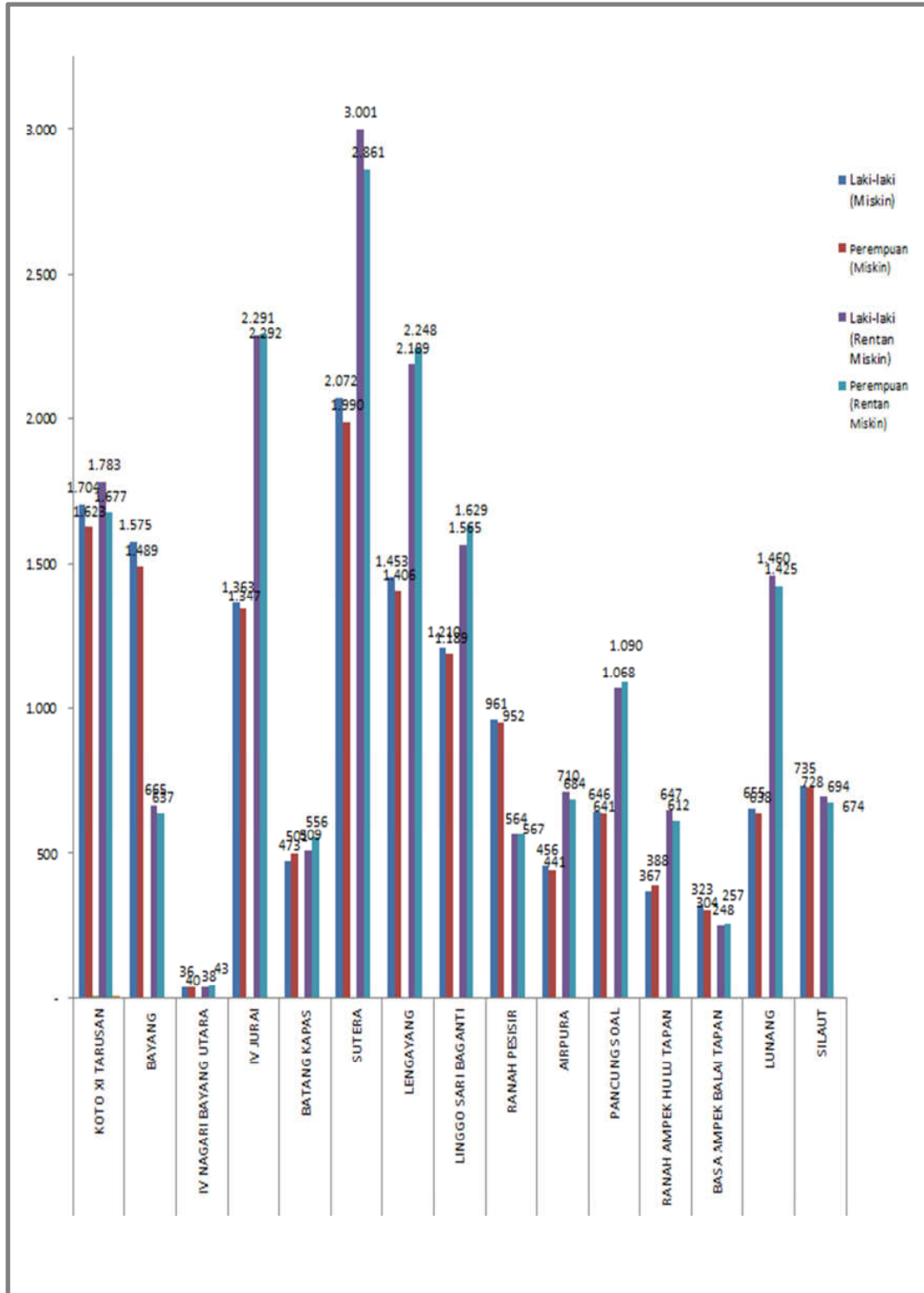


**Gambar 3.12.**  
**Rekapitulasi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Jumlah Jiwa**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**



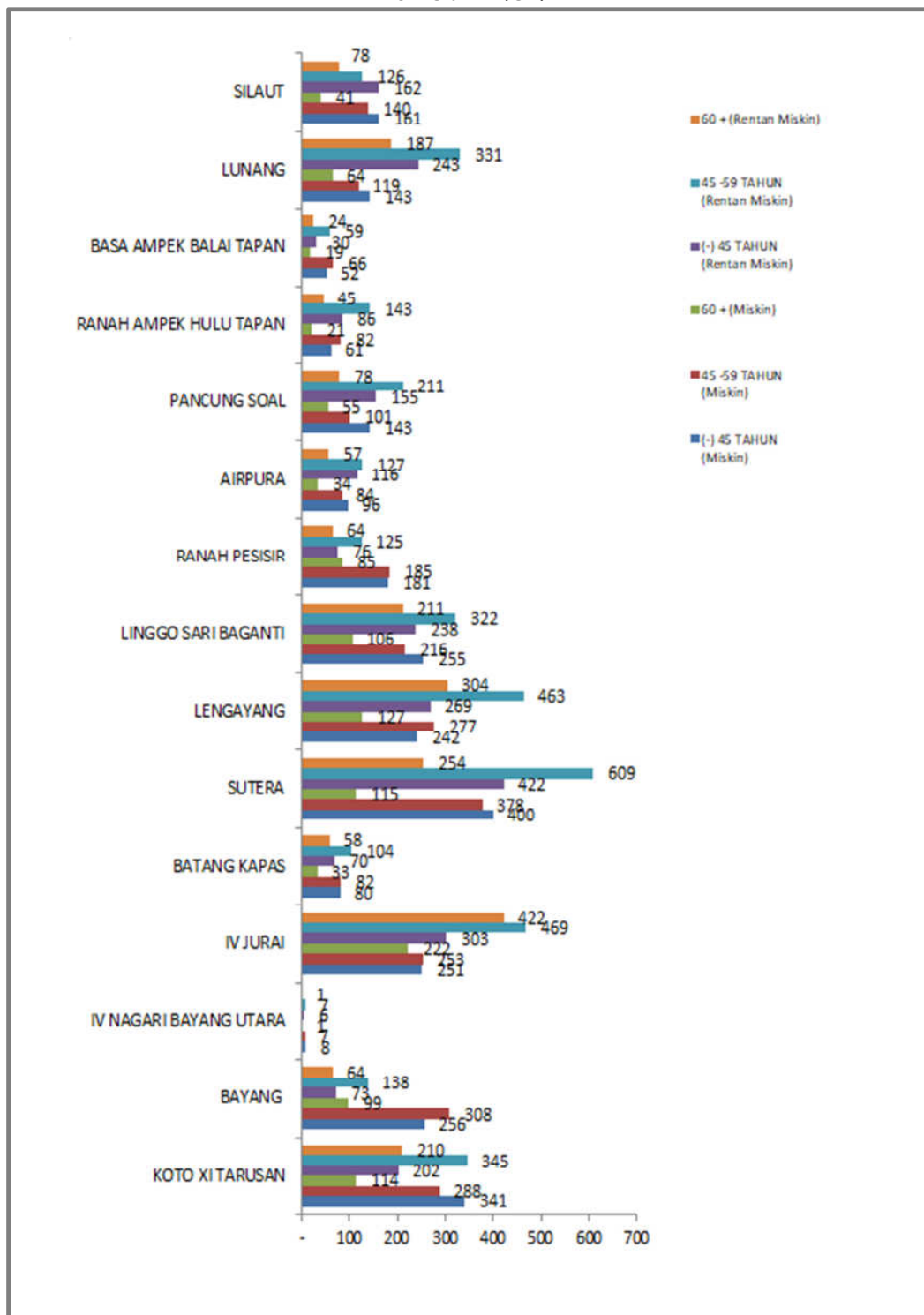
Sumber: Aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat)

**Gambar 3.13.**  
**Distribusi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Jumlah Jiwa dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**



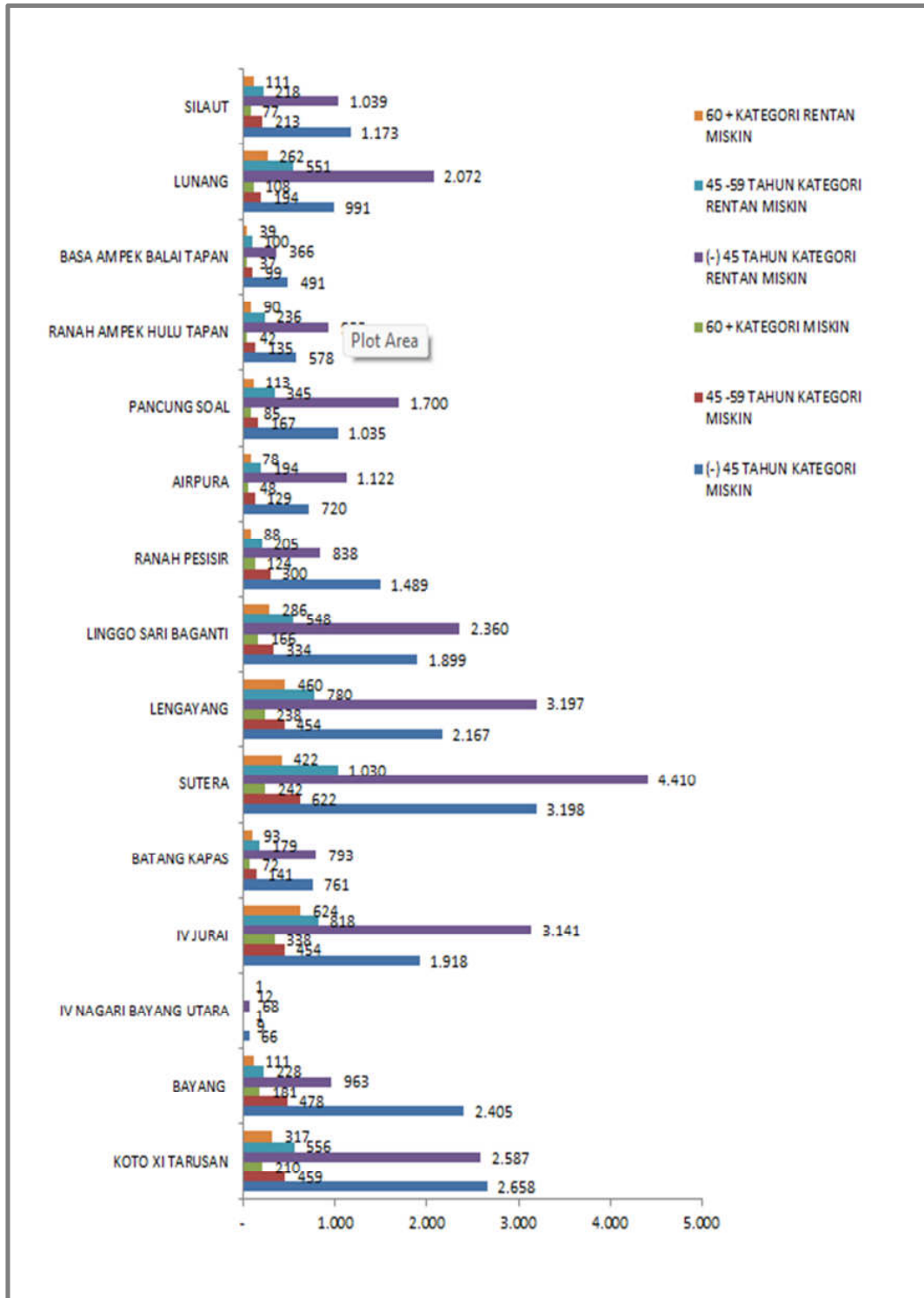
Sumber: Aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat)

**Gambar 3.8.**  
**Distribusi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Kepala Keluarga dan Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**



Sumber: Aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat)

**Gambar 3.9.**  
**Distribusi Penduduk Miskin dan Rentan Miskin**  
**Berdasarkan Jumlah Jiwa dan Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Per Juli 2024**



Sumber: Aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

Analisa kondisi kemiskinan didasari oleh kondisi umum daerah dan kondisi eksisting kemiskinan yang di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disusun arah kebijakan, strategi, program, dan indikator penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

#### **4.1 Arah Kebijakan**

Sesuai dengan kondisi wilayah dan profil kemiskinan, maka arah kebijakan mengarah pada permasalahan sebagai berikut;

##### **4.1.1 Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

Memfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Mengingat potensi sungai yang panjang, pengembangan irigasi dan perikanan darat perlu menjadi prioritas. Luas lahan perkebunan yang signifikan juga perlu dioptimalkan dengan program pemberdayaan petani dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Arah kebijakan harus mempertimbangkan konteks spesifik Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi.

##### **4.1.2 Peningkatan Infrastruktur dan Akses**

Meningkatkan aksesibilitas ke wilayah terpencil dan terisolir melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan komunikasi. Ini penting untuk mempermudah akses ke pasar dan layanan publik, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan peluang ekonomi. Fokus bukan hanya pada pengurangan angka kemiskinan (PO), tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan, dll.) dan pemberdayaan ekonomi, inilah arah kebijakan dalam hal infrastruktur dan akses dari segi hubungan antar kewilayahan.

##### **4.1.3 Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana,**

Mengurangi dampak bencana alam melalui program mitigasi bencana yang komprehensif, termasuk sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang rawan bencana (gempa, tsunami, banjir, longsor) memerlukan perhatian khusus dalam hal ini.

##### **4.1.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sektor pendidikan menjadi sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang Mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang terdaftar di berbagai jenjang pendidikan. Penurunan APK di beberapa jenjang menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan. Angka Putus

Sekolah(APK) dimana tingkat putus sekolah yang tinggi pada usia tertentu menunjukkan masalah dalam mempertahankan siswa di dalam sistem pendidikan. Angka Melek Huruf (Indeks Literasi) dimana tingkat melek huruf yang tinggi menandakan keberhasilan pendidikan dasar, namun penurunan di tahun tertentu perlu dicermati. Analisis terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) menunjukkan fluktuasi, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2020 (62,30%) namun mengalami penurunan hingga 59,80% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di usia dini, yang penting untuk fondasi pendidikan selanjutnya.

Untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI), APK menunjukkan angka 109,76% pada tahun 2023, di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun, keberadaan siswa di luar rentang usia yang sesuai menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan penerimaan siswa. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, terdapat peningkatan yang menggembirakan dari 84,82% di tahun 2019 menjadi 91,25% pada tahun 2023, mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi, kondisi di jenjang SMA/MA menunjukkan penurunan signifikan dengan APK yang menurun menjadi 84,31% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan keterlibatan siswa di tingkat pendidikan menengah.

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan meningkatkan daya saing masyarakat dan membuka peluang kerja yang lebih baik, sehingga secara fiskal persentase anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sangat penting. Idealnya, alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari total anggaran.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan juga menunjukkan kemajuan, namun dengan tantangan yang masih ada. Usia harapan hidup meningkat dari 70,73 tahun pada tahun 2019 menjadi 71,52 tahun pada tahun 2023. Namun, angka kematian bayi dan angka kematian ibu masih menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Angka kematian bayi meningkat menjadi 11/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023, serta angka kematian ibu yang menunjukkan angka 138 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator gizi balita juga menunjukkan perbaikan, meskipun persentase balita gizi buruk tetap menjadi tantangan. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program kesehatan yang ada.

#### 4.1.5 Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Memberikan jaring pengaman sosial yang memadai bagi masyarakat miskin dan rentan, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), program kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya. Meski demikian penyebab fluktuasi kemiskinan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Perubahan garis kemiskinan perlu dipertimbangkan dalam strategi ini.

## **4.2 Strategi Pembangunan**

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, kabupaten perlu merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi yang dihadapi, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil,

### **4.2.1 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah**

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan yang berfokus pada pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mencari sumber pembiayaan otonom. Penting juga untuk melakukan pemetaan yang akurat terhadap kebutuhan masyarakat untuk memastikan alokasi dana pembangunan tepat sasaran. Ini akan membantu menghindari proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

### **4.2.2 Diversifikasi Sumber Pendanaan**

Mendorong inisiatif untuk mengembangkan sumber pendanaan lokal, seperti pajak daerah dan retribusi, serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian finansial. Alternatif pembiayaan dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang strategis. Ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

### **4.2.3 Fokus pada Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal dengan mengimplementasikan program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pelatihan keterampilan dan akses ke pasar.

### **4.2.4 Pengembangan Infrastruktur**

Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.

### **4.2.5 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan Masyarakat dalam Proyek Pembangunan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi. Demikian juga Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### 4.2.5 Evaluasi dan Monitoring

Pengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak dari proyek pembangunan. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 4.3 Prioritas Program Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Setiap daerah memiliki karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda. Prioritas program memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih relevan dengan kondisi lokal. Sehingga perencanaan semestinya menetapkan prioritas, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, memastikan bahwa anggaran digunakan untuk program yang memberikan dampak maksimal.

Pembangunan untuk masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan, serta memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan lintas sektor *crosscutting*. Sehingga program-program harus sinergis antara berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kemudian dari segi pemerintah dengan perencanaan yang menetapkan prioritas, pelaksana pemerintahan dapat lebih mudah mengukur dan mengevaluasi hasil dari program yang dijalankan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial, termasuk dampak dari kebijakan nasional atau global. Dari segi kepercayaan dengan prioritas yang jelas dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya prioritas disajikan dalam Tabel 4.1 Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dan Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Arah Kebijakan Strategi Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

SASARAN / VISI RPJPD 2025-2045	KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGII	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MENGACU PADA KEMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Kemiskinan dan Ketimpangan berkurang	Peningkatan akses pelayanan dasar dengan Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial kepada Perlindungan Sosial yang Adaptif	Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin/Keluarga miskin dengan Potensi Lokal	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Peningkatan Infrastruktur dan Akses	Pembangunan infrastruktur dan akses/konektivitas pada nagari-nagari prioritas penanganan kemiskinan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Pengurangan Kerentanan terhadap Bencana	Melaksanakan Fasilitasi Desa (Nagari) Tangguh Bencana (Destana) terutama di lokasi-lokasi prioritas penanganan kemiskinan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	1 Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan usaha lokal, atau peluang kerja	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

SASARAN / VISI RPJPD 2025-2045	KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGII	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
		Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan, dengan penyediaan kebutuhan pokok; pengembangan sistem jaminan sosial; dan pengembangan budaya usaha.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISISLI/KABUPATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISISLI/KABUPATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

SASARAN / VISI RPJPD 2025-2045	KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGII	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MENGACU PADA KEMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI	ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISILI/KABUPATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				DISDUKCAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			(2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			(3) Peningkatan akses infrastruktur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SASARAN / VISI RPJPD 2025-2045	KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGII	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MENGACU PADA KEMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
			pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas;	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			(4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			(5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan;	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				BPKPAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			(6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

**Tabel 4.2 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi tanpa keluar daerah	Jumlah keluarga yang bekerja tanpa harus keluar daerah/domisili keluarganya dibagi jumlah seluruh keluarga miskin dalam suatu daerah dikali 100%	na	50	65	80	95	100	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Desa (Km/Tahun)	Panjang Jalan yang dibangun dalam satu tahun pada nagari dengan kriteria	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
		kemiskinan									
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Panjang Jalan yang dibangun dalam satu tahun pada nagari dengan kriteria kemiskinan	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Nagari Tanggung Bencana Madya terhadap nagari nagari dengan prioritas penanggulang an kemiskinan	Jumlah Nagari Tanggung Bencana Madya dibagi terhadap jumlah seluruh nagari nagari dengan prioritas penanggulanga n kemiskinan dikali 100% (assesment dengan Perka BNPB 1 Tahun 2012)	na	15	20	35	65	90	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			na	15	20	35	65	90	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus	Jumlah siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus dibagi seluruh	NA	80	90	95	97	100	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKER JAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
	sekolah vokasi	siswa dari keluarga miskin yang sudah lulus sekolah vokasi dikalikan 100%									
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%) = Jumlah seluruh penduduk yang pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dibawah Garis kemiskinan: Rp 556.874 per kapita per bulan di bagi jumlah penduduk kali 100%	7,34	4,57	3,57	2,57	1,57	0,57	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya bantuan untuk fakir miskin	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan pemerintah							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Perjanjian Kerjasama dengan pemakai kerja.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah (TKPK) dengan perusahaan yang membutuhkan pekerjaan dengan kualifikasitentent u.							Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Jumlah UMKM yang terbina dari segi SDM Produksi, modal dan pasca produksi	Persentase UMKM dari keluarga Miskin terbina dan jumlah Keluarag miskin yang ber UMKN							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKER JAAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk miskin terhadap seluruh penduduk miskin (%)	Jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan dibagi Total Jumlah penduduk miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	ada di DINAS KESEHATAN	86,16	90	96	98	100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN,
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan (Usia Dini ) tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase, (%)	59,8	67,64	75,48	83,32	91,16	99,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SD/MI	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan (Dasar) tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase, (%)	109,76	107,86	105,96	104,06	102,16	100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APK SMP/MTs	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan (SMP/MTs) tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase, (%)	91,25	93,00	94,75	96,50	98,25	100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
										Menengah Pertama	KEBUDAYAAN
ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISILI/KABU PATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN	APK SMA/MA	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan (SMA/MA ) tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase, (%)	84,31	87,45	90,59	93,73	96,87	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI	persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (SD/MI) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan	99,42	99,54	99,66	99,78	99,9	100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
										Sekolah Dasar	
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APM SMP/MTs	persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (SMP/MTs) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan	80,73	83,23	85,73	88,23	90,73	93,23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISILI/KABU PATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN	APM SMA/MA	persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (SMA/MA) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan	65,03	67,78	70,53	73,28	76,03	78,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD/MI	persentase atau jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari total jumlah siswa yang terdaftar.	0,2	0,17	0,14	0,11	0,08	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persentase atau jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari total jumlah siswa yang terdaftar.	1,35	1,02	0,69	0,36	0,03	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ARAH DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEWENANGAN PROPINSI, SISWA/WARGA MISKIN YANG BERDOMISILI/KABU PATEN PESISIR SELATAN PERLU INTERVENSI KABUPATEN	Angka Putus Sekolah SMA/MA	persentase atau jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dari total jumlah siswa yang terdaftar.	2,46	2,31	2,16	2,01	1,86	1,71			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Angka Melek Huruf	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.	98,95	57,35	58,42	59,49	60,56	61,63	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Angka Melek Numerik	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan dasar berhitung dan memahami konsep matematika	na	44,12	45,77	47,42	49,07	50,72	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
		sederhana.									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal.	8,58	8,88	9,66	10,44	11,22	12,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,36	13,4	13,557	13,714	13,871	14,028	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Barkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (diploma,		13,38	13,481	13,581	13,682	13,783	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
		sarjana, magister, atau doktor).									
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Proporsi pekerja yang memiliki ijazah pendidikan menengah tinggi (SMA/SMK/MA atau sederajat) dan bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan menengah hingga tinggi, sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.		74,9	75,275	75,65	76,025	76,4	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJ AAN

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Penduduk miskin terhadap seluruh penduduk miskin (%)	Jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta Jaminan Sosial dibagi Total Jumlah penduduk miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%		31,87	34,87	37,87	40,87	43,87	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJ AAN
									Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN KETENAGAKERJ AAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Sekolah yang aman bencana (%)	Jumlah sekolah yang aman bencana menurut perka- no-4-tahun-2012-tentang-	NA	30	45	70	90	100	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
		pedoman-penerapan-sekolah-madrasah-2108.pdf dibagi jumlah seluruh sekolah yang dipakai.									
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Siswa yang Mendapatkan sarana transportasi khusus peserta didik (%)	Jumlah Pesorata didik yang menggunakan transportasi khusus yang disediakan	NA	2	5	9	12	15	Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	DISHUB

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
		pemerintah dibagi seluruh peserta didik										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Kebutuhan air kisaran 60-150 liter/orang/hari		0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
									Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
	2. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar air baku/air minum bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memiliki sarana air minum layak dibagi Total Jumlah keluarga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?						100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
									Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	dibangun	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3. Cakupan infrastruktur pelayanan MCK bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memiliki sarana MCK layak dibagi Total Jumlah keluarga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?					100	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4. Cakupan infrastruktur Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memiliki rumah layak huni dibagi Total Jumlah rumah keluarga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?					100	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
									Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
									Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
									Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5. Cakupan jaringan listrik rumah tangga/eluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang memiliki aliran listrik dibagi Total Jumlah rumah keluarga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?						100	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6. Cakupan akses jalan bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan akses jalan dibagi Total Jumlah rumah keluarga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?						100	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga miskin pada suatu wilayah (%)	Jumlah Rumah Layak Huni pada rumah tangga miskin dibagi Total Jumlah rumah rumah tangga miskin dalam satu wilayah dikalikan 100%	data p3ke ?						100	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang membantu dalam program-program sosial, serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam perannya	dinsos						182	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
		dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan sosial (orang)									
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2. Mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mencari sumber pembiayaan otonom	Proporsi pembiayaan penanggulangan kemiskinan dari sumber dana transfer terhadap seluruh anggaran penanggulangan kemiskinan ( Dana Penanggulangan Kemiskinan K (100) = Dana Transfer Pusat ( P%) + Dana Lainnya (L%), ) artiya proporsi semakin kecil maka sumber anggaran otonom/ pembiayaan lainnya makin besar.	bpkpad					80	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah pada	Jumlah siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan beasiswa dibagi jumlah keluarga miskin dikalikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					100	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

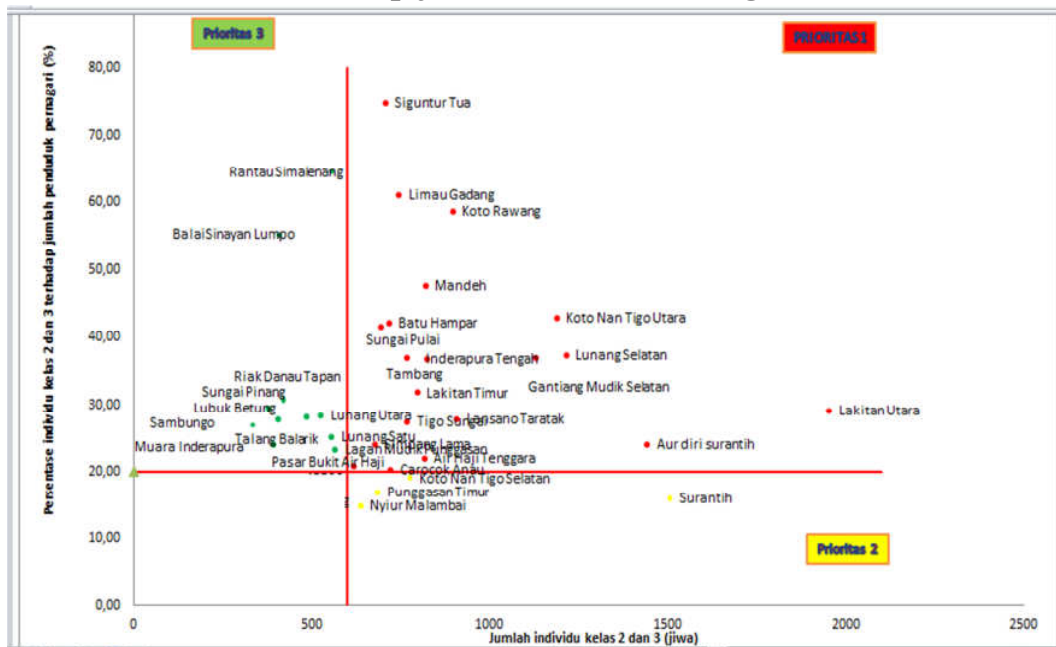
PROGRAM MENGACU PADA KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR	SATUAN / DIFINISI	BASIS DATA	Target					KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			2023/ 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
	suatu wilayah	100%									
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## BAB V LOKASI PRIORITAS

### 5.1. Lokasi Prioritas Bidang Kemiskinan Konsumsi/Ekonomi

Penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan bidang kemiskinan konsumsi/ekonomi dilakukan dengan mengelompokkan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tiga lokasi prioritas. Analisis dilakukan dengan membuat *scatter plot* antara variabel jumlah individu miskin pada sumbu axis (horizontal) dan variabel persentase jumlah individu miskin terhadap jumlah penduduk nagari pada sumbu ordinat (vertikal). Jumlah individu miskin menggunakan data Sistem Informasi Masyarakat Penerima Manfaat (SIMAPAN) dan jumlah penduduk nagari menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 5.1.**  
**Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah individu Kelas II data SIMAPAN**  
**serta Persentase Jumlah Individu Kelas II**  
**terhadap jumlah Penduduk Nagari**



Sumber : Data SIMAPAN dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2024 (data diolah)

Berdasarkan analisis di atas, nagari yang menjadi lokasi prioritas 1 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang kemiskinan konsumsi/ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah nagari dengan jumlah individu Kelas 2 yang banyak (diatas rata-rata nagari) dan persentase jumlah individu Kelas 2 terhadap jumlah penduduk nagari (di atas rata-rata nagari). Nagari yang termasuk kriteria tersebut adalah sebanyak 20 nagari yang tersebar di 8 kecamatan tercantum pada tabel di bawah ini.

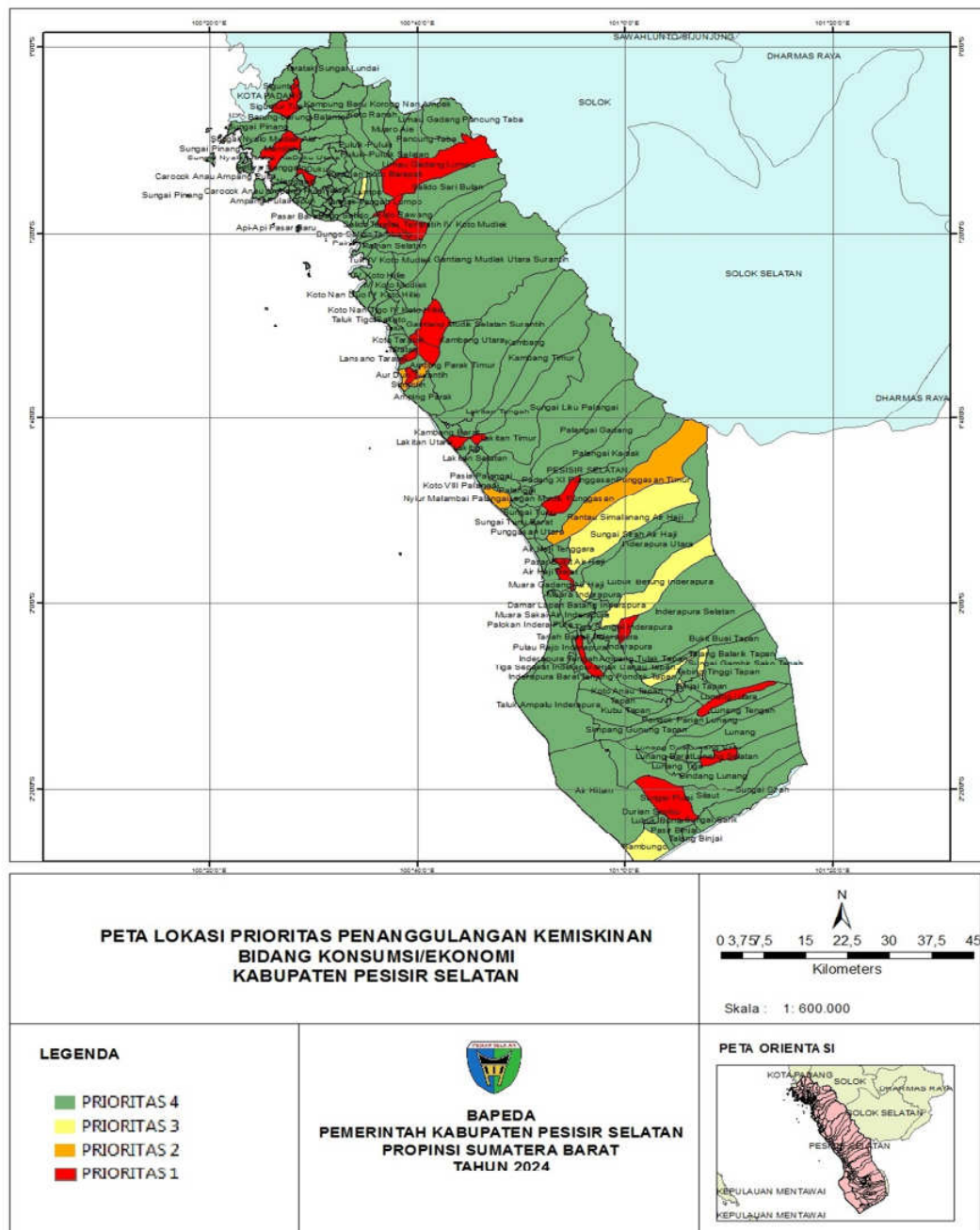
**Tabel 5.1**  
**Lokasi Prioritas 1 Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kemiskinan konsumsi/Ekonomi**

No	Nagari	Kecamatan
1.	Lunang Selatan	Lunang
2.	Lunang Utara	
3.	Sungai Pulai	Silaut
4.	Inderapura Tengah	Pancung Soal
5.	Lagan Mudik	Linggo Sari Baganti
6.	Pasar Bukit	
7.	Air Haji Tenggara	
8.	Lakitan Timur	
9.	Lakitan utara	Lenggayang
10.	Koto Nan Tigo Utara Surantih	
11.	Gantiang Mudik Selatan Surantih	Sutera
12.	Aur Duri	
13.	Lansano	
14.	Tambang	
15.	Koto Rawang	IV Jurai
16.	Limau Gadang Lumpo	
17.	Mandeh	
18.	Batu Hampar	Koto XI Tarusan
19.	Siguntur Tua	
20.	Carocok Anau	

Nagari yang menjadi lokasi prioritas 1 diatas dapat disebut sebagai kantong kemiskinan karena jumlah dan persentase penduduk miskinnya banyak. Sedangkan untuk lokasi prioritas 2 adalah nagari dengan kriteria jumlah individu Kelas 2 banyak, namun persentasenya terhadap jumlah penduduk nagari kecil, dengan jumlah sebanyak 4 nagari. Lokasi prioritas 3 merupakan nagari

dengan jumlah individu kelas 2 sedikit namun persentasenya terhadap jumlah penduduk nagari besar, dengan jumlah sebanyak 10 nagari. Sebaran lokasi prioritas 1-4 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang kemiskinan konsumsi/ekonomi dalam bentuk peta adalah sebagai berikut:

**Gambar 5.2.**  
**Peta Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bidang Konsumsi Ekonomi**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

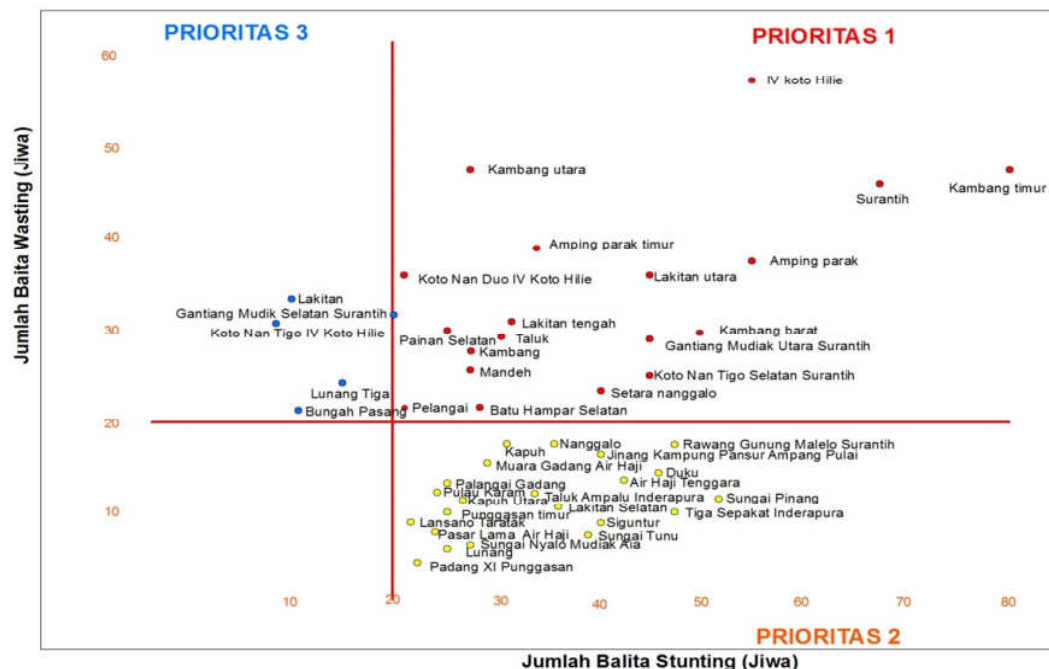


## 5.2. Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan

Sesuai dengan sasaran untuk menurunkan prevalensi balita stunting, maka prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan ditentukan dengan mengelompokkan nagari berdasarkan variabel jumlah balita stunting (sangat pendek dan pendek) dan jumlah balita wasting. Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah.

Pengelompokan dilakukan dengan membuat *scatter plot* antara variabel jumlah balita stunting pada sumbu axis (horisontal) dan jumlah balita wasting pada sumbu koordinat (vertikal). Data yang digunakan adalah data status gizi per nagari tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 5.3**  
**Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah Balita Stunting dan Wasting**  
**Tahun 2024**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (data diolah)

Penentuan lokasi prioritas 1 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisis di atas adalah nagari dengan jumlah balita stunting banyak (di atas rata-rata) dan jumlah balita wasting banyak (di atas rata-rata).

Terdapat 16 nagari pada 6 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas 1 intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2**  
**Lokasi Prioritas 1 Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan**

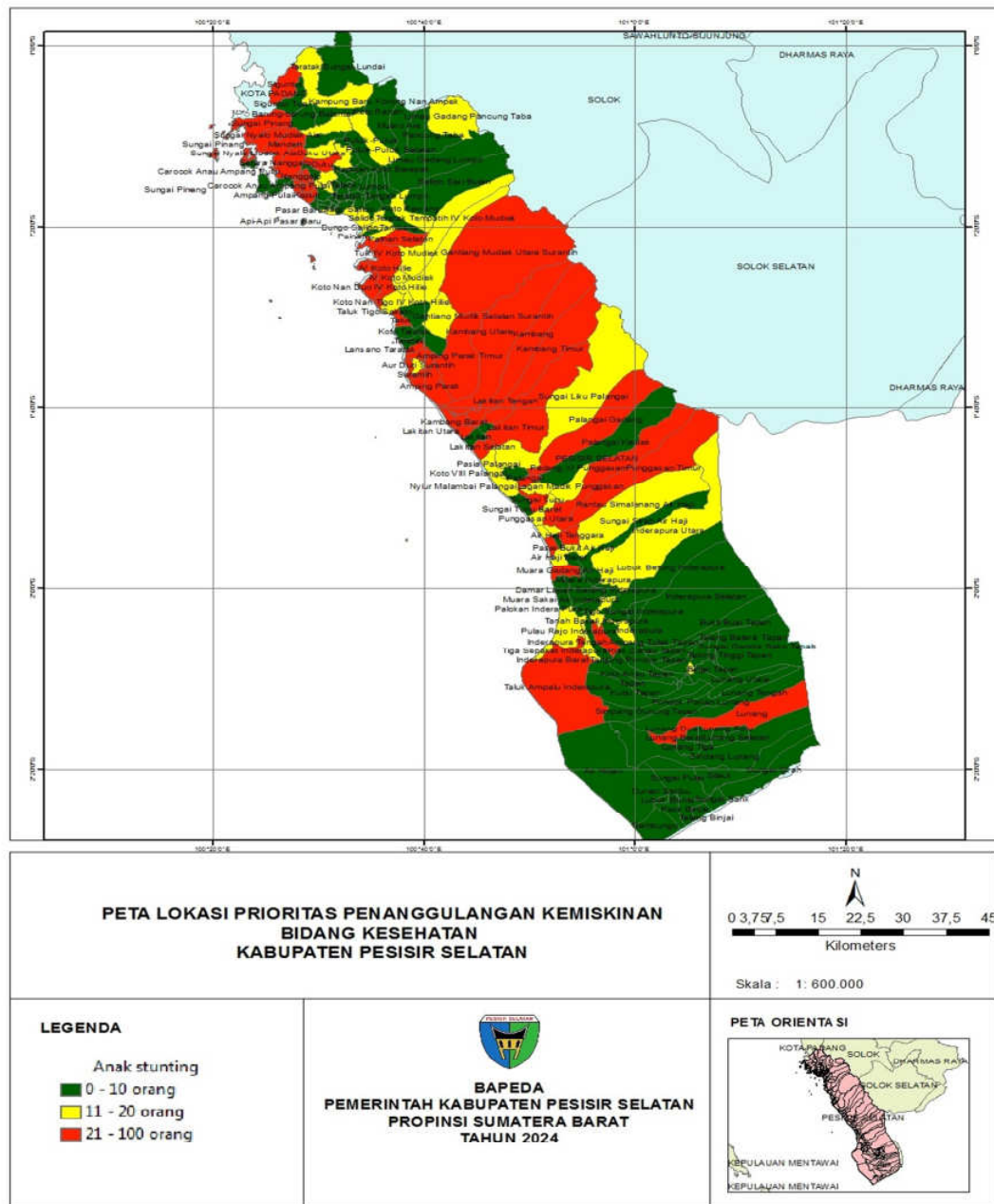
Nagari	Kecamatan
IV koto Hilieh	Batang Kapas
Koto Nan Duo IV Koto Hilieh	
Taluk	
Kambang	Lenggayang
Kambang Utara	
Kambang Timur	
Lakitan Tengah	
Surantih	Sutera
Amping Parak Timur	
Ganting Mudik Utara surantih	
Koto nan tigo selatan surantih	
Pelangai	Ranah Pesisir
Painan Selatan	IV Jurai
Mandeh	Koto XI Tarusan
Setara Nanggalo	
Batu Hampar Selatan	

Lokasi prioritas 2 untuk intervensi penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan adalah nagari dengan jumlah balita stunting banyak (di atas rata-rata) dan jumlah balita wasting sedikit (di bawah rata-rata), yaitu sebanyak 23 nagari. Lokasi prioritas 3 adalah nagari dengan jumlah balita stunting sedikit (di bawah rata-rata) dan jumlah balita wasting banyak (di atas rata-rata), yang terdiri dari 5 nagari. Sedangkan lokasi prioritas 4 adalah

nagari dengan jumlah balita stunting sedikit dan balita wasting juga sedikit.

Sebaran lokasi prioritas 1-4 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dalam bentuk peta adalah sebagai berikut:

**Gambar 5.4.**  
**Peta Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**



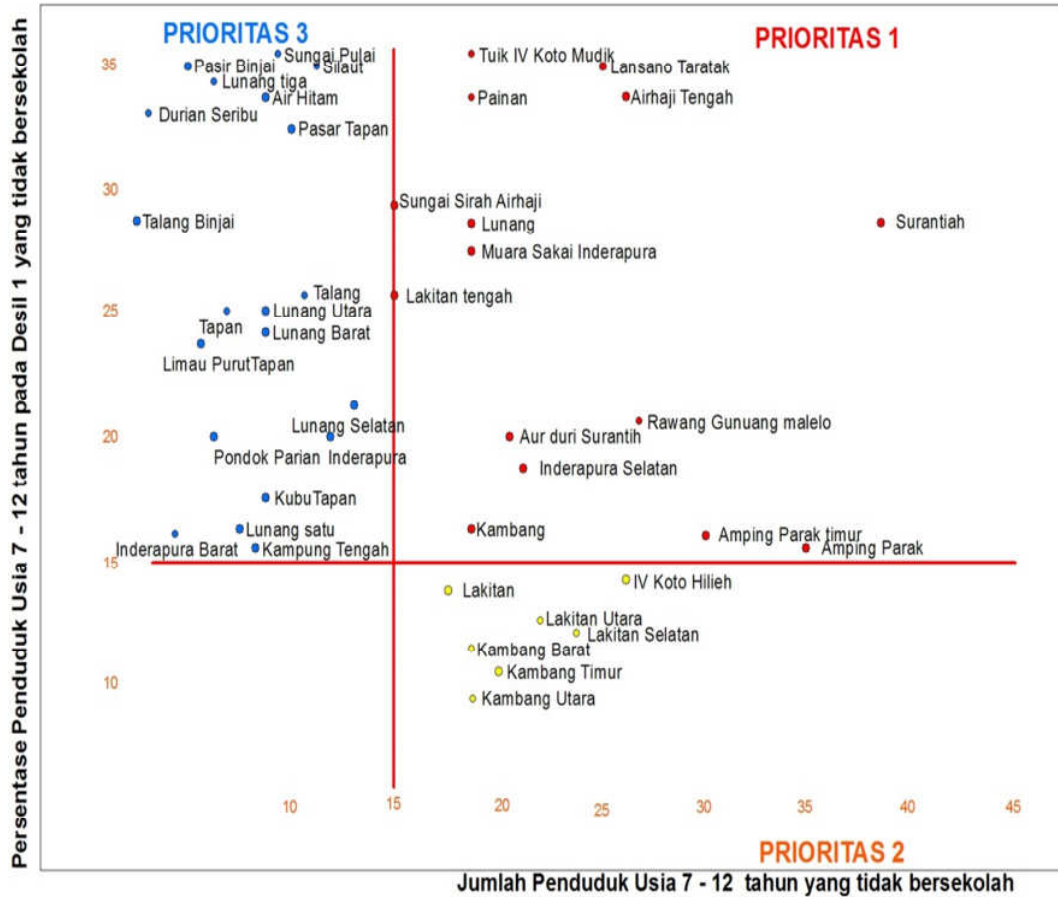
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (data diolah)

### 5.3. Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan

Prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dibedakan atas pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Variabel yang digunakan untuk pengelompokan wilayah prioritas jenjang SD adalah jumlah individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi dan persentase individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi. Sedangkan untuk jenjang SMP digunakan variabel jumlah individu usia 13-15 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi dan persentase individu usia 13-15 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi. Penggunaan variabel tersebut merupakan pendekatan terhadap indikator angka putus sekolah jenjang SD dan SMP yang termasuk indikator program di bidang pendidikan.

Pengelompokan untuk jenjang pendidikan SD dilakukan dengan membuat *scatter plot* antara variabel jumlah individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi pada sumbu axis (horisontal) dan persentase individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi pada sumbu ordinat (vertikal). Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP, dibuat *scatter plot* antara variabel jumlah individu usia 13-15 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi pada sumbu axis (horisontal) dan persentase individu usia 13-15 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah lagi pada sumbu ordinat (vertikal).

**Gambar 5.5.**  
**Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah individu usia 7 – 12 tahun pada kelompok 2**  
**yang belum/tidak bersekolah dan persentase individu usia 7 -12**  
**tahun pada kelompok 2 yang belum/tidak bersekolah.**



Sumber : Data SIMAPAN (data diolah)

Lokasi prioritas 1 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan jenjang SD di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisis di atas adalah nagari dengan jumlah individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah banyak (di atas rata-rata) dan persentase individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah banyak (di atas rata-rata). Nagari yang termasuk kriteria di atas berjumlah 15 nagari yang tersebar di 6 kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

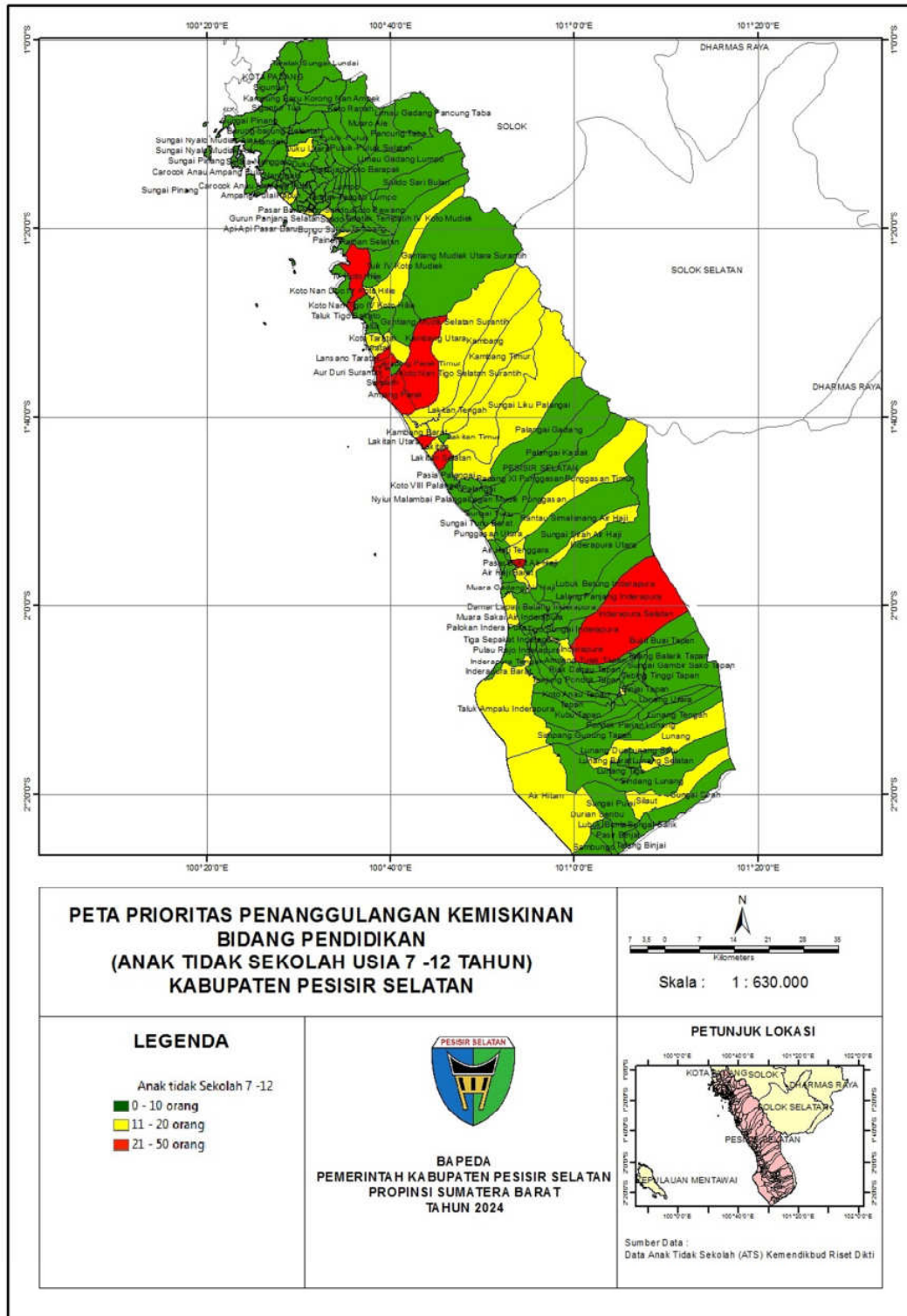
**Tabel 5.3**  
**Lokasi Prioritas 1 Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bidang Pendidikan Jenjang SD sederajat (usia 7 – 12 tahun)**

No	Nagari	Kecamatan
1	Lunang	Lunang
2	Muara Sakai	Pancung Soal
3	Inderapura Selatan	
4	Air haji	Linggo Sari Baganti
5	Sungai Sirah Air haji	
6	Lakitan Tengah	Lenggayang
7	Kambang	
8	Lansano	Sutera
9	surantiah	
10	Rawang Gunung malelo	
11	Aur duri	
12	Amping Parak	
13	Amping Parak Timur	
14	Tuik IV Koto Mudik	Batang Kapas
15	Painan	IV Jurai

Lokasi prioritas 2 untuk intervensi penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan jenjang SD sederajat adalah nagari dengan jumlah individu usia 7-12 tahun pada kelas 1 dan 2 yang belum/tidak bersekolah banyak (di atas rata-rata) dan persentase individu usia 7-12 tahun pada Kelas 1 dan 2 yang belum/tidak bersekolah sedikit (di bawah rata-rata), yaitu sebanyak 7 nagari. Lokasi prioritas 3 adalah nagari dengan jumlah individu usia 7-12 tahun pada kelas 2 dan 3 yang belum/tidak bersekolah sedikit (di bawah rata-rata) dan persentase individu usia 7-12 tahun pada kelas 2 dan 3 yang belum/tidak bersekolah banyak (di atas rata-rata), yang terdiri dari 20 nagari. Sedangkan lokasi prioritas 4 adalah nagari dengan jumlah individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah sedikit (di bawah rata-rata) dan persentase individu usia 7-12 tahun pada desil 1 yang belum/tidak bersekolah juga sedikit (di bawah rata-rata).

Sebaran lokasi prioritas 1 - 3 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan jenjang SD dalam bentuk peta adalah sebagai berikut:

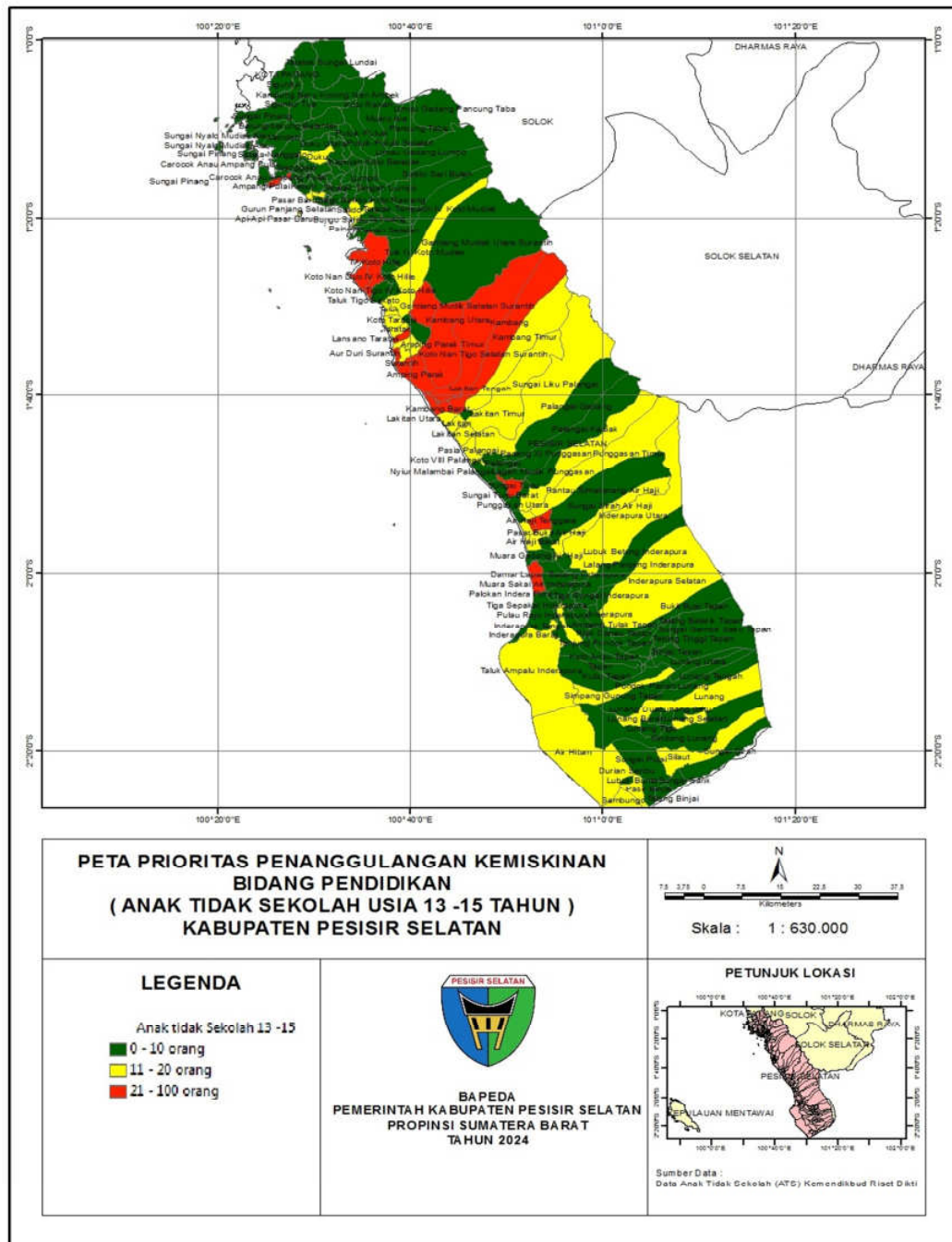
**Gambar 5.6.**  
**Peta Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bidang Pendidikan jenjang SD**



Sumber : Data SIMAPAN (data diolah)

Selanjutnya, hasil pengelompokan nagari untuk penentuan lokasi prioritas intervensi bidang pendidikan jenjang SMP sederajat adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 5.7.**  
**Peta Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah Individu usia 13-15 tahun pada kelompok 2 yang**  
**belum/tidak bersekolah dan persentase Individu usia 13 -15 tahun**  
**pada kelompok 2 yang belum/tidak bersekolah.**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Olahan)

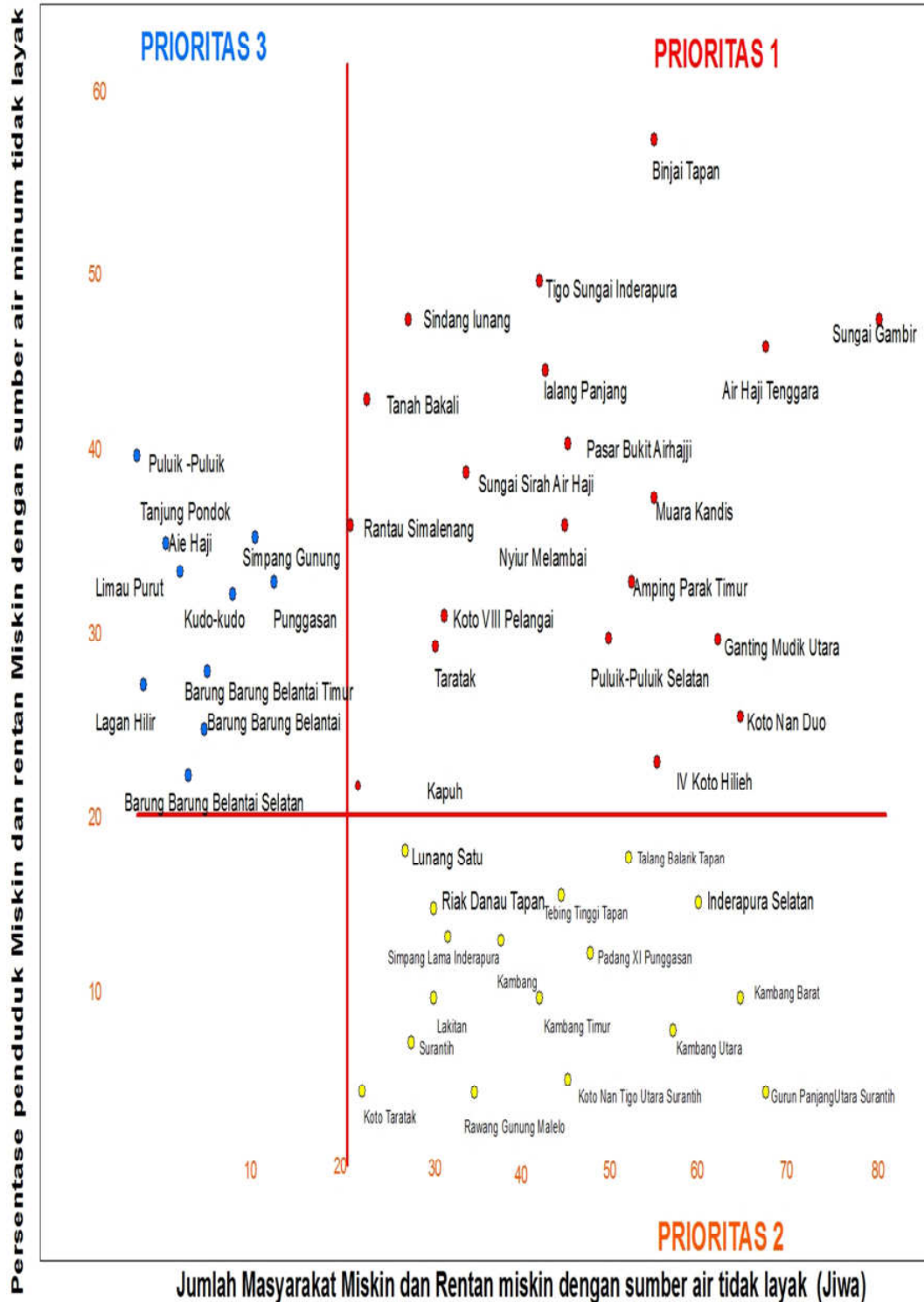
#### 5.4. Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

Prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur terdiri dari prioritas intervensi sub bidang air minum dan sub bidang sanitasi. Pengelompokan wilayah prioritas intervensi sub bidang air minum dilakukan dengan analisis kuadran terhadap variabel jumlah keluarga desil 1 dengan sumber air minum tidak layak dan persentase keluarga desil 1 dengan sumber air minum tidak layak. Sumber air minum tidak layak yaitu air permukaan dan sumur tidak terlindungi.

Sedangkan untuk penentuan wilayah prioritas intervensi sub bidang sanitasi digunakan variabel jumlah keluarga desil 1 yang memiliki akses sanitasi tidak layak dan persentase keluarga desil 1 yang memiliki akses sanitasi tidak layak. Akses sanitasi tidak layak terdiri dari dua kategori yaitu jamban tanpa tangki septik dan lainnya.

Pengelompokan nagari untuk intervensi sub bidang air minum dilakukan dengan membuat **scatter plot** antara variabel jumlah keluarga desil 1 dengan sumber air minum tidak layak pada sumbu axis (horisontal) dan persentase keluarga desil 1 dengan sumber air minum tidak layak pada sumbu ordinat (vertikal). Sedangkan untuk intervensi sub bidang sanitasi dibuat **scatter plot** antara variabel jumlah keluarga desil 1 yang memiliki akses sanitasi tidak layak pada sumbu axis (horisontal) dan persentase keluarga desil 1 yang memiliki akses sanitasi tidak layak pada sumbu ordinat (vertikal). Data yang digunakan adalah data P3KE dan hasil analisisnya adalah sebagaimana gambar di bawah.

**Gambar 5.8.**  
**Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah Keluarga yang memiliki Sumber Air Minum**  
**yang tidak layak dan Persentase Keluarga yang memiliki**  
**Sumber Air Minum yang tidak layak**



Lokasi prioritas 1 intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang air minum di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan gambar di atas adalah nagari yang jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak banyak (di atas rata-rata) dan persentase masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak banyak (di atas rata-rata). Jumlah nagari yang masuk kriteria tersebut adalah sebanyak 20 nagari yang tersebar di 10 kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.**  
**Lokasi Prioritas 1 Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur dasar Kabupaten Pesisir Selatan**

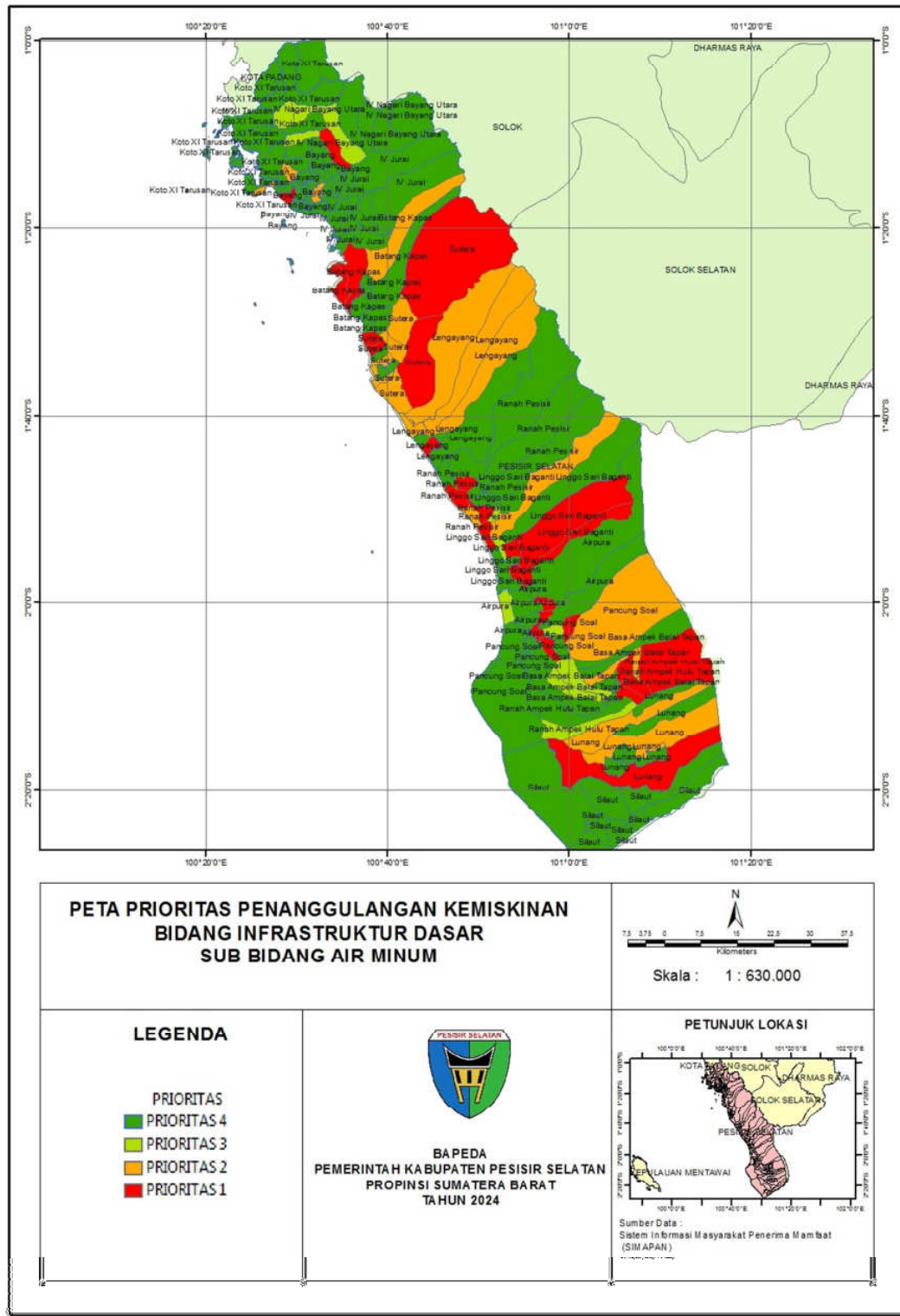
No	Nagari	Kecamatan
1	Sindang Lunang	Lunang
2	Sungai Gambir Sako Tapan	Ranah Ampek Hulu
3	Binjai Tapan	
4	Tigo Sungai Inderapura	Pancung Soal
5	Tanah Bakali Inderapura	Airpura
6	Lalang Panjang Inderapura	
7	Air Haji Tenggara	Linggo Sari Baganti
8	Pasar Bukit Air Haji	
9	Rantau Simalenang Air Haji	
10	Sungai Sirah Air Haji	
11	Muara Kandis Punggasan	
12	Nyiur Malambai Palangai	Ranah Pesisir
13	Koto VIII Palangai	
14	Taratak	Sutera
15	Amping Parak Timur	
16	Gantiang Mudiak Utara Surantih	
17	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Batang Kapas
18	IV Koto Hilie	
19	Puluik-Puluik Selatan	IV Nagari Bayang Utara
20	Kapuh	Koto XI Tarusan

Selanjutnya kriteria lokasi prioritas 2 intervensi penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang air minum adalah nagari yang jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak banyak (di atas rata-rata) dan persentase masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak sedikit (di bawah rata-rata), Jumlah nagari yang masuk kriteria tersebut adalah sebanyak 17 nagari yang tersebar di 8 kecamatan.

Lokasi prioritas 3 adalah nagari yang jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak sedikit (di bawah rata-rata) dan persentase masyarakat miskin dan rentan miskin dengan sumber air minum tidak layak banyak (di atas rata-rata), yang berjumlah sebanyak 12 nagari di 6 Kecamatan.

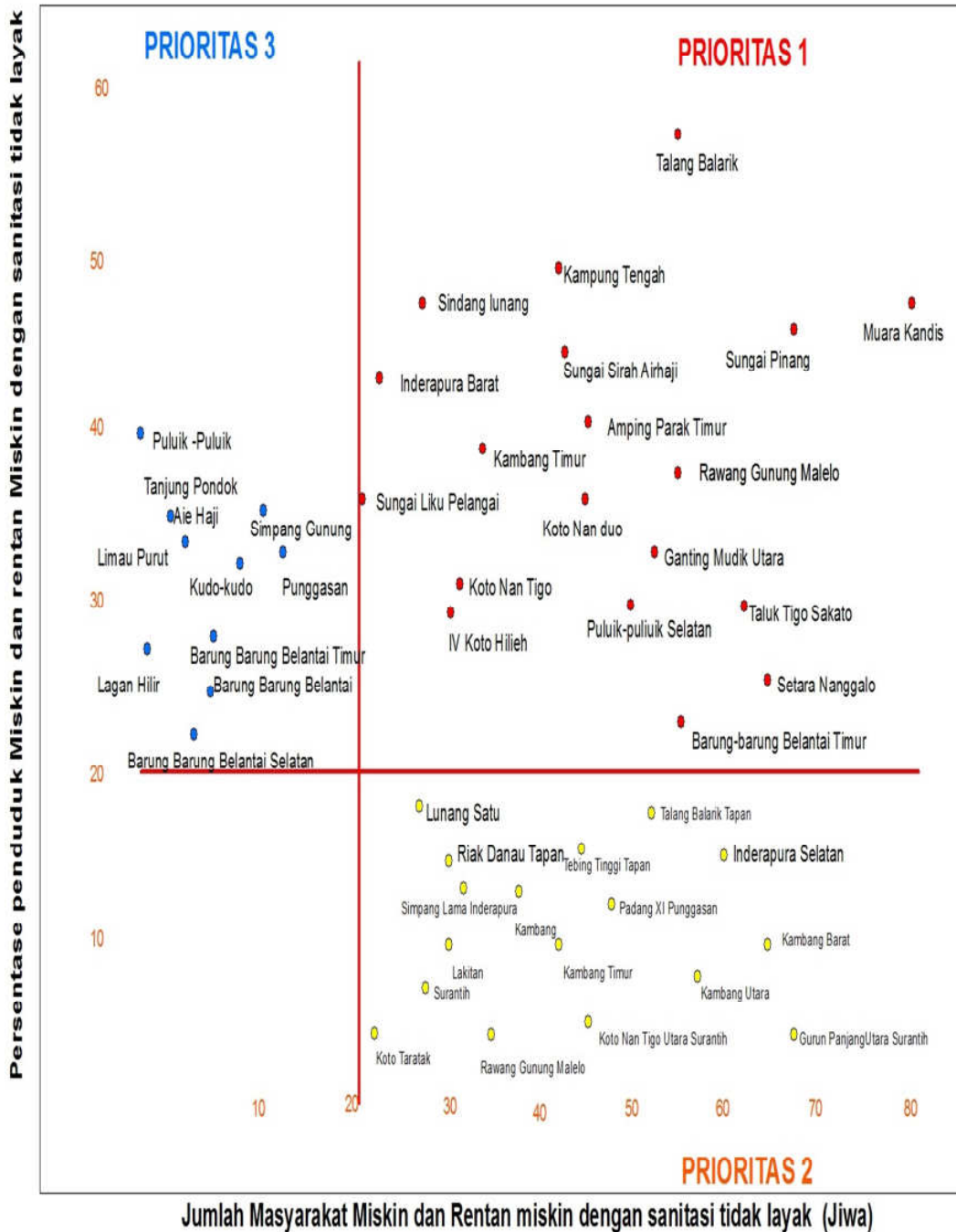
Sebaran lokasi prioritas 1-4 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang air minum dalam bentuk peta adalah sebagai berikut:

**Gambar 5.9.**  
**Peta Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**  
**Bidang Infrastruktur Dasar Sub Bidang Air Minum**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**



Beranjak ke sub bidang sanitasi, hasil analisis kuadrannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 5.10**  
**Pengelompokan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan**  
**berdasarkan Jumlah Keluarga Desil 1 dengan Akses Sanitasi Tidak Layak dan Persentase Keluarga miskin dan rentan miskin dengan Akses Sanitasi Tidak Layak**



Lokasi prioritas 1 intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan gambar di atas adalah nagari dengan jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang punya akses sanitasi tidak layak banyak (di atas rata-rata) dan persentase keluarga miskin dan rentan miskin dengan sanitasi tidak layak banyak (di atas rata rata). Nagari yang memenuhi kriteria tersebut adalah sebanyak 19 nagari yang tersebar di 10 Kecamatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.**  
**Lokasi Prioritas 1 Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Sub Bidang Sanitasi**

No	Nagari	Kecamatan
1	Sindang Lunang	Lunang
2	Talang Balarik Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan
3	Kampung Tengah Tapan	
4	Sungai Pinang Tapan	
5	Inderapura Barat	Pancung Soal
6	Sungai Sirah Air Haji	Linggo Sari Baganti
7	Muara Kandis Punggasan	
8	Sungai Liku Palangai	Ranah Pesisir
9	Kambang Timur	Lengayang
10	Amping Parak Timur	Sutera
11	Rawang Gunung Malelo Surantih	
12	Gantiang Mudiak Utara Surantih	
13	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Batang Kapas
14	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	
15	IV Koto Hilie	
16	Taluk Tigo Sakato	
17	Puluik-Puluik Selatan	IV Nagari Bayang Utara
18	Barung-barung Balantai Timur	Koto XI Tarusan
19	Setara Nanggalo	

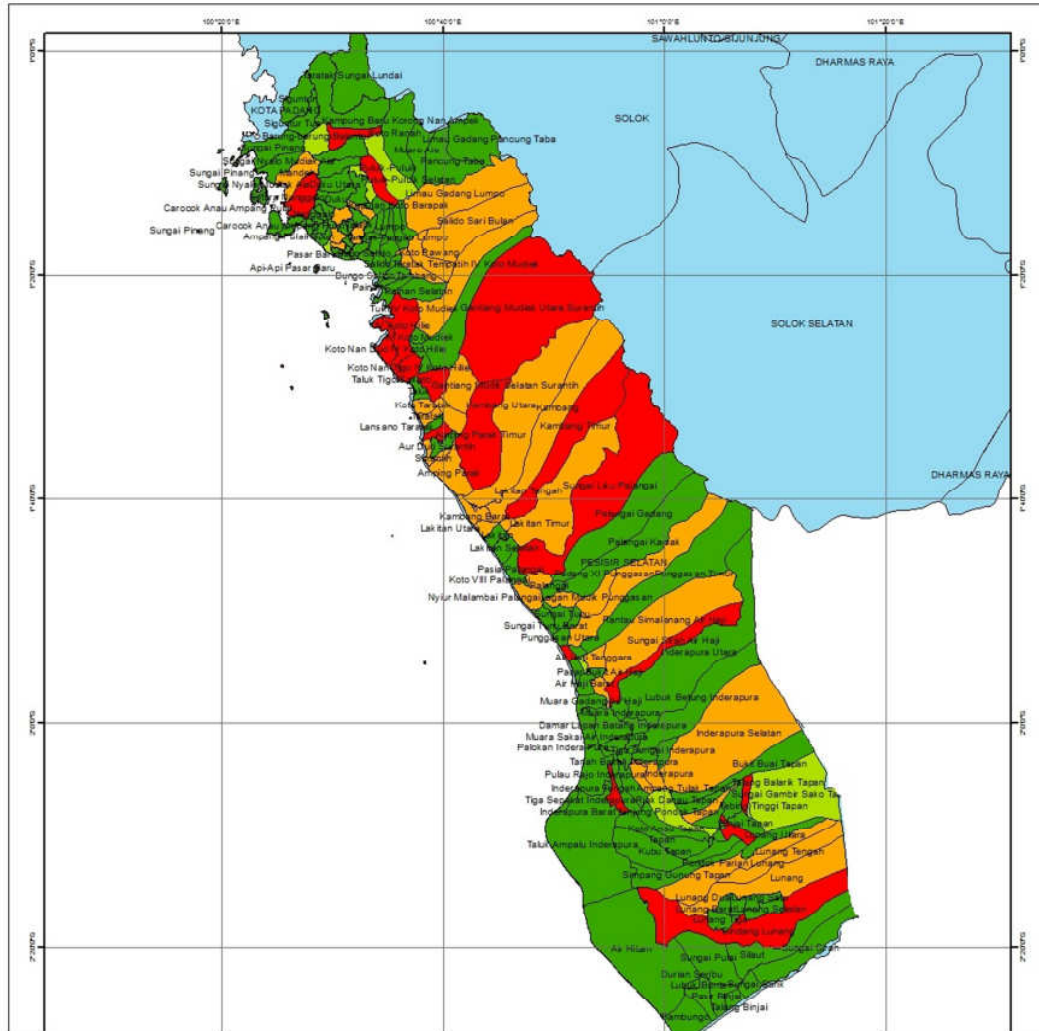
Lokasi prioritas 2 intervensi penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang sanitasi adalah nagari yang jumlah

keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak banyak (di atas rata-rata) dan persentase keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak sedikit (di bawah rata-rata), sebanyak 38 nagari.

Lokasi prioritas 3 adalah nagari yang jumlah keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak sedikit (di bawah rata-rata) dan persentase keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak banyak (di atas rata-rata), sebanyak 8 nagari. Sedangkan lokasi prioritas 4 adalah nagari yang jumlah keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak sedikit (di bawah rata-rata) dan persentase keluarga miskin dan rentan miskin dengan akses sanitasi tidak layak juga **sedikit (di bawah rata-rata)**,

Sebaran lokasi prioritas 1-4 untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sub bidang sanitasi dalam bentuk peta adalah sebagai berikut :

**Gambar 5.11.**  
**Peta Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang**  
**Infrastruktur Dasar Sub Bidang Sanitasi**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**



<b>PETA LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b> <b>BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR SUB BIDANG SANITASI</b> <b>KABUPATEN PESIR SELATAN</b>		 Skala : 1: 600 000
<b>LEGENDA</b>  <b>PETA PRIORITAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> PRIORITAS 4</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> PRIORITAS 3</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> PRIORITAS 2</li> <li><span style="color: red;">■</span> PRIORITAS 1</li> </ul>	 <b>BAPEDALITBANG</b> <b>PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN</b> <b>PROPINSI SUMATERA BARAT</b> <b>TAHUN 2024</b>	<b>PETA ORIENTASI</b> 

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **6.1. Mitigasi Resiko**

Dalam rangka akselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penaggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kegiatan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan dilakukan *tagging* untuk dikategorikan ke dalam 3 kategori tujuan program yaitu: menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan miminimalkan wilayah kantong kemiskinan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mitigasi resiko terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi kemiskinan berbasis spasial dan karakteristik kemiskinan spasial sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana induk perkotaan/perdesaan maupun dalam perancangan program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kesadaran ini dapat dimulai dengan pengumpulan data tentang kondisi awal kemiskinan baik secara kuantitatif maupun kualitatif-partisipatoris yang kemudian diikuti dengan kajian tentang potensi dampak sosial atau prediksi perubahan penghidupan masyarakat yang dapat terjadi akibat pembangunan/penerapan perencanaan tata ruang di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menciptakan sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang peka akan kebutuhan dan kondisi penghidupan

kelompok miskin serta kerentanan yang mereka hadapi sesuai dengan konteks spasialnya. Mekanisme perlindungan bagi kelompok miskin di daerah pinggiran sungai atau pantai/laut harus lebih berkonsentrasi pada mitigasi risiko bencana serta pengintegrasian ke dalam ekonomi perkotaan untuk mengantisipasi menurunnya kondisi SDA. Adapun untuk daerah tengah kota, upaya perlindungan dapat difokuskan pada penataan permukiman di kawasan ilegal dengan penyediaan sarana sanitasi dan air bersih serta antisipasi penggusuran. Untuk daerah pinggiran kota, upaya dapat dikonsentrasikan pada penyediaan lahan permukiman baru yang teratur dan penyediaan akses transportasi yang murah dan memadai;

3. Implikasi rencana induk perkotaan dan pedesaan terhadap penghidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin, sangat besar. Perubahan kondisi spasial sangat berpengaruh terhadap akses kelompok ini terhadap pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan tempat tinggal. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa isu kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ada belum mempertimbangkan aspek spasial kemiskinan dan kerentanan. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada berkurangnya efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk kemiskinan dan kerentanan baru atau memperparah kondisi kemiskinan yang sudah ada. Jadi bagi pemangku kepentingan, terutama Perangkat Daerah (OPD), harus melihat perencanaan spasial dan penanggulangan kemiskinan sebagai dua hal yang saling berhubungan dimana OPD harus melihat penanggulangan kemiskinan secara sektoral dan dapat mengaitkannya dengan dinas-dinas lainya untuk mengurus sektor dan kegiatan sosial seperti Bappedaltbang, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), ataupun Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas lainnya dalam menyusun tataran program

dan tataran strategi ataupun konsep perencanaan spasial yang berjangka panjang.

## **6.2. Kesimpulan**

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, hal ini ditunjukkan dengan trend penurunan angka kemiskinan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin tetapi Tahun 2022 sampai Tahun 2023 mengalami penurunan kembali dan sudah berupaya optimal dalam melakukan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran yang sudah sangat baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara program dan layanan baik di pusat maupun daerah penting untuk dilakukan sehingga terdapat pemahaman terkait konsep dan permasalahan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat hingga daerah yang komprehensif, kemampuan pemangku kepentingan untuk dapat mengakses data penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi serta kemampuan pemangku kepentingan untuk melakukan proses perencanaan, penganggaran, intervensi dan evaluasi untuk program dan layanan kemiskinan ekstrem dengan melihat hasil analisis bidang kesehatan, infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan yang masih menunjukkan hasil belum optimal.
3. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan kedepannya akan menerapkan aplikasi online data *by name by address* yang terintegrasi

dan komprehensif, sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

4. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

### **6.3. Rekomendasi**

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan ketepatan sasaran untuk mengintervensi program kemiskinan, dengan cara menggunakan satu data sasaran dan konvergensi program kemiskinan. Database penduduk miskin perlu untuk selalu diperbarui serta perlu optimalisasi survei penduduk miskin secara rutin. Metode lain yang dapat digunakan, dengan mengoptimalkan e-ktp dimana pemenuhan nomor induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat miskin kronis perlu diperhatikan untuk memastikan keakuratan sasaran penerima bantuan. Data yang sama perlu digunakan oleh seluruh lembaga yang terlibat baik itu Pemerintah Pusat, Daerah maupun non Pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menerapkan aplikasi online data *by name by address* yang terintegrasi dan komprehensif;
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara program dan layanan baik di pusat maupun daerah penting untuk dilakukan sehingga terdapat pemahaman terkait konsep dan permasalahan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat hingga daerah yang komprehensif, kemampuan pemangku

kepentingan untuk dapat mengakses data penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi serta kemampuan pemangku kepentingan untuk melakukan proses perencanaan, penganggaran, intervensi dan evaluasi untuk program dan layanan kemiskinan ekstrem;

3. Pemerintah Daerah harus meningkatkan keaktifan dari seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja dengan menyusun program kerja pada saat Rakor Perencanaan di awal tahun dan menyampaikan hasil kerjanya pada Rakor Evaluasi di akhir tahun;
4. Dokumen RPKD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam membuat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tindak lanjut dalam monitoring berupa langkah korektif terhadap kinerja, keluaran, dan hasil/manfaat, serta dampak dari pelaksanaan program/kegiatan harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan memperhatikan prinsip *good governance*, khususnya dalam konteks akuntabilitas kinerja, kegiatan monitoring dilakukan dengan seksama, fokus, tajam, jujur, berhasil guna dan seharusnya dilakukan mengacu pada dokumen perencanaan;
5. Mengintegrasikan data tentang kemiskinan dengan informasi berbasis spasial, misalnya, dengan Aplikasi SIMAPAN, Aplikasi SINAR maupun aplikasi lainnya dalam bentuk peta interaktif ataupun peta sosial. Data kemiskinan terintegrasi seperti ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan sumber daya yang tersedia serta dengan membangun kemitraan dengan kalangan nonpemerintah ataupun lembaga donor

untuk membuat inovasi dapat menghasilkan inovasi dalam penyediaan informasi kemiskinan berbasis spasial yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

*Pesisir Selatan Negeri Sejuta Persona*